

**Inovasi Fundamental
Pendidikan Bermutu
untuk Semua**



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
2025

Inovasi Fundamental Pendidikan Bermutu untuk Semua

Apresiasi dan Harapan Publik



Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Inovasi fundamental pendidikan bermutu untuk semua: apresiasi dan harapan publik Toni Toharuddin, Haryatmoko, Syamsul Kurniawan, Biyanto, Dinia Husni Rahiem [dan 43 lainnya] ; editor, Biyanto, Toni Toharuddin, Bambang Trim
EDISI	Edisi I
PUBLIKASI	Jakarta Selatan : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025
DESKRIPSI FISIK	xxii, 254 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-00-2024-3
SUBJEK	Pendidikan - Bunga Rampai
KLASIFIKASI	370.2 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1283827

**Inovasi Fundamental Pendidikan Bermutu untuk Semua
Apresiasi dan Harapan Publik**

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Hak cipta tulisan ada pada setiap Penulis, hak penerbitan ada pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Pengarah: Toni Toharudin
Penanggung Jawab: Supriyatno
Koordinator Penyusunan: Helga Kurnia

Editor: Biyanto, Toni Toharudin, Bambang Trim
Penyelia Naskah: Eka Setiawati
Desainer: Kusye Kustira

Penerbit
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Dikeluarkan oleh
Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kompleks Kemendikdasmen
Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemendikdasmen.go.id>

Edisi I, Oktober 2025
ISBN: 978-634-00-2024-3
ISBN: 978-634-00-2025-0 (PDF)
Sumber Foto Cover: Kemendikdasmen (2025)
Isi buku ini menggunakan huruf Utopia Std, Montserrat, Roboto
xxii, 254 halaman, 15,5 cm × 23 cm

Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Alhamdulillah, penyusunan dan penerbitan buku ini pada akhirnya tuntas. Buku bunga rampai yang berisi tulisan dari berbagai penulis ini merupakan ikhtiar untuk merekam apresiasi dan harapan publik terhadap inovasi kebijakan fundamental Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dilihat dari isinya, ada tulisan-tulisan yang substansinya mengapresiasi positif kebijakan Kemendikdasmen. Sebagian lagi, ada tulisan yang memberikan catatan kritis, tetapi konstruktif. Kami menjadikan setiap catatan kritis itu layaknya energi positif. Bahkan, kami seperti sedang berbelanja ide atau gagasan inovatif dan kreatif dari catatan-catatan kritis itu. Selanjutnya, kami memosisikan ide-ide kritis itu sebagai harapan publik dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Kalau berbicara tentang visi kami, yakni mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, ada alasan legal konstitusional yang menjadi landasan dalam kami mengambil dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat; Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3; Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama yang berkaitan dengan Amanah bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN; dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Selain itu, mandat Asta Cita poin 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan menjadi pijakan kebijakan pendidikan.

Semua regulasi tersebut adalah landasan legal konstitusional program kami yang merupakan bagian dari amanah dan juga tugas Presiden RI untuk kita laksanakan bersama-sama. Kalau kita berusaha mengkaji tentang pendidikan, pendidikan merupakan bekal untuk menjawab tantangan masa depan.

Ada beberapa hal penting yang menjadi bagian dari pertimbangan kami melihat ke depan. Misalnya, bagaimana kita menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, perkembangan kecerdasan artifisial, keamanan siber, transisi energi, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, dan juga masalah yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana tantangan yang kita hadapi itu dalam kaitannya dengan persaingan dunia global dan apa yang dapat kita siapkan dalam menghadapi tantangan dunia global itu?

Pada konteks itulah cita-cita mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua penting karena memiliki dua dimensi yang saling berkait. Saya menyebut yang pertama adalah dimensi konservatif yang berkaitan dengan konservasi atau pelestarian pewarisan

nilai-nilai mulia, nilai-nilai utama yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Kedua, dimensi progresif, ketika kita sebagai bangsa harus terus bergerak maju ke depan, merancang masa depan dengan menjawab tantangan dan berbagai permasalahan secara optimistis dengan berbekal kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mencoba melihat data-data yang berkaitan dengan arti strategis pendidikan dasar menengah, kita dapat melihat bahwa lebih dari 30 persen penduduk Indonesia berada pada usia PAUD hingga pendidikan menengah.

Kualitas pendidikan dengan demikian sangat menentukan kualitas Indonesia pada masa depan. Kalau kita berbicara Indonesia 2045, dua puluh tahun ke depan, wajah Indonesia 2045 akan ditentukan oleh mereka yang sekarang belajar di tingkat taman kanak-kanak kemudian juga SD, SMP, dan SMA/SMK. Saya kira sudah sangat tepat, ketika Presiden Prabowo membuat kebijakan tentang makan bergizi gratis yang diperuntukkan bagi ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang belajar dari jenjang pendidikan PAUD sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini karena merekalah (anak-anak itu) yang nanti akan menjadi pemimpin Indonesia pada masa yang akan datang.

Kalau kita mencoba melihat gambaran pendidikan Indonesia secara umum, kita melihat bagaimana potret pendidikan itu dari angka partisipasi sekolah secara umum yang makin mendekati universal meskipun perlu peningkatan di beberapa daerah. Kami menampilkan beberapa data sederhana tentang partisipasi pendidikan pada usia 5-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun, sebagaimana data yang dapat kita baca bersama-sama. Itulah sebenarnya tantangan yang harus kita jawab dan itu yang menjadi bagian dari agenda kita mengapa kemudian Presiden Prabowo menekankan arti pentingnya peningkatan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bahkan, wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan di taman kanak-kanak.

Kita melihat bagaimana sarana dan prasarana pada sebagian sekolah kita yang juga membutuhkan perbaikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Dari data terlihat bagaimana persentase

ruang kelas menurut jenjang pendidikan dan kondisi bangunan pada tahun 2024. Hal itu yang menjadi alasan mengapa kemudian Presiden Prabowo membuat kebijakan agar revitalisasi sekolah menjadi bagian dari agenda besar kita dan agenda memperbaiki pendidikan di Tanah Air. Kalau kita mencoba melihat hasil belajar yang juga masih menjadi tantangan kita bersama-sama, terutama adalah yang berkaitan dengan kemampuan membaca di bawah standar.

Data menunjukkan bahwa 75% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan membaca di bawah standar PISA level 2. Hal itu berarti mereka kesulitan memahami gagasan utama dan sebuah teks panjang. Mereka mampu membaca, tetapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Biasanya kalau membaca angka-angka cepat memahami, tetapi tidak demikian dengan membaca kata-kata.

Data lain menunjukkan bahwa 82% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kemampuan matematika di bawah standar, di bawah level 2 PISA. Artinya, mereka masih kesulitan memahami aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau kemudian kita melihat bagaimana profil pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, terdapat kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah sehingga menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Itu sekadar contoh berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP/MTs tahun 2024. Perlu intervensi lebih untuk mengatasi ketertinggalan, terutama di sebagian kawasan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur.

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di setiap wilayahnya. Hal itu berdasarkan landasan konstitusional, dan juga kondisi realistis yang kita hadapi, serta berbagai pertimbangan ke masa depan.

Kita memiliki program-program prioritas yang merupakan penerjemahan dari Asta Cita, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertama adalah wajib belajar 13 tahun, yang di situ kita berusaha untuk memperluas dan memperkuat pemerataan kesempatan pendidikan. Kedua adalah pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualifikasi,

kompetensi, dan kesejahteraan guru, kemudian penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi, pengembangan talenta dan prestasi, serta pembangunan kebahasaan dan kesusastraan.

Ketika kita mencoba melihat program-program itu maka sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru, Kemendikdasmen memfasilitasi redistribusi guru ASN pada sekolah swasta.

Terdapat 110 ribu guru swasta telah lulus seleksi guru ASN PPPK dan ditempatkan di sekolah negeri. Hal itu berdampak pada adanya kekurangan guru pada sekolah swasta. Karena itu, melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, guru ASN atau PNS dan PPPK dapat didistribusikan pada satuan pendidikan swasta. Redistribusi mempertimbangkan data kebutuhan guru pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Redistribusi dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali lagi. Sekolah swasta yang menerima redistribusi guru ASN tetap melakukan upaya pemenuhan guru pada sekolahnya.

Kemendikdasmen juga mengubah sistem pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang lebih sederhana, mudah, dan bermakna. Pengelolaan kinerja guru atau kepala sekolah dan pengawas, kami lakukan melalui berbagai kebijakan dalam hal ini pengisian kinerja guru dilakukan 1 kali dalam setahun.

Dokumen administrasi mendapat verifikasi secara langsung dari atasan dan pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri. Transformasi pengelolaan kinerja memudahkan guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan dan pengawas sekolah karena sistem ruang GTK Kemendikdasmen, sudah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN sehingga hanya memakai satu sistem. Terkait dengan kebijakan itu, kami sudah menekan nota kesepahaman dengan BKN. Program tersebut juga sudah mulai dilaksanakan.

Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, Kemendikdasmen melakukan transformasi

sistem penerimaan murid baru (SPMB). Dengan SPMB ini kami membuat kebijakan yang merupakan penyempurnaan dari sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). SPMB didasarkan berbagai masukan dari para kepala daerah, pengambil kebijakan, dan kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan. Kami mengambil kebijakan ini juga setelah melalui diskusi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan perbaikan PPDB. Alhamdulillah, SMPB tahun 2025 berlangsung dengan sangat baik.

Kemendikdasmen juga mengenalkan penguatan karakter melalui Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). Itu juga kami laksanakan dengan Surat Edaran Bersama Tiga Menteri; Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuh kebiasaan itu, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Pelaksanaannya di satuan pendidikan telah diamanatkan melalui Surat Edaran Tiga Menteri. Alhamdulillah 7KAIH sekarang sudah terlaksana di banyak satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, 7KAIH merupakan salah satu dari lomba yang kami selenggarakan. Bahkan, beberapa sekolah ada yang menjadikan tujuh kebiasaan sebagai salawatan. Jadi, salawatannya dengan tujuh kebiasaan, terutama di madrasah-madrasah yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU). Penting ditekankan, 7KAIH ini merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter.

Kemendikdasmen juga menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*), yaitu pembelajaran yang memuliakan agarterciptasuasanabelajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, Kemendikdasmen mengenalkan pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital, meningkatkan kemampuan

berpikir komputasional, meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara produktif dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk menyempurnakan sistem evaluasi yang merangsang belajar murid, Kemendikdasmen menginisiasi kebijakan evaluasi yang baru, yakni Tes Kemampuan Akademik (TKA). Pada 2025, TKA untuk murid kelas XII SMA dan yang sederajat mulai dilaksanakan. Forum Rektor pun menyambut baik kebijakan itu dan berkomitmen menjadikan hasil TKA SMA dan yang sederajat sebagai persyaratan memasuki perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

Kebijakan pembelajaran mendalam kami terapkan agar ketika anak-anak kita belajar orientasinya bukan sekadar lulus. Orientasinya bukan sekadar mendapatkan nilai tinggi, melainkan mereka bersemangat untuk menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berkarakter kuat.

Seperti diketahui, abad ke-21 sering ditandai dengan disrupsi. Era itu kata para ahli ditandai oleh adanya VUCA atau adanya TUNA dan VUCA. VUCA itu adalah akronim dari *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*. Sementara itu, TUNA akronim dari *turbulent*, *uncertainty*, *novelty*, dan *ambiguity*.

Saya kira yang kedua ini lebih kuat dan lebih dapat kita saksikan ketika kita mengalami turbulensi, guncangan yang sangat kuat dalam berbagai bidang. Kemudian, ada banyak hal ketika kita mengalami ketidakpastian (*uncertainty*), banyak hal yang baru (*novelty*), dan secara nilai banyak terjadi kontradiksi (*ambiguity*). Dalam era yang disebut dengan VUCA atau TUNA itu banyak hal baru yang terjadi, tetapi banyak hal lama yang sudah ditinggalkan.

Era digital yang oleh Smith, dalam bukunya *Living in the Digital Age*, itu disebut sebagai era ketika kita mengalami sebuah kesenjangan (*gap*). Ketika teknologi digital mulai mengisi ruang-ruang kehidupan kita, ada banyak nilai lama yang ditinggalkan. Dari keadaan itu, maka banyak hal yang memang mengalami perubahan-perubahan yang sangat luar biasa.

Kita mengalami gap yang sangat tinggi, terutama *gap* antargenerasi. Generasi Z, generasi *baby boomers* itu sekarang bersama-sama hidup dalam era disrupsi. Alhasil, kita sering menyaksikan menjadi salah satu hal yang tidak mudah kita atasi. Sering kita dengar misalnya, ketika muncul kekerasan di sekolah, generasi model saya ini (*baby boomers*) yang mengatakan dulu kita dijewer juga biasa. Namun, anak sekarang ketika dijewer maka gurunya akan dilaporkan kepada polisi.

Dulu sekolah naik sepeda itu biasa ketika saya bercerita ke anak saya bagaimana harus bangun pagi-pagi untuk bersepeda ke sekolah sejauh 8 km, bahkan pernah juga 10 km. Setelah itu kemudian ke sawah, membantu orang tua, dan memelihara sapi di rumah. Saya ceritakan itu ke anak saya, dan kemudian apa jawaban anak saya?

“Bapak ingin saya seperti Bapak dahulu gitu?”

Padaahal, maunya kita menceritakan bagaimana spirit bahwa kalau orang itu ingin maju, dia tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dia harus berani mengatasi berbagai macam kesulitan. Pesan itu yang sebenarnya ingin disampaikan, tetapi sering kali itu *lost in translation*. Maksudnya kita begini, ditangkapnya berbeda. Maka dari itu, kita harus berubah dalam cara kita mendidik.

Ada juga penulis terkenal, Yuval Noah Harari. Dalam bukunya *21 Lessons for 21st Century*, ia menyebut ada banyak hal yang ditinggalkan karena tidak lagi relevan. Dampaknya, tantangan kita di dunia pendidikan itu yang sangat besar adalah *the problem of irrelevant* atau masalah ketika banyak yang diajarkan itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi ini, dan apa yang dibutuhkan untuk mereka hidup pada masa depan. Saya jadi ingat pesan sahabat Nabi Muhammad saw.: “Didiklah anakmu karena sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang hidup bukan pada zamanmu.” Maka dari itu, pendidikan harus berorientasi ke masa depan. Kalau kita sekarang berbicara Indonesia Emas 2045, mereka itu adalah anak-anak yang kini belajar di TK, SD, SMP, dan SMA.

Lalu, kita memproyeksikan apa yang bakal terjadi pada tahun 2045? Dunia akan seperti apa? Maka dari itu, pendidikan harus

memberikan kepada anak-anak kita dua bekal penting. Pertama adalah bekal untuk dapat bertahan dalam kehidupan sekarang ini. Kedua, adalah bagaimana ia dapat tetap memiliki makna dan berkontribusi bagi masyarakatnya, bagi bangsanya pada masa yang akan datang. Maka dari itu, pendidikan harus memberikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pewarisan nilai (*conserve of values*). Ada hal-hal yang utama yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, tetapi juga ada sisi progresif ketika kita membekali mereka dengan berbagai macam kecakapan dan keterampilan agar mereka hidup pada masa depan.

Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada penerbitan buku ini. Semoga inovasi kebijakan Kemendikdasmen mampu mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hasilnya, kita berharap anak-anak menjadi bagian dari generasi emas bangsa 2045.

Jakarta, Oktober 2025

Pengantar Tim Editor



Alhamdulillah, buku berjudul *Inovasi Fundamental Pendidikan Bermutu untuk Semua: Apresiasi dan Harapan Publik* pada akhirnya dapat diterbitkan. Buku ini berkategori bunga rampai. Karena itu, konten tulisannya sangat beragam. Penulisnya pun berasal dari berbagai latar belakang, baik *insider* maupun *outsider* Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Meski berjenis bunga rampai, tema pokok yang dibahas buku ini tetap berkaitan dengan program prioritas yang dicanangkan Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., memang telah menetapkan rencana strategis (Renstra) dengan sejumlah program prioritas. Program prioritas ini merupakan cabaran dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Setidaknya ada tujuh program prioritas Kemendikdasmen yang dituangkan dalam Renstra. Tujuh program prioritas itu, yaitu (1) Wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan Pendidikan; (2) Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana; (3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru; (4) Penguatan pendidikan karakter; (5) Penguatan literasi, numerasi,

dan sains teknologi; (6) Pengembangan talenta dan prestasi; serta (7) Pembangunan bahasa dan kesastraan.

Belum semua program prioritas Kemendikdasmen dibahas dalam buku ini. Hal itu karena untuk menjadi bagian dari buku ini, persyaratan utamanya adalah tulisan yang sudah dipublikasikan di media massa dalam rentang satu tahun terakhir (Oktober 2024–Oktober 2025). Tentu tidak sembarang media, tetapi dipilih tulisan dari media yang kredibel dan otoritatif. Dengan persyaratan tersebut berarti tulisan yang dipublikasikan dalam buku ini sudah terlebih dulu lolos dari saringan media massa, baik cetak maupun digital.

Seperti diketahui, untuk dapat dipublikasikan di media yang kredibel dan otoritatif, penulis harus menyisihkan banyak pesaing. Apalagi kompetisi antarpengarang di media yang kredibel dan otoritatif tergolong sangat ketat. Karena itulah tulisan yang ada dalam buku bunga rampai ini benar-benar sudah jadi dan enak dibaca. Apa yang dilakukan Tim Editor adalah merapikan gaya selingkung tulisan. Hal itu dilakukan karena setiap media pasti memiliki gaya selingkung tersendiri.

Setiap pengarang juga memiliki rasa kebahasaan yang unik. Dengan menyelaraskan gaya selingkung tulisan maka konsistensi struktur dan bahasa tulisan terjaga. Di sisi lain, substansinya masih sama dengan tatkala tulisan itu dipublikasikan di media. Hal itu penting karena isi tulisan yang dipublikasikan dalam buku ini merupakan hak karya intelektual setiap pengarang. Dengan penyelarasan struktur tulisan dan bahasa maka pembaca akan menikmati bagian per bagian yang disajikan dalam buku ini.

Karena isi buku ini sangat beragam, Tim Editor mengelompokkan setiap tulisan berdasarkan kedekatan tema. Pengelompokan tulisan dilakukan untuk memudahkan pembaca menangkap secara utuh program prioritas Kemendikdasmen, regulasi dan kebijakan yang diambil, serta strategi dan implementasinya. Berdasarkan kategori tersebut, buku ini berisi lima bagian, yakni (1) Implementasi Pembelajaran Mendalam, (2) Inovasi Tes Kemampuan Akademik, (3) Terobosan Koding dan Kecerdasan Artifisial, (4) Guru Kunci

Pendidikan, serta (5) Literasi dan Numerasi untuk Pendidikan Bermutu.

Selama proses penyusunan hingga penerbitan buku ini pasti melibatkan banyak pihak. Untuk itulah kami mengucapkan terima kasih tak terhingga pada Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu'ti dan jajaran Kemendikdasmen yang sudah mencanangkan program prioritas sekaligus meletakkan dasar-dasar kebijakan yang sangat fundamental. Semua inovasi dan terobosan kebijakan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Gagasan segar dan inovasi Mendikdasmen menjadi inspirasi bagi jajaran unit utama dan keluarga besar Kemendikdasmen untuk terus melangkah dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si, M.Sc., yang telah memfasilitasi penulisan dan penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Pusat Perbukuan, Supriyatno, S.Pd, M.A., yang telah memfasilitasi diskusi untuk membahas isi buku. Ucapan terima kasih tak terhingga tentu kami sampaikan kepada para penulis yang terus menebar kebaikan melalui berbagai tulisan di media. Melalui goresan pena para penulis itulah program prioritas Kemendikdasmen tersosialisasikan ke publik.

Secara khusus ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim sekretariat di Pusat Perbukuan, Kemendikdasmen dan tim desain buku. Kerja cerdas, cepat, dan ikhlas seluruh tim menjadikan buku ini dapat dinikmati pembaca. Apalagi, buku ini dirancang sebagai bagian dari kado istimewa satu tahun perjalanan Kemendikdasmen di bawah nakhoda Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu'ti. Perjalanan satu tahun (21 Oktober 2024-21 Oktober 2025) yang terasa cepat, tetapi sangat bermakna bagi masa depan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih baik.

Akhirnya, semoga semua kontribusi positif dari jajaran pimpinan Kemendikdasmen, para penulis, tim editor, dan staf

sekretariat Pusat Perbukuan menjadi amal jariyah yang akan terus mengalirkan pahala dari Allah Swt. Kepada para pembaca, kami ucapkan selamat menikmati buku ini. Dengan memahami konteks tulisan masing-masing rasanya pembaca dapat mengambil inspirasi dari buku ini. Semoga!

Jakarta, September 2025

Biyanto

Daftar Isi



Sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. | v

Pengantar Tim Editor | xv

Bagian I Implementasi Pembelajaran Mendalam | 1

- 01 Mengakhiri 'Schooling without Learning', Memulai Pembelajaran Mendalam
Toni Toharudin | 2
- 02 Deep Learning: Pembelajaran Reflektif, Kritis, dan Kreatif
Haryatmoko | 7
- 03 Mampukah Deep Learning Menyempurnakan Kurikulum Merdeka?
Syamsul Kurniawan | 14
- 04 Pembelajaran Mendalam Model Kiai Dahlan dan Abdul Mu'ti
Biyanto | 21
- 05 Deep Learning dan Strategi Pendidikan Berkualitas
Dinia Husni Rahiem | 27
- 06 Pembelajaran Mendalam: Wawasan Pendidikan Membangun Generasi Tangguh Era Disrupsi
Toni Toharudin | 33
- 07 Pembelajaran Mendalam: Implikasi untuk Guru dan Kepala Sekolah
Suyanto | 37

- 08 Belajar Mendalam dengan “Otak Busuk”
Heribertus Jani | 44
- 09 Pembelajaran Mendalam dan Revolusi Belajar
Arif Jamali Muis | 49
- 10 Menunggu Dampak Deep Learning
Hendarman | 55
- 11 Membumikan Pembelajaran Mendalam
Syamsir Alam | 59
- 12 Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Memperkuat
Deep Learning
Idris Apandi | 64

Bagian II Inovasi Tes Kemampuan Akademik | 69

- 13 Tes Kemampuan Akademik: Harapan Baru untuk
Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah
Muhammad Syawal Djamil | 70
- 14 Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan
Nasional
Toni Toharudin | 75
- 15 TKA dan Moderasi Penilaian Berbasis Individu
Biyanto | 80
- 16 Tes Kemampuan Akademik Berintegritas
Biyanto | 86
- 17 Menakar Efektivitas Tes Kemampuan Akademik untuk
Membentuk Siswa Berpikir Kritis
Fahrudin Eko Hardiyanto | 90
- 18 Tes Kompetensi Akademik dan Arah Baru Penjaminan
Mutu Pendidikan
Mohammad Nur Riantor Al Arif | 93
- 19 Tes Kemampuan Akademik, Menumbuhkan Berpikir
Kritis dan Kreatif Siswa
Endang Suprpti | 98
- 20 Terobosan Strategis Tes Kemampuan Akademik
Hendarman | 103
- 21 TKA dan Mutu Pendidikan Kita
Ahmad Tholabi Kharlie | 107
- 22 Tes Kemampuan Akademik untuk Semua
Wiguna Yuniarsih | 112

Bagian III Terobosan Koding dan Kecerdasan

Artifisial | 117

- 23 AI dan Masa Depan Pendidikan
Siti Murtiningsih | 118
- 24 Saatnya Anak Indonesia Belajar Menari dengan AI
Toni Toharudin | 122
- 25 Pelajaran Koding:
Inovasi Masa Depan atau Beban Baru?
Ananda | 126
- 26 Mana yang Lebih Penting, Literasi atau Koding?
Ifah Hanifah Misbach | 132
- 27 Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah
Muhammad Muchlas Rowi | 138
- 28 Antara Etika dan Otomatisasi: Refleksi Pengenalan
Koding dan AI di Sekolah
Muhammad Isa Anshori | 143
- 29 Edukasi Era Digital: Tantangan Screen Time saat AI
dan Koding Masuk Kurikulum Sekolah
Yudhi Kurnia | 147
- 30 Teknologi Pendidikan untuk Kualitas Pembelajaran
Moh. Abduh | 150
- 31 Menggagas Buku Teks Utama Mapel Koding dan
Kecerdasan Artifisial
Supriyatno | 154
- 32 The Deepseek Saga: Why AI Education Matters
Irsyad Zamjani | 160

Bagian IV Guru Kunci Pendidikan | 165

- 33 Desain Pendidikan Profesi Guru
Nunuk Suryani | 166
- 34 Hari Belajar Guru, Perlukah?
Triyanto | 171
- 35 Mewujudkan Pendidikan Bermutu
Lanny Ilyas Wijayanti | 176
- 36 Urgensi Wajib Belajar 13 Tahun
Biyanto | 181
- 37 Catur Pusat Pendidikan ala Mendikdasmen
Biyanto | 185

- 38 Reformasi Kepemimpinan Sekolah
Arif Jamali Muis | 190
- 39 MPLS Ramah dan Nirkekerasan
Biyanto | 198
- 40 Mengawal Program Revitalisasi Sekolah
Imron Rosyadi | 202
- 41 Ramadan dan Pedagogi Waktu
Irsyad Zamjani | 207

Bagian V Literasi dan Numerasi untuk Pendidikan Bermutu | 213

- 42 Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia
Hafidz Muksin | 214
- 43 Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia
Muhammad Muis | 222
- 44 Menyemai Asa Bahasa Ibu
Asrif | 226
- 45 Meramu Buku Teks dengan Formula Rasa 'Deep Learning'
Bambang Trim | 230
- 46 Literasi yang Terluka pada Era Digital
Hafidz Muksin | 237
- 47 Matematika (Seharusnya) Gembira dan Menggembirakan
Moh. Abduh | 241
- 48 Revolusi Pembelajaran Matematika: Dari Momok Menakutkan ke Pendekatan Humanis pada Era Digital
R. Poppy Yaniawati | 246

Epilog

***Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.* | 251**

Indeks | 253

Bagian I

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Kemendikdasmen, 2025



01

Mengakhiri ‘Schooling without Learning’, Memulai Pembelajaran Mendalam*

Toni Toharudin

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung

INDONESIA tengah berada pada titik kritis sejarahnya. Di tengah derasnya arus globalisasi, percepatan teknologi, dan ketidakpastian sosial-politik, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan berat. Namun, di balik kompleksitas itu, Indonesia menyimpan potensi besar melalui bonus demografi. Visi Indonesia Emas 2045 menggarisbawahi urgensi membangun sumber daya manusia yang adaptif, kritis, dan berkarakter.

*Artikel telah dipublikasikan di *Jawa Pos*, 4 Agustus 2025.

Sayangnya jarak antara visi dan realitas masih menganga. Fenomena *schooling without learning*, ketika banyak siswa hadir di sekolah, tetapi tidak benar-benar belajar, masih menyelimuti wajah pendidikan kita. Itu bukan sekadar metafora karena begitu banyak video yang beredar di media sosial yang menunjukkan potret getir pendidikan kita pada hari ini. Siswa-siswa SMA kita tak bisa menjawab pertanyaan matematika dasar. Mereka mengikuti pendidikan formal, tetapi gagal menguasai keterampilan dan pengetahuan esensial yang relevan dengan kehidupan nyata.

Potret suram di lapangan tersebut tentu hanyalah bagian kecil dari gunung es persoalan pendidikan kita yang begitu luas. Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya capaian literasi dan numerasi, serta pendekatan pembelajaran yang masih berpusat pada hafalan daripada pemahaman, kreativitas, dan keterampilan hidup memperkuat urgensi perubahan.

Kondisi itu menegaskan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual melalui Pembelajaran Mendalam (PM).

Filosofi, Konteks, dan Penerapan

Pada dasarnya, PM bukanlah metode pengajaran biasa, melainkan sebuah filosofi pendidikan yang menempatkan murid sebagai tokoh utama dalam proses belajar. Tujuannya tidak sekadar membuat peserta didik mengingat, tetapi memahami dengan utuh, mampu mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, dan terus mengembangkan makna dari apa yang dipelajarinya. PM menekankan kedalaman pemahaman, bukan tumpukan informasi.

Filosofi PM sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh besar pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, misalnya, melalui sistem pendidikan *among*-nya, menanamkan bahwa pendidikan harus membebaskan dan berakar pada budaya kasih dan kebijaksanaan. KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integritas dan keberanian memberikan kontribusi sosial. Sementara itu, KH Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya etos kerja dan moderasi

dalam belajar. Pemikiran-pemikiran itu adalah fondasi pendidikan Indonesia yang sejati, tidak sekadar untuk mencerdaskan, tetapi untuk membentuk manusia utuh : berpikir dalam, hidup bermakna dan mampu mengambil tanggung jawab sosial.

PM merupakan perwujudan filosofi pendidikan progresif yang mendukung pertumbuhan manusia secara holistik baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Pendekatan itu menjawab tantangan dan mengarahkan pendidikan Indonesia agar menghasilkan peserta didik yang tak hanya mengetahui banyak hal, tetapi juga mampu berpikir secara mendalam, bertindak bijak, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsanya.

“Pembelajaran Mendalam harus menjadi gerakan bersama yang menyatukan ruang kelas, rumah, dan dunia kerja.”

Di tengah beragam tantangan pendidikan saat ini, PM hadir bukan sekadar sebagai wacana ideal, melainkan pendekatan nyata yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. PM mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang positif dan menyeluruh dengan menyentuh aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual peserta. Prinsip pembelajaran aktif—yang menekankan pemahaman mendalam, penerapan dalam situasi nyata, serta refleksi berkelanjutan—menjadi inti pendekatan itu.

PM dapat diterapkan secara menyeluruh mulai jenjang PAUD hingga pendidikan menengah. Di jenjang PAUD dan SD, fokus PM terletak pada penguatan fondasi perkembangan anak melalui aktivitas bermain yang bermakna dan eksploratif. Di jenjang SMP, PM mulai menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang mengaitkan pengetahuan akademik dengan kehidupan sehari-hari.

Pada jenjang SMA, PM mendorong pendekatan yang lebih kompleks seperti proyek lintas disiplin, penelitian kontekstual, dan pengembangan keterampilan hidup serta kesiapan karier. Sementara itu, di SMK, PM lebih menekankan pada keterampilan

praktis yang relevan dengan dunia kerja melalui model pembelajaran kontekstual seperti *teaching factory* dan kemitraan industri.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung PM. Platform daring, aplikasi pembelajaran, dan media digital membuka akses ke beragam sumber dan memungkinkan kolaborasi lintas ruang. Namun, teknologi harus menjadi alat pendukung, bukan pengganti. Interaksi manusiawi tetap menjadi fondasi penting dalam proses pendidikan. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing sangat vital untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar memperkaya pengalaman belajar.

Risiko dan Tantangan

Meski menjanjikan, implementasi PM di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik struktural maupun kultural. Salah satu tantangan paling nyata adalah kapasitas guru. Banyak pendidik yang masih menggunakan metode tradisional berbasis ceramah dan hafalan. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan yang berkelanjutan berbasis *coaching* dan mentoring, termasuk praktik langsung seperti *microteaching* dengan umpan balik konstruktif.

Pembentukan komunitas belajar guru dapat menjadi sarana penting untuk berbagi praktik baik, refleksi kolektif, dan dukungan antarpendidik. Dengan demikian, PM tidak menjadi upaya individual, tetapi gerakan kolaboratif yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi PM sebaiknya diukur tidak hanya dari hasil tes akademik, tetapi juga melalui portofolio proyek siswa, observasi kemampuan kolaboratif, dan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah komunitas.

Tantangan lain yang tak kalah genting adalah ketimpangan infrastruktur. Di banyak daerah 3T, akses terhadap teknologi, koneksi internet, bahkan buku yang layak masih menjadi kemewahan. Jika tak ditangani secara serius, jurang kualitas antarwilayah kian dalam dan sulit dijembatani. Karena itu, strategi implementasi PM

harus adaptif terhadap kondisi lokal dan didukung kolaborasi lintas sektor agar dapat diterapkan secara adil dan merata.

Implementasi PM di Indonesia tidak dapat berjalan di atas fondasi lama. Ia menuntut pembaruan menyeluruh dalam sistem pendidikan. Mulai cara kita menyusun kebijakan hingga bagaimana kelas dijalankan di sekolah. Ekosistem pendidikan perlu diperkuat, mulai regulasi yang mendorong keberanian bereksperimen, lingkungan belajar yang lentur dan mendukung kreativitas, peningkatan kapasitas praktik pedagogis guru, serta pengurangan beban administratif guru yang selama ini menyita energi mereka dalam proses pembelajaran.

Selain itu, implementasi PM bukanlah tanggung jawab tunggal sekolah atau pemerintah. Ia harus menjadi gerakan bersama yang menyatukan ruang kelas, rumah, dan dunia kerja. Orang tua, komunitas, dan pelaku industri perlu dilibatkan sebagai mitra strategis dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang kaya dan kontekstual, Program-program seperti Pendidikan Profesi Guru, pengembangan komunitas belajar, serta optimalisasi peran kepala sekolah dan pengawas sangat penting untuk mendukung implementasi PM secara menyeluruh. Pemerintah juga memastikan bahwa semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dapat mengakses sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan.

Transformasi pendidikan Indonesia adalah langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan yang terus berubah. Dengan pendekatan itu, siswa tidak hanya dipersiapkan untuk ujian akademik, tetapi juga untuk kehidupan nyata yang penuh ketidakpastian. Pendidikan yang mengutamakan pemahaman mendalam, keterampilan abad ke-21, serta karakter yang kuat akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berdaya, berpikir kritis, dan memiliki empati terhadap sesama. Pendidikan Indonesia harus berubah untuk menciptakan generasi yang siap untuk memimpin arah baru masa depan. •

02

Deep Learning: Pembelajaran Reflektif, Kritis, dan Kreatif*

Haryatmoko

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP dan Anggota AIPI Komisi Kebudayaan

PADA 27 November 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan rencananya untuk menerapkan *deep learning*. Berbeda dari *deep learning* versi *machine learning* yang matematika-algoritmis, pembelajaran yang mendalam ini bersifat lebih psiko-pedagogis, proses pembelajaran untuk sampai pada pemahaman mendalam yang reflektif, kritis, dan kreatif.

Deep learning adalah “proses memperoleh enam kompetensi global: karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis, yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga dunia yang terlibat dan produktif” (Fullan, 2018).

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 1 Mei 2025.

Deep learning melibatkan keterampilan kognitif yang mendalam, berpikir kritis, analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah kreatif. Kemandirian belajar tumbuh karena mereka dibiasakan bertanya, mengeksplorasi, dan membangun makna (Hattie, 2012).

Pembelajaran itu bersifat kontekstual karena menjawab masalah-masalah setempat untuk menghasilkan perubahan positif bagi diri pemelajar dan masyarakat. Perubahan melibatkan pemikiran metakognitif: peserta didik dibantu memahami dan mengendalikan cara belajar agar selalu mengorganisasi kembali cara berpikir, bertindak, dan merasa (Hattie, 2012).

Suasana kelas dibuat interaktif dan menyenangkan. Maka dari itu, berbeda dari *deep learning* versi ilmu komputer, pembelajaran ini menggabungkan tiga komponen: *mindful learning*, *meaningful learning*, dan *joyful learning*.

Penuh Kesadaran, Bermakna, Menyenangkan

“Pembelajaran penuh kesadaran (*mindful learning*) mendorong keterbukaan terhadap hal-hal baru dan perbedaan, kepekaan terhadap konteks dan perspektif yang beragam” (Langer, 1997). Fokusnya proses, bukan hasil. Peserta didik mengeksplorasi konsep tanpa takut dinilai. Mereka sadar penuh dalam proses belajar.

Mindful learning bukan hanya soal menguasai materi, melainkan mengembangkan pikiran kritis, kreatif, dan karakter yang kuat (Fullan, 2018).

Pembelajaran ini melibatkan tiga aspek (Langer, 1997). Pertama, peserta didik merefleksikan, menganalisis, dan memahami apa yang dipelajari. Dalam pelajaran sejarah, mereka tidak hanya memahami Perang Dunia II secara kronologis, tetapi juga menganalisis dampak terhadap masyarakat dan membahas bagaimana demokrasi berkembang setelahnya.

Kedua, selalu sadar akan adanya perspektif berbeda, tak terpaku pada satu jawaban benar, tetapi mencari alternatif. Kolaborasi dan

empati penting. Peserta didik belajar untuk memecahkan masalah dalam konteks yang konkret.

Ketiga, "peka konteks" membantu mencipta dan membentuk kategori baru sehingga menghasilkan pemahaman baru. Dalam pelajaran sains, mereka tidak hanya belajar teori perubahan iklim, tetapi juga menganalisis data lingkungan dan menyusun solusi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim daerahnya.

Pemelajar bukan hanya pemecah masalah yang andal, melainkan juga peduli, reflektif, dan siap menghadapi tantangan.

Pembelajaran bermakna (*meaningful learning*) merupakan proses belajar yang menekankan relevansi dan dampak pada kehidupan peserta didik serta masyarakat. Dengan orientasi-tujuan, peserta didik memahami mengapa mereka belajar suatu materi dan bagaimana memanfaatkan untuk kehidupan mereka.

Di pelajaran matematika, mereka menerapkan konsep statistik untuk menganalisis tren konsumsi energi di sekolah lalu mengusulkan solusi hemat energi. Di pelajaran bahasa, mereka membuat cerita digital yang mengangkat isu kesetaraan gender untuk advokasi sosial. Jadi, teknologi berperan sebagai *technology-enhanced learning*, memperluas akses ke informasi dan membantu eksplorasi pembelajaran lebih mendalam (Kirkwood & Price, 2014).

Pembelajaran yang menyenangkan (*joyful learning*) terwujud ketika peserta didik merasa gembira dan tumbuh rasa ingin tahu (Caine & Caine, 1991). *Deep learning* memberikan kepuasan, kegembiraan, dan motivasi karena pencapaian atau dapat memecahkan masalah. Dalam pelajaran sains, mereka membuat roket air untuk belajar tentang tekanan dan gaya dorong.

Kreativitas tumbuh karena suasana kelas dirancang agar memberikan rasa nyaman dan dihargai sehingga mudah berkolaborasi dan menciptakan iklim kebebasan. Dalam kebebasan, "imajinasi mendahului kehendak" lalu kreativitas merekah (Ricoeur, 1986). Pembelajaran menyenangkan dapat dikemas dengan *role-play*, *game-based learning*, *storytelling*, atau melalui kemasan AI, pilihannya Edpuzzle, ClassDojo, Nearpod, atau Minecraft Education Edition.

Instrumen "Deep Learning"

Deep learning melibatkan pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik belajar melalui proyek-proyek yang terkait realitas yang bermakna secara pribadi (Larmer et al, 2015). Pembelajaran berbasis proyek efektif dengan empat model pemecahan masalah: logika abduksi, lima langkah memecahkan masalah, berpikir komputasional, dan *design thinking*.

Logika abduksi adalah penalaran untuk menemukan hipotesis pemecahan masalah yang terbaik dari serangkaian pengamatan atau fakta. Logika itu melibatkan proses pembuatan dan evaluasi hipotesis berdasarkan konsistensi penjelasan dari bukti (Douven, 2021).

Karena terbuka terhadap berbagai hipotesis, abduksi mendorong peserta didik kreatif. Mereka akan berani mengusulkan beragam gagasan dan penjelasan alternatif, berbeda dari logika induksi yang hanya mengarahkan ke satu kebenaran.

Dengan abduksi, peserta didik belajar menganalisis fakta, mengajukan hipotesis yang masuk akal, dan melatih kemampuan menyusun argumen. Karena abduksi tak selalu memberi jawaban pasti, pemelajar disiapkan menghadapi dunia nyata yang penuh ketidakpastian.

"Pembelajaran berbasis proyek efektif dengan empat model pemecahan masalah: logika abduksi, lima langkah memecahkan masalah, berpikir komputasional, dan design thinking."

Lima langkah memecahkan masalah meliputi: (1) merumuskan masalah secara spesifik; (2) mengamati data untuk seleksi informasi yang relevan; (3) mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah; (4) memberikan penalaran dan evaluasi atas pilihan pemecahan masalah dan konsekuensinya; (5) menerapkan, menguji dan menindaklanjuti pemecahan masalah (Moon, 2004; Dewey, 1933).

Mereka dilatih merumuskan masalah secara tajam, mengusulkan pemecahan kreatif, tetapi realistis, serta membiasakan bersikap reflektif.

Berpikir komputasional adalah metode pembelajaran untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil agar mudah diselesaikan dengan algoritma. Model ini membantu memberikan solusi kreatif serta menumbuhkan penalaran logis, pemecahan masalah sistematis, dan desain algoritma (Barr et al., 2011).

Ada lima komponennya (Barr et al. 2011): (1) dekomposisi: memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih sederhana; (2) mengenali pola: mengamati pola, tren, dan keteraturan data agar persoalannya terpetakan; (3) abstraksi: merumuskan masalah hanya fokus pada masalah utama dengan mengurangi informasi-informasi yang tidak diperlukan.

Kemudian; (4) mendesain algoritma atau petunjuk langkah-langkah memecahkan masalah (urutan tindakan ke solusi); (5) evaluasi: memastikan solusi tepat dengan menguji efisiensi dan efektivitasnya.

Berpikir komputasional mengasah cara berpikir sistematis dan terstruktur berkat latihan mengurai masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Dengan membuat algoritma, peserta didik dibantu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis.

Kegagalan itu berharga. Melalui proses interatif, kegagalan di zona aman dapat dibingkai ulang menjadi bagian proses penyempurnaan solusi. Lalu, daya tahan pemelajar meningkat ketika menghadapi masalah kompleks. Berpikir komputasional itu membentuk pola-pikir *problem-solver* sejati.

Design thinking adalah proses membuat rancangan tindakan untuk memperbaiki situasi dengan sintesis "peka konteks" dan empati. Penalaran ini membutuhkan pemikiran analitis dan kreatif. Prioritasnya, empati terhadap pemangku kepentingan. Pola pikir terbuka terhadap beragam gagasan. Masalah didefinisikan, diteliti, dan dianalisis (Pressman, 2019).

Lima langkah *design thinking* (Ambrose & Harris, 2010): (1) menumbuhkan empati dan mengumpulkan informasi; (2) menganalisis dan mendefinisikan masalah; (3) mencipta gagasan baru (*ideate*) untuk memberi solusi; (4) membuat sintesis dengan membuat prototipe untuk diimplementasikan; (5) evaluasi kritis untuk peningkatan produk atau solusi.

Design thinking melatih peserta didik menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dengan melihat masalah dari perspektif orang yang terdampak. Empati mendorong kreativitas karena pada tahap *ideate* dan prototipe, mereka harus berpikir di luar kebiasaan, dan dituntut berkomitmen mengupayakan berbagai alternatif.

Berkat kerja kelompok, pembelajaran ini meningkatkan keterampilan kolaborasi. Rasa percaya diri tumbuh karena mereka harus menguji sendiri pemecahannya sehingga merasa punya kendali dan kontribusi. Pembelajaran ini membangun *growth mindset* (Dweck, 2016): terus berusaha menerima umpan balik, dan tidak takut terhadap tantangan atau kegagalan.

Pola Pikir Guru Harus Berubah

Dalam *deep learning*, peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Maka dari itu, pola pikir guru harus berubah. Guru harus reflektif dan adaptif, terbuka terhadap perubahan dan selalu memperbaiki metode pembelajaran agar efektif. Teori harus diterapkan. Pemelajar memecahkan masalah nyata, bekerja sama dalam tim, dan menghasilkan produk atau solusi.

Pendidik menempatkan diri sebagai narasumber terbatas (Jukes & Schaaf, 2019): membantu menempatkan pengetahuan dalam konteksnya dengan melontarkan problematika untuk diolah, diseleksi, dikritisi atau ditolak. Pemelajar dapat mengusulkan materi alternatif.

Pendidik mengajak fokus pada penyelidikan sendiri, selalu bertanya, menguji, kritis, dan merelatifkan pendapat. Maka dari itu, guru harus memberikan informasi soal tujuan kegiatan, sarana, metode, tugas, keterlibatan, indikator pencapaian, dan evaluasi.

Proses belajar diprioritaskan daripada hasil akhir (nilai ujian) maka guru diajak membuat evaluasi formatif (Ornstein & Hunkins, 2013). Karena melibatkan pembuatan portofolio dan pendampingan refleksi diri pemelajar, evaluasi formatif menyita lebih banyak waktu daripada sumatif. Namun, penting demi pertumbuhan dan pemahaman peserta didik.

Guru memfasilitasi kerja kelompok dan pribadi untuk memastikan efisiensi dalam menggunakan waktu, fasilitas, teknologi, dan interaksi agar memenuhi tujuan penelitian. Guru mengajukan pertanyaan kritis, dan mendorong eksplorasi, bukan memberikan jawaban langsung (Jukes & Schaaf, 2019).

Bagi sekolah-sekolah yang sudah memberikan pelatihan keempat model pemecahan masalah itu kepada guru-guru, pendekatan *deep learning* tidak akan menimbulkan kesulitan. •

03

Mampukah Deep Learning Menyempurnakan Kurikulum Merdeka?*

Syamsul Kurniawan

Dosen, Pengamat Pendidikan, IAIN Pontianak

PADA suatu sore yang tenang, saya duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi hitam dengan sedikit gula, menikmati kesejukan udara yang berbaur dengan aroma kopi. Sembari menelusuri berita menggunakan telepon seluler, sebuah artikel menarik perhatian saya: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berbicara tentang pentingnya *deep learning* dalam pendidikan.

Banyak yang salah paham, mengira bahwa *deep learning* adalah kurikulum baru yang akan menggantikan Kurikulum Merdeka. Namun, saya berpikir, Mu'ti tak ingin menggantikan kurikulum itu.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 29 November 2024.

Justru, beliau ingin menyempurnakannya, menambahkan makna dan kedalaman di balik kebebasan belajar.

Kurikulum Merdeka, gagasan besar Nadiem Makarim, adalah tentang kebebasan belajar. Ia memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka tanpa terbebani oleh tuntutan kurikulum yang kaku.

Namun, kebebasan belajar tanpa arah boleh jadi berisiko. Jika siswa hanya diberi kebebasan tanpa panduan, mereka mungkin saja tersesat dalam lautan informasi tanpa benar-benar memahami makna di balik apa yang mereka pelajari. Di sinilah *deep learning* memainkan peran penting: sebagai landasan yang memperkuat arah dalam kebebasan tersebut.

Dalam kerangka *Atomic Habits* oleh James Clear (2018), saya melihat bahwa *deep learning* adalah bagian dari proses membangun kebiasaan belajar yang konsisten dan mendalam. Clear mengungkapkan bahwa perubahan besar dimulai dari akumulasi kebiasaan kecil yang bertahan lama.

Jika diterapkan dengan tepat, *deep learning* akan menciptakan kebiasaan belajar yang produktif dan reflektif pada siswa. Mereka tak sekadar menumpuk pengetahuan, tetapi juga belajar untuk menghayatinya dengan mendalam, membentuk identitas diri mereka sebagai pemelajar sejati.

Deep learning bukan tentang mempelajari lebih banyak hal, melainkan tentang mempelajari lebih dalam. Pendekatan ini membantu siswa untuk tidak sekadar menerima informasi, tetapi merenungkannya, mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya, dan melihat relevansinya dalam kehidupan mereka.

Dengan cara ini, setiap pelajaran yang mereka terima bukan sekadar informasi yang lewat, tetapi benar-benar menjadi bagian dari diri mereka. Mereka belajar untuk belajar, bukan hanya untuk lulus ujian, dan ini adalah esensi dari pendidikan yang sebenarnya.

Pada era Society 5.0, masyarakat kita tidak lagi hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas, tetapi juga yang bijak. Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Dengan *deep learning*, siswa diajak untuk tidak

hanya mengejar pengetahuan teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya.

Dalam kerangka Atomic Habits oleh James Clear (2018), saya melihat bahwa deep learning adalah bagian dari proses membangun kebiasaan belajar yang konsisten dan mendalam

Mereka belajar untuk mengolah informasi dengan sikap yang kritis dan reflektif, sikap yang memungkinkan mereka untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan sadar akan peran mereka dalam masyarakat.

Ketika kita melihat tantangan global yang terus berkembang, pendekatan *deep learning* ini menjadi lebih relevan. *Deep learning* memandu siswa untuk mengembangkan kebiasaan berpikir yang lebih dalam dan reflektif, membantu mereka menavigasi kompleksitas dunia modern.

Dengan *deep learning*, siswa bukan hanya belajar dari luar, melainkan benar-benar dari dalam. Mereka tidak sekadar “tahu”, tetapi juga “mengerti” mengapa dan bagaimana pengetahuan itu relevan dalam kehidupan mereka.

Tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi mereka juga belajar untuk memaknainya, menjadikannya bagian dari jati diri mereka. Itu adalah bentuk adaptasi yang sangat diperlukan dalam menghadapi era digital yang serbacepat.

Dalam *Atomic Habits*, Clear menjelaskan bahwa identitas seseorang terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Dalam pendidikan, kebiasaan berpikir kritis dan mendalam ini adalah fondasi yang akan membentuk siswa menjadi pelajar seumur hidup.

Dengan *deep learning*, siswa bukan hanya belajar dari luar, melainkan benar-benar dari dalam. Mereka tidak sekadar “tahu”, tetapi juga “mengerti” mengapa dan bagaimana pengetahuan itu relevan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan itu, ketika diterapkan

dengan konsisten, akan menciptakan generasi yang mampu berpikir mandiri, kreatif, dan adaptif.

Pendekatan *deep learning* juga menambah kedalaman pada Kurikulum Merdeka. Kebebasan yang ada dalam kurikulum ini memberi siswa keleluasaan untuk mengeksplorasi, tetapi kebebasan itu membutuhkan kedalaman untuk memberi arah yang lebih jelas.

Seperti yang dijelaskan Clear, kebebasan tanpa struktur hanya akan membuat kita mengulang-ulang tanpa hasil yang bermakna. *Deep learning* memberikan struktur tersebut sehingga kebebasan belajar tidak menjadi kebebasan yang sia-sia.

Kurikulum Merdeka dan *deep learning* bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Kurikulum Merdeka menawarkan sayap, sementara *deep learning* adalah angin yang membantu siswa terbang lebih tinggi, dengan pemahaman yang mendalam dan tujuan yang jelas. Siswa tidak hanya bebas belajar, tetapi juga memiliki arah yang kuat dan landasan yang kukuh dalam pemahaman mereka.

Lebih jauh, *deep learning* mendorong siswa untuk tidak hanya menyelesaikan pelajaran, tetapi untuk benar-benar menghayati proses belajar itu sendiri. Seperti yang Clear sampaikan, perubahan besar datang dari pembiasaan kecil yang dilakukan dengan tekun.

Dalam pendidikan, itu berarti memberi siswa kebiasaan berpikir reflektif dan kritis yang akan menjadi bagian dari identitas mereka. Dengan membangun identitas tersebut, mereka belajar untuk menghargai proses, bukan sekadar hasil akhir.

Deep learning juga menciptakan ruang bagi guru untuk menjadi lebih dari sekadar penyampai materi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai mentor yang membimbing siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam.

Guru membantu siswa merenung dan melihat relevansi dari setiap pelajaran yang mereka terima. Itu bukan tentang hafalan, melainkan tentang bagaimana setiap pelajaran dapat menjadi bagian dari kehidupan siswa.

Kita juga perlu memikirkan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung proses ini. Sekolah yang nyaman dan ruang kelas yang mendukung akan membantu siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dengan serius dan penuh pemahaman.

Pada era Society 5.0, pembelajaran tidak lagi hanya terjadi di kelas, tetapi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang kondusif adalah fondasi penting untuk membangun kebiasaan belajar mendalam.

Jika kita memandang *deep learning* sebagai fondasi pendidikan yang efektif, penerapannya akan menciptakan siswa yang memiliki kecintaan sejati terhadap ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya belajar demi nilai atau penghargaan, tetapi karena mereka menyadari bahwa pengetahuan adalah kekuatan yang memberi mereka kendali atas hidup mereka. Ini adalah perubahan kecil tetapi signifikan, yang selaras dengan filosofi *Atomic Habits* bahwa perubahan besar dapat dicapai melalui kebiasaan kecil yang konsisten.

Dalam jangka panjang, generasi yang dibentuk dengan pendekatan *deep learning* ini akan lebih siap menghadapi masa depan. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan yang terasah dari proses belajar yang mendalam dan reflektif. Mereka akan lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan karena mereka telah terbiasa berpikir dalam-dalam dan mempertimbangkan segala hal dengan bijaksana.

Deep learning juga memberikan makna lebih dalam pada pembelajaran berbasis teknologi dalam Kurikulum Merdeka. Dengan mengintegrasikan teknologi secara bijak, siswa dapat mengakses informasi yang luas, tetapi dengan pendekatan mendalam, mereka belajar untuk memaknai informasi itu dengan cara yang relevan dan bermakna. Ini adalah keterampilan yang sangat penting pada era digital, ketika akses informasi begitu mudah, tetapi pemahaman mendalam sering kali diabaikan.

Maka, *deep learning* bukan hanya metode belajar, tetapi suatu pendekatan untuk membentuk identitas. Seperti kata James

Clear, identitas kita terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Dalam pendidikan, identitas sebagai pelajar sejati akan terbentuk ketika siswa belajar dengan mendalam dan konsisten. Mereka tidak sekadar mencari jawaban, tetapi juga memahami proses mencari jawaban itu.

Pada akhirnya, *deep learning* dan Kurikulum Merdeka bukanlah dua hal yang perlu diperdebatkan, melainkan disinergikan. Dengan *deep learning*, Kurikulum Merdeka memiliki arah yang jelas, landasan yang kukuh, dan tujuan yang mendalam. Siswa tidak hanya bebas belajar, tetapi juga belajar dengan kesadaran penuh akan makna dan relevansi pengetahuan yang mereka peroleh.

Dengan sinergi ini, kita membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai proses dan pemahaman. *Deep learning* memberikan kebebasan yang bermakna, membantu siswa menjadi lebih bijak, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka.

Ini adalah pendidikan yang kita butuhkan: pendidikan yang bukan hanya menghasilkan lulusan, tetapi menciptakan manusia yang mampu berpikir, merasakan, dan memaknai dunia dengan lebih dalam.

Ini adalah kekuatan dari *deep learning*, yang memperdalam makna dari Kurikulum Merdeka. Keduanya beriringan, membentuk kebiasaan belajar yang produktif dan reflektif, menciptakan generasi yang memiliki pemahaman sejati akan dunia dan perannya di dalamnya. Dengan ini, kita tidak hanya mengubah pendidikan, tetapi juga membangun bangsa yang lebih bijaksana dan tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Deep learning dan Kurikulum Merdeka adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang dalam hal ini kebebasan belajar yang diberikan Kurikulum Merdeka dapat menjadi lebih berarti dengan adanya kedalaman pemahaman yang diberikan oleh *deep learning*. Siswa tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga terlatih untuk menginternalisasi dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan nyata mereka. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran bermakna, yang akan membentuk generasi

yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan.

Deep learning, yang menghadirkan kedalaman pada Kurikulum Merdeka, menawarkan kita pembelajaran yang bukan sekadar informasi yang lewat begitu saja, melainkan sebuah pengalaman yang membekas dan membentuk.

Dengan dukungan dari pendidik yang berperan sebagai mentor, dan lingkungan belajar yang kondusif, *deep learning* mampu menanamkan kebiasaan belajar yang konsisten dan mendalam. Kurikulum Merdeka dengan pendekatan *deep learning* ini pada akhirnya mengarahkan pendidikan kita menuju transformasi yang lebih esensial, yaitu pendidikan yang menghargai proses, pemahaman, dan pengembangan karakter.

Mengakhiri renungan ini, saya kembali menyeruput kopi yang hampir dingin, tetapi pahit-manisnya tetap terasa—seperti pendidikan yang kita harapkan: mendalam, penuh makna, dan bertahan di hati, tak lekang oleh waktu. Dalam setiap tegukan, saya teringat bahwa pembelajaran sejati, seperti kopi yang kita nikmati perlahan, adalah soal meresapi tiap lapis rasa dan memahami cita rasanya yang kompleks.

Demikian juga *deep learning*, yang menghadirkan kedalaman pada Kurikulum Merdeka, menawarkan kita pembelajaran yang bukan sekadar informasi yang lewat begitu saja, tetapi sebuah pengalaman yang membekas dan membentuk. Pendidikan sejati adalah proses yang harus dinikmati dengan reflektif, sebagaimana setiap tegukan kopi; ia membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia.

Melalui sinergi Kurikulum Merdeka dan *deep learning*, kita harap dapat menyeduh generasi yang bukan hanya cerdas, melainkan juga bijak, tangguh, dan siap menghadapi masa depan dengan kesadaran penuh akan makna di balik setiap ilmu yang mereka raih. •

04

Pembelajaran Mendalam Model Kiai Dahlan dan Abdul Mu'ti*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen;
Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya

PADA awal menjabat menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen), Abdul Mu'ti memopulerkan pendekatan *deep learning* dalam proses belajar mengajar. Dengan pertimbangan untuk menjaga kedaulatan berbahasa Indonesia dan berdasar atas masukan para ahli, istilah *deep learning* kemudian diganti dengan pembelajaran mendalam (PM).

Mendikdasmen menegaskan bahwa PM bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran. Penegasan itu penting untuk

*Artikel ini telah dipublikasikan di harian *DISWAY*, 12 April 2025.

meluruskan kesalahpahaman di kalangan pegiat, praktisi, dan penyelenggara pendidikan. Penjelasan Mendikdasmen sekaligus mengikis persepsi yang sering kali muncul: “Ganti menteri ganti kurikulum”.

Menurut Abdul Mu’ti, PM digunakan untuk mempertajam implementasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dua kurikulum itu tetap berlaku di satuan pendidikan seluruh Tanah Air.

Sebagai pendekatan pembelajaran, PM diharapkan mampu membentuk pelajar yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global. Mendikdasmen juga menegaskan bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, apalagi menghafal materi pelajaran. Lebih dari itu, melalui proses belajar dan mengajar, murid diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

“Menurut Abdul Mu’ti, PM digunakan untuk mempertajam implementasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dua kurikulum itu tetap berlaku di satuan pendidikan seluruh Tanah Air.”

Mendikdasmen tampak sangat meresapi ungkapan dalam bahasa Latin: *non scholae sed vitae discimus*. “Kita belajar bukan hanya untuk sekolah, melainkan untuk hidup.” Karena itulah, konsep PM lebih menekankan pada pembelajaran yang bermakna.

Murid dididik untuk berpikir analitis, kreatif, dan reflektif. Tugas para pendidik adalah menyiapkan murid agar mampu menjawab tantangan kehidupan. Pada konteks itulah pendidikan nasional membutuhkan guru-guru yang berdedikasi dan mendidik dengan sepenuh hati.

Inspirasi Kiai Dahlan

Selain mengkaji sejumlah referensi relevan tentang *deep learning*, sebagai aktivis Muhammadiyah, Abdul Mu'ti pasti sangat menjiwai pembelajaran keagamaan yang dipraktikkan KH Ahmad Dahlan. Pendiri dan ideolog Muhammadiyah tersebut begitu mendalam tatkala menelaah ayat-ayat Al-Qur'an.

Kiai Dahlan senantiasa membahas dan mengkaji Al-Qur'an, menelaah dengan teliti kandungan maknanya, serta mempertanyakan sebab-sebab diturunkan ayat (*asbab al-nuzul*) dan apa yang mesti dilakukan.

Kajian mendalam Kiai Dahlan merupakan realisasi terhadap perintah Allah Swt. agar manusia selalu melakukan tadabur (memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian) terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat Al-Qur'an.

Tatkala memahami Surat Ali 'Imran ayat 104, Kiai Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan organisasi atau persyarikatan yang rapi. Persyarikatan itu diharapkan mampu mengembangkan dakwah sekaligus mendirikan berbagai amal kemanusiaan.

Hal yang melegenda tentu saja kajian Kiai Dahlan terhadap Al-Qur'an surah Al-Ma'un. Surah ke-107 itu digunakan Kiai Dahlan untuk menggali sumber dana umat guna membangun basis teologi pengembangan amal sosial.

Warga Muhammadiyah senantiasa diingatkan peristiwa pengajian Kiai Dahlan yang selalu mengajarkan surah Al-Ma'un kepada santrinya selama tiga bulan. Kajian mendalam terhadap surah Al-Ma'un kemudian melahirkan banyak amal kemanusiaan bidang pendidikan, rumah sakit, dan pelayanan sosial.

Kiai Dahlan juga mengkaji surat Al-'Ashr bersama santrinya selama delapan bulan. Surah ke-103 itu memberikan pesan penting kepada umat mengenai pentingnya menghargai waktu (*respect to the time*).

Dari kajian pada surah itu lahir "teologi Al-'Ashr" yang menjadi dasar ajaran be rdisiplin, tepat waktu, dan sedikit berbicara banyak bekerja. Praktik ajaran itu begitu ditekankan Kiai Dahlan bersama para ideolog Muhammadiyah periode awal.

Melalui kajian mendalam pada Al-Qur'an, Kiai Dahlan berpesan kepada santrinya agar tidak mempelajari ayat lain sebelum benar-benar mempraktikkan ajarannya.

Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) mengomentari kajian keagamaan yang begitu mendalam model Kiai Dahlan itu sangat disayangkan jika lebih banyak dipuja-puji daripada dijadikan rujukan. Buya Syafii bahkan menyandingkan penafsiran Al-Qur'an model Kiai Dahlan dengan Fazlurrahman.

Fazlurrahman merupakan guru yang banyak menginspirasi pemikiran keislaman Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Buya Syafii. Hal itu terjadi tatkala tiga cendekiawan muslim tersebut belajar di Chicago University, Illinois, Amerika Serikat.

Menurut Buya Syafii, ada kesamaan model penafsiran Al-Qur'an antara Kiai Dahlan dan Fazlurrahman. Keduanya sama-sama berusaha melakukan kontekstualisasi pesan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Itulah model pembelajaran yang kemudian populer dikenal sebagai *contextual teaching and learning*. Pada intinya, pendekatan pembelajaran itu mengajak guru dan murid mengaitkan materi pelajaran dengan kondisi dunia yang benar-benar nyata adanya.

PM Model Abdul Mu'ti

Sejalan dengan pengkajian keagamaan model Kiai Dahlan yang begitu mendalam, Abdul Mu'ti mengenalkan PM untuk diimplementasikan di lembaga pendidikan. PM dirumuskan dengan tiga pilar: *mindful learning*, *meaningful learning*, dan *joyful learning*.

Pilar pertama, *mindful learning*, mengajarkan pentingnya membangun kesadaran bagi murid untuk terus-menerus belajar. Para pendidik penting mengasah pikiran murid agar pengetahuan dan wawasannya bertambah.

Dengan cara itu, rasa ingin tahu (*curiosity*) dan nalar kritis murid akan makin terasah. Kemampuan murid dalam menyelesaikan

masalah akan berkembang melalui pengalaman, eksperimen, atau praktik langsung.

Pilar kedua, *meaningful learning*, meniscayakan pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bermakna kepada murid. Tugas guru bukan sekadar menyampaikan materi pembelajaran secara tuntas.

Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang membuat murid antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar.

Pada bagian akhir pembelajaran, murid diharapkan mampu membuat refleksi: pengalaman atau inspirasi apa yang diperoleh setelah mempelajari materi? Lalu, apa tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mendapatkan pengalaman belajar tersebut?

Pilar ketiga, *joyful learning*, memastikan murid terlibat secara aktif baik fisik maupun pikirannya mengikuti pembelajaran. Untuk itu, para pendidik penting memperkaya metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kejiwaan murid.

Guru juga harus mampu membuat murid merasa senang dan nyaman belajar. Dengan demikian, aktivitas belajar begitu menyenangkan. Waktu belajar selama berjam-jam pun tidak terasa karena murid begitu menikmati.

Menurut Abdul Mu'ti, PM mengutamakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan mendalam pasti mendorong murid untuk berpikir kritis, menggali pengetahuan, dan pada akhirnya mampu menghubungkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata.

Pendekatan PM model Abdul Mu'ti merupakan ikhtiar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih bermakna dan relevan dengan tantangan abad ke-21.

Dengan menekankan pemahaman yang mendalam, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan murid berkembang menjadi individu yang lebih kritis, kreatif, dan adaptif.

Meski penerapannya membutuhkan energi lebih, terutama dari para pendidik, manfaat jangka panjang yang ditawarkan pendekatan itu sangatlah berharga bagi kemajuan pendidikan nasional.

Pendekatan PM yang digelorkan Abdul Mu'ti boleh jadi merupakan jawaban dari tantangan yang diajukan Buya Syafi'i. Sebagai bagian dari khazanah, kajian keagamaan yang mendalam model Kiai Dahlan seharusnya memang tidak boleh sekadar dikagumi.

Mendikdasmen tentu ingin lebih dari itu, yakni menjadikan pendekatan PM dalam sistem kurikulum pendidikan nasional. Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, pendekatan PM akan mulai diimplementasikan secara *piloting* untuk satuan pendidikan di penjurur negeri.

Semoga terobosan tersebut menjadi bagian ikhtiar mewujudkan generasi emas 2045.●

05

Deep Learning dan Strategi Pendidikan Berkualitas*

Dinia Husni Rahiem

Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DI TENGAH percepatan transformasi global dan kemajuan teknologi, pendidikan Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara emosional, adaptif dalam menghadapi perubahan, serta memiliki karakter yang kuat. Salah satu pendekatan yang kini menjadi sorotan dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah *deep learning* atau pembelajaran mendalam, yang berlandaskan tiga prinsip utama: *mindful* (berkesadaran), *meaningful* (bermakna), dan *joyful* (menggembirakan).

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Detik.com*, 15 Januari 2025.

Konsep itu mendapat perhatian khusus ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan pentingnya tiga prinsip tersebut sebagai fondasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Lebih dari sekadar slogan, *mindful*, *meaningful*, dan *joyful* adalah panduan strategis dalam merancang proses belajar yang lebih mendalam dan holistik.

Pendekatan itu tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman kognitif peserta didik, tetapi juga untuk mengaitkan pengetahuan dengan konteks nyata serta menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, pendidikan bukan lagi sekadar sarana transfer pengetahuan, melainkan menjadi ruang untuk membentuk kesadaran, karakter, dan keterampilan hidup yang lebih utuh dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Bukan Sekadar Metode

Secara mendasar, *deep learning* bukan sekadar metode pengajaran, melainkan sebuah paradigma pendidikan yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi kritis, serta penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Pendekatan itu mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga mengaitkan berbagai konsep, berpikir kritis, serta menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang reflektif dan inovatif.

Namun, *deep learning* seharusnya tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif semata. Pendidikan yang efektif harus mampu mengasah dimensi emosional, moral, estetika, dan spiritual siswa. Dalam konteks tersebut, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan panduan berharga: pendidikan harus seimbang antara olah pikir (kognitif), olah hati (emosional dan moral), olah rasa (estetika dan kepekaan seni), dan olahraga (kesehatan fisik).

Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan yang ideal tidak hanya mencetak generasi yang pandai dalam aspek kognitif, tetapi juga memiliki kepekaan hati, jiwa yang tenang, rasa estetis yang kuat, serta fisik yang sehat. Prinsip ini sangat sejalan dengan

filosofi *deep learning*, yang menekankan proses belajar tidak hanya sebagai upaya memahami teori dan fakta, tetapi juga sebagai sarana membentuk kesadaran penuh (*mindful*), membangun relevansi dalam setiap pembelajaran (*meaningful*), serta menciptakan suasana belajar yang menggembirakan (*joyful*).

“Dengan demikian, pendidikan bukan lagi sekadar sarana transfer pengetahuan, melainkan menjadi ruang untuk membentuk kesadaran, karakter, dan keterampilan hidup yang lebih utuh dan relevan dengan kebutuhan zaman.”

Sejarah pendidikan di Jepang pasca-Perang Dunia II juga memberikan gambaran menarik tentang pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pengembangan karakter. Setelah kekalahan dalam perang, sistem pendidikan Jepang mengalami reformasi besar di bawah pengawasan Sekutu (SCAP). Pendidikan moral yang sebelumnya sarat dengan propaganda diubah menjadi pendidikan yang menekankan prinsip demokrasi, kesetaraan, kerja sama, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan.

Kaisar Hirohito turut berperan dengan menegaskan pentingnya peran guru dalam membentuk kembali moral dan semangat masyarakat Jepang. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan sains dan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan empati ke dalam setiap aspek pembelajaran.

Sementara itu, Finlandia menjadi contoh sukses bagaimana sistem pendidikan modern dapat mengutamakan kesejahteraan siswa tanpa mengorbankan kualitas akademis. Sistem pendidikan di negara itu dikenal karena menekankan suasana belajar yang inklusif, bebas dari tekanan berlebih, dan berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Guru di Finlandia bukan sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator yang membantu siswa memahami relevansi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan gratis dan pemanfaatan

teknologi secara efektif memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

Baik filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengalaman Jepang, maupun praktik di Finlandia menunjukkan bahwa pendidikan yang berhasil bukan hanya tentang penguasaan pengetahuan, melainkan juga tentang membangun fondasi karakter, kesadaran moral, estetika, dan empati yang kukuh.

Mindful Learning: Kesadaran dalam Proses Belajar

Kesadaran penuh dalam proses belajar adalah inti dari *mindful learning*. Pendekatan ini mengajarkan siswa untuk hadir secara utuh dalam setiap tahapan belajar—memahami tujuan, merefleksikan kemajuan, dan merancang strategi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Siswa yang mampu meregulasi proses belajarnya cenderung lebih efektif dalam mengatasi hambatan dan meraih hasil optimal.

Di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendekatan itu dapat dimulai dengan mengajarkan anak mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Di tingkat Sekolah Dasar (SD), refleksi harian melalui jurnal belajar membantu siswa memahami keterhubungan antara pelajaran di kelas dan kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini bukan hanya tentang aspek akademis, melainkan juga tentang membangun fondasi kesejahteraan emosional dan spiritual yang kukuh sejak dini.

Meaningful Learning: Menghubungkan Pengetahuan dengan Realitas

Pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman nyata. Proses ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi antara teori dan

praktik sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya sekadar informasi yang dihafal, tetapi juga dipahami dan dapat diterapkan.

Di tingkat SD, konsep matematika dapat diajarkan melalui simulasi jual-beli di pasar mini sehingga siswa memahami bagaimana angka dan perhitungan bekerja dalam konteks nyata. Di sekolah menengah, pendekatan berbasis proyek atau *problem-based learning* dapat menjadi alat efektif untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dalam isu-isu seperti lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Joyful Learning: Kebahagiaan Sebagai Energi Belajar

Belajar dengan gembira tidak berarti sekadar bermain di kelas. *Joyful learning* adalah tentang menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi, dan menantang. Suasana yang penuh tekanan justru mematikan rasa ingin tahu dan semangat siswa, sedangkan suasana yang menggembirakan membuat mereka lebih terbuka untuk memahami materi dan mengeksplorasi ide.

Di tingkat PAUD, suasana belajar yang penuh eksplorasi dan kreativitas melalui lagu, tarian, dan permainan menjadi pendekatan yang efektif. Di tingkat SD, aktivitas bercerita dan kegiatan kelompok yang dinamis membantu siswa tetap fokus dan antusias. Di tingkat menengah, teknologi seperti *gamification* dan simulasi digital dapat digunakan untuk membuat materi yang kompleks lebih menarik dan mudah dipahami.

Strategi Inklusif dan Berkelanjutan

Pendidikan yang berlandaskan prinsip *mindful*, *meaningful*, dan *joyful* bukan sekadar konsep idealis, melainkan kebutuhan nyata untuk membangun masa depan bangsa. Prinsip olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dari Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi filosofis yang sejalan dengan konsep *deep learning*.

Dengan strategi yang inklusif, lingkungan belajar yang kondusif, dan dukungan teknologi yang efektif, pendidikan Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan generasi yang bukan hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian, serta keseimbangan dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Pendidikan bukan sekadar mencetak individu dengan skor tinggi, tetapi membentuk manusia seutuhnya yang siap menghadapi dunia dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kearifan. •

06

Pembelajaran Mendalam: Wawasan Pendidikan Membangun Generasi Tangguh Era Disrupsi*

Toni Toharudin

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung

DI BANYAK ruang kelas Indonesia, jutaan murid duduk rapi menghadap papan tulis, menghafal fakta dan angka yang diajarkan guru. Namun, pembelajaran sering berhenti pada tataran informasi. Murid mengetahui “apa,” tetapi belum memahami “mengapa” dan “bagaimana” mengaitkan ilmu itu dengan kehidupan nyata. Ketika

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Matan*, Edisi 230, September 2025.

ujian usai, nilai dicatat lalu pelajaran beralih ke bagian berikutnya. Hal itu sering tanpa refleksi.

Tantangan generasi mendatang tidak sederhana: disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, dan kebutuhan keterampilan lintas bidang. Ia menuntut kreativitas, adaptabilitas, dan kemampuan memecahkan masalah yang nyata. Di sinilah Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) hadir. Bukan sekadar metode, tetapi paradigma pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman, keterampilan, dan karakter.

Inti Pembelajaran Mendalam berpijak pada tiga transformasi: (1) perubahan *mindset* menuju *growth mindset*, (2) perubahan peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator, dan (3) perubahan cara murid belajar dari pasif menjadi aktif.

Mindset: Fondasi Pertama

Mindset adalah akar dari proses belajar. Pola pikir statis (*fixed mindset*), yakni keyakinan bahwa kemampuan bersifat tetap masih membatasi murid, guru, bahkan orang tua. Murid yang gagal mengerjakan soal matematika sering merasa “tidak berbakat”. Ironisnya, guru terkadang enggan mencoba metode baru karena takut gagal.

“Inti Pembelajaran Mendalam berpijak pada tiga transformasi: (1) perubahan mindset menuju growth mindset, (2) perubahan peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator, dan (3) perubahan cara murid belajar dari pasif menjadi aktif.”

Sebaliknya, *growth mindset* memandang kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, dan dukungan. Kesalahan dianggap bagian dari proses belajar. Murid yang kesulitan memahami pecahan dapat mencari pendekatan baru, seperti visualisasi

diagram. Di sisi lain, guru berani mengadopsi permainan interaktif untuk mengajarkan konsep abstrak.

Mengubah *mindset* memerlukan budaya baru di kelas. Berfokus pada proses, bukan hanya hasil. Umpan balik diarahkan pada langkah perbaikan, bukan sekadar pujian atau kritik. Lingkungan belajar aman, ketika murid bebas bertanya tanpa takut dihakimi. Budaya itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan ketangguhan murid.

Guru Sebagai Fasilitator: Merancang Pengalaman Belajar Bermakna

Guru adalah jantung perubahan. Dari pendekatan *teacher-centered* yang mengandalkan ceramah, mereka perlu beralih ke *student-centered learning* yang mendorong murid berpikir kritis dan kreatif.

Metode seperti *project-based learning* memberi ruang bagi murid mengaitkan materi pelajaran dengan konteks nyata. Dalam pelajaran sains, misalnya, guru tidak hanya menjelaskan siklus air, tetapi mengajak murid menganalisis masalah banjir lokal dan merancang solusi sederhana. Di kelas seni, murid dapat membuat mural tentang keberagaman budaya atau menggabungkan kreativitas dengan nilai toleransi.

Pembelajaran lintas disiplin memperkaya perspektif. Proyek ketahanan pangan dapat menggabungkan sains (pertanian berkelanjutan), matematika (analisis biaya), dan kewarganegaraan (advokasi komunitas). Dengan demikian, keterampilan akademis tumbuh seiring pembentukan karakter.

Murid Sebagai Pemelajar Aktif: Dari Menghafal ke Mencipta

Dalam pembelajaran mendalam, murid membangun pengetahuannya sendiri. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi memahami, mengaitkan, dan menerapkan secara kreatif. Siswa SMK jurusan kuliner, misalnya, tidak hanya menghafal resep, tetapi

memahami prinsip kimia fermentasi, merancang menu inovatif, dan menguji resep di dapur sekolah.

Refleksi diri menjadi bagian penting. Setelah proyek tentang limbah plastik, murid mengevaluasi kontribusinya, mengidentifikasi tantangan, dan merencanakan perbaikan. Lingkungan belajar yang memberi ruang untuk mencoba dan gagal menjadi kunci. Murid yang merasa aman untuk bereksperimen akan lebih termotivasi mencari solusi inovatif.

Sinergi Tiga Pilar: Dari Kelas ke Kehidupan Nyata

Ketiga transformasi tersebut saling menguatkan. *Growth mindset* membuat murid melihat tantangan sebagai peluang. Guru, sebagai fasilitator, merancang pengalaman yang relevan dan menantang. Murid, sebagai pelaku aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi.

Implementasi tidak lepas dari tantangan: pelatihan guru berbasis *coaching*, keterlibatan orang tua dalam komunitas belajar, kebijakan yang memberi fleksibilitas kurikulum, serta akses teknologi yang merata. Namun, hasil yang diharapkan sangat signifikan, murid yang siap menghadapi dunia nyata, mampu merancang solusi bagi persoalan kompleks, dan memiliki karakter tangguh.

Budaya Belajar Baru untuk Indonesia

Pembelajaran mendalam bukanlah perubahan kurikulum, melainkan perubahan budaya belajar. Ia menempatkan pemahaman mendalam di atas hafalan dangkal, dan menghargai proses sebagai bagian dari pencapaian.

Dengan *growth mindset* sebagai fondasi, guru sebagai pemandu inspiratif, dan murid sebagai pemelajar aktif, Indonesia dapat menumbuhkan generasi yang kreatif, adaptif, dan berempati. Mereka siap menjawab tantangan zaman dengan pengetahuan, keterampilan, dan hati nurani. •

07

Pembelajaran Mendalam: Implikasi untuk Guru dan Kepala Sekolah*

Suyanto

Dewan Pakar Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

DI RUANG-RUANG kelas sekolah pada satuan pendidikan di Republik ini, proses pembelajaran masih kerap berjalan dengan pendekatan lama dan konvensional. Guru menyampaikan materi, siswa mencatat lalu ujian menjadi ukuran pertama dan utama keberhasilan mereka. Sistem itu menekankan hafalan dan penguasaan konten yang dangkal. Hasilnya, anak-anak memang mampu mengulang dan menghafal informasi, tetapi sering kali gagal mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Mereka dapat

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 10 September 2025.

menjawab soal, tetapi tidak selalu mampu menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan persoalan sehari-sehari.

Kondisi itu menandakan adanya kelemahan mendasar dalam pendidikan kita. Padahal, tantangan zaman menuntut adanya generasi yang lebih dari sekadar cerdas akademik. Perubahan dunia abad ke-21 sering diringkas dalam akronim VUCA: *volatile, uncertain, complex, ambiguous* (Bennis & Nanus, 1985; US Army War College, 1987).

Realitas seperti itu tidak dapat dihadapi dengan modal hafalan semata. Anak-anak kita memerlukan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan karakter tangguh. Mereka perlu belajar membaca dunia sekaligus menulis ulang masa depan dengan akal budi dan nurani. Di sinilah pembelajaran mendalam (PM) menjadi relevan untuk dijadikan pendekatan baru dalam pembelajaran di sekolah-sekolah secara nasional.

Konsep itu menekankan tiga prinsip utama: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Untuk konteks Indonesia, tiga prinsip itu harus memiliki muara yang memuliakan. Pembelajaran mendalam menggeser orientasi pendidikan dari sekadar mengejar target kurikulum ke arah menumbuhkan manusia seutuhnya. Ia tidak lagi berhenti pada pertanyaan 'apa yang kamu tahu?', tapi mendorong refleksi lebih jauh: 'mengapa kamu perlu tahu?', 'apa makna pengetahuan ini untuk hidupmu?', dan 'bagaimana kamu akan menggunakannya bagi orang lain?'

Transformasi Guru

Guru berada di garda terdepan dalam menghidupkan pembelajaran mendalam. Implikasinya amat luas dan fundamental. Guru bukan lagi sekadar pengajar yang menyalurkan informasi, melainkan juga fasilitator perjalanan belajar yang menuntun murid menemukan makna dalam kehidupan nyata dari apa yang mereka pelajari di bangku sekolah. Guru ditantang untuk merancang kelas sebagai ruang hidup: tempat anak-anak tidak hanya mendengar,

tetapi mengalami, memahami, mengaplikasi, menghubungkan, mengolah, dan merefleksikan.

Anak-anak kita memerlukan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan karakter tangguh. Mereka perlu belajar membaca dunia sekaligus menulis ulang masa depan dengan akal budi dan nurani.

Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed* mengkritik model pendidikan yang ia sebut *banking education*, yakni guru ‘menabungkan’ atau ‘mendepositokan’ informasi di benak murid tanpa ruang bagi kesadaran kritis. Oleh karena itu, PM dihadirkan untuk mengubah hal itu dalam arah yang berkebalikan secara diametral. Murid tidak dipandang sebagai wadah kosong, tetapi sebagai subjek aktif yang mampu berpikir, merasa, dan bertindak.

Dalam kelas PM, guru menghidupkan kesadaran, menghadirkan makna, dan membangun kegembiraan belajar. Transformasi fungsi profesional guru juga terlihat dari cara mereka menilai. Penilaian tidak lagi dimaknai sebagai palu hakim yang memberi angka, tetapi sebagai jembatan pertumbuhan.

John Hattie (2009) melalui riset *Visible Learning* menegaskan bahwa umpan balik yang jelas, spesifik, dan tepat waktu ialah salah satu faktor paling berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar. Guru yang memberikan umpan balik semacam ini sedang mengajak murid untuk berani mencoba, gagal, belajar kembali, dan bangkit. Kelas pun berubah menjadi ruang aman untuk berproses, bukan ruang yang dipenuhi rasa ketakutan.

Lebih jauh, guru dalam PM juga dituntut menghormati keragaman murid. Setiap anak ialah pribadi unik. Guru tidak dapat lagi menyamaratakan semua murid dengan satu pola pengajaran. Pembelajaran mendalam mendorong diferensiasi: menyediakan jalur berbeda bagi tiap murid agar semua dapat mencapai potensi terbaiknya. Guru yang sabar menuntun dan tekun mendengar akan melahirkan disiplin yang tumbuh dari rasa memiliki,

bukan rasa takut. Itulah suasana kelas yang produktif sekaligus menggembirakan. Dengan alasan itu pulalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti telah membuat kebijakan semua guru harus menjadi wali murid di samping ada yang menjadi wali kelas.

Apa hebatnya PM dalam proses belajar siswa? Inilah beberapa contoh tematik praktik baik dalam PM yang dapat digambarkan secara generik: seorang guru IPA mengajak murid meneliti persoalan lingkungan, seorang guru bahasa memberi ruang bagi karya sastra untuk melatih empati, dan seorang guru matematika menantang murid menyelesaikan persoalan kehidupan nyata.

Semua itu tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Dengan cara itu, kelas dapat digunakan sebagai laboratorium kehidupan yang sesungguhnya.

Transformasi fungsi guru memang tidak mudah. Banyak guru masih merasa nyaman dengan cara lama, apalagi tekanan kurikulum sering membuat mereka memilih jalan aman. Namun, guru yang berani melangkah akan menemukan kembali makna profesinya. Ia bukan lagi sekadar pengajar yang sibuk mengejar target, melainkan pendamping kehidupan.

Murid tidak hanya diukur dari rapor, tetapi juga dari cara mereka memahami diri, berelasi dengan orang lain, dan mengambil peran dalam masyarakat. Dari sinilah lahir generasi yang bukan hanya pintar, tetapi juga peduli dan tangguh. Lebih jauh lagi, guru juga dituntut menjadi teladan moral. Murid belajar bukan hanya dari kata-kata, melainkan dari sikap, bahasa tubuh, dan tindakan nyata. Guru yang berintegritas, disiplin, dan penuh kepedulian akan meninggalkan jejak panjang dan kuat pada muridnya.

Dalam konteks PM, teladan moral ini menjadi inti: guru yang mempraktikkan nilai berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sedang menyalakan obor yang akan diteruskan murid-muridnya sepanjang hidup. UNESCO melalui *Delors Report* (1996) menegaskan pentingnya *lifelong learning* atau belajar sepanjang

hayat sebagai kerangka pendidikan global karena proses belajar tidak boleh berhenti di sekolah, tetapi harus berlangsung sepanjang hayat.

Dalam konteks inilah transformasi guru menemukan urgensinya: guru yang mau belajar dari murid, dari kolega, bahkan dari kesalahan sendiri, sedang memberi teladan bahwa belajar ialah proses sepanjang hayat. Dengan sikap rendah hati ini, murid tidak hanya melihat sosok guru sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemelajar autentik.

Dari sinilah lahir hubungan yang lebih egaliter antara guru dan murid yang keduanya sama-sama bertumbuh dalam semangat ingin tahu, keberanian mencoba, dan kerelaan memperbaiki diri. Pembelajaran mendalam hanya akan hidup apabila guru terlebih dahulu menjalaninya sebagai pemelajar sepanjang hayat.

Kepemimpinan Sekolah

Selain guru, kepala sekolah ialah kunci penting lain dalam menghidupkan pembelajaran mendalam. Namun, kepemimpinan yang dibutuhkan bukan kepemimpinan administratif yang sibuk dengan laporan, melainkan kepemimpinan transformasional yang menyalakan semangat perubahan atas dasar tata nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat dan komunitas sekolah.

Kepala sekolah visioner menghadirkan sekolah sebagai rumah belajar, bukan kantor birokrasi dan administrasi belaka. Ia menyalakan percakapan filosofis dan pedagogis, menumbuhkan budaya kolaboratif, serta melindungi guru dari tekanan administratif yang mematikan kreativitas.

Michael Fullan dan Maria Langworthy (2014) menegaskan bahwa transformasi pembelajaran hanya dapat lahir jika kepala sekolah berani berpihak pada pembelajaran yang memerdekakan. Kepala sekolah transformasional memberi ruang bagi guru untuk bereksperimen, memfasilitasi komunitas belajar profesional, dan mendorong inovasi lintas mata pelajaran. Ia hadir di kelas bukan

untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengamati dan menemukan percakapan hidup antara guru dan murid.

Dari langkah kecil itu, sekolah akan berubah menjadi ekosistem yang penuh energi belajar. Kepala sekolah juga berperan sebagai pengorkestra harmoni kurikuler sekolah. Ia menata ritme kerja guru agar tidak terkuras birokrasi, ia membuka pintu bagi orang tua sebagai mitra, dan ia menjadikan kegiatan rapat sebagai forum refleksi, bukan sekadar laporan administratif.

Dengan cara itu, seluruh warga sekolah merasa menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang bermakna melalui pembelajaran mendalam. Kepemimpinan semacam itu menjadikan sekolah sebagai komunitas belajar yang hangat dan penuh energi. Kepemimpinan semacam itu juga perlu dan harus ditularkan sehingga benar-benar menular.

Guru yang melihat kepala sekolahnya berani melindungi waktu refleksi akan terdorong untuk mencoba metode baru. Guru yang merasa dihargai akan lebih bersemangat menumbuhkan motivasi intrinsik muridnya. Murid yang merasakan energi positif dari guru dan kepala sekolah akan tumbuh lebih percaya diri. Orang tua pun melihat sekolah sebagai mitra, bukan sekadar penyedia jasa pendidikan dan institusi pungutan biaya tambahan sekolah.

World Bank (2019) mengingatkan tentang ancaman munculnya *learning poverty*, yaitu anak-anak yang gagal menguasai literasi dasar pada usia yang semestinya. Kepala sekolah transformasional akan menjadikan peringatan ini sebagai dorongan untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ia menolak pola mekanistik yang miskin makna, dan sebaliknya menegaskan visi bahwa sekolah ialah taman hidup peserta didik dan guru.

Kepemimpinan transformasional tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal teladan. Kepala sekolah menjadi 'penjaga api' yang memastikan setiap guru tetap bersemangat meski jalan perubahan penuh tantangan. Ia tahu bahwa satu keputusan kecil--misalnya memberi waktu khusus untuk guru berdiskusi--dapat berdampak besar dalam menumbuhkan budaya reflektif. Ia memahami bahwa

menguatkan moral dan integritas lebih penting daripada sekadar menyelesaikan laporan kurikuler dan finansial.

Kepemimpinan semacam itu memang sulit, tetapi menginspirasi: guru yang merasakannya akan terdorong untuk melakukan hal yang sama di kelas. Lebih dalam lagi, kepala sekolah transformasional ialah jembatan antara visi besar pendidikan nasional dengan praktik lokal di sekolah. Ia mampu menerjemahkan kebijakan menjadi langkah nyata yang dirasakan guru, murid, dan orang tua. Ia membangun jejaring dengan komunitas, dunia usaha, dan organisasi sosial agar sekolah tidak terisolasi. Dengan cara itu, sekolah hadir sebagai pusat peradaban kecil yang menyalakan harapan bagi lingkungannya. Kepala sekolah demikian bukan hanya manajer, melainkan pemimpin yang menggerakkan hati nurani dan pikiran.

Pada akhirnya, pembelajaran mendalam bukan sekadar strategi pedagogis, melainkan panggilan etis. Guru dipanggil untuk hadir sepenuh hati, kepala sekolah dipanggil untuk memimpin dengan integritas. Dari ruang kelas yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan lahir generasi yang kritis dan peduli.

Dari kepemimpinan sekolah yang transformasional lahir ekosistem pendidikan yang hidup dan penuh harapan. Dari sinilah, masa depan pendidikan Indonesia menemukan pijakannya: bukan pada angka ujian semata, melainkan pada manusia yang utuh dan berkarakter. Semoga!•

08

Belajar Mendalam dengan “Otak Busuk”*

Heribertus Jani

Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) Universitas Prasetiya Mulya

TAK lama setelah pengeboman menara kembar World Trade Center atau yang dikenal sebagai Peristiwa 11 September 2001, Alfie Kohn, seorang penulis sekaligus pemikir pendidikan Amerika Serikat yang terkenal dengan gagasan-gagasannya yang progresif, menulis sebuah artikel pendek berjudul “September 11”.

Artikel tersebut hanya ditayangkan di situs web pribadinya sebab sudah ditolak di mana-mana lantaran isinya yang sangat keras mengkritik Pemerintah AS. Adalah jurnal pendidikan urban bernama *Rethinking School* yang kemudian menerbitkan artikel tersebut pada tahun berikutnya dengan judul “Teaching about Sept. 11”.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 7 Januari 2025.

Salah satu poin di antara sejumlah kritikan pedas Kohn kepada Pemerintah AS dalam artikel tersebut adalah bahwa kejadian yang menewaskan ribuan warga negara AS tersebut menyingkap kegagalan pendidikan AS. Menurut dia, kalau saja pendidikan sudah berhasil membentuk warga negara untuk dapat berpikir secara mandiri, tentu korbannya tak akan sebanyak itu.

Kohn menuding, banyak orang menjadi korban hanya karena terlalu patuh pada pengumuman yang disampaikan berulang-ulang pihak pengelola gedung untuk tetap diam di tempat saat gedung mulai terbakar. Padahal, mereka dapat saja memilih untuk lari menyelamatkan diri.

“Here we find a fresh reason to ask whether we are teaching students to think for themselves or simply to do what they’re told,” tulisnya. Meski terkesan tak berempati kepada para korban, baginya itulah bukti bahwa pendidikan hanya mencetak manusia robot yang bergerak sejauh ada instruksi.

Pada tahun 2015, tulisan Kohn tersebut menjadi ilustrasi yang sangat menonjol tatkala profesor dari Universitas Algoma Kanada, Julian Hermida, membahas tentang pembelajaran mendalam dalam bukunya yang berjudul *Facilitating Deep Learning*.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melontarkan gagasan mengenai *deep learning* atau pembelajaran mendalam sebagai suatu pendekatan belajar yang rencananya akan diterapkan di Indonesia. *Deep learning* diproyeksi sebagai pendekatan pembelajaran yang sasaran akhirnya adalah membentuk peserta didik yang sanggup memecahkan masalah-masalah konkret kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar jago memecahkan soal-soal ujian di atas kertas.

Deep learning memungkinkan peserta didik menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari untuk menghadapi berbagai situasi dan konteks baru (Hermida, 2015). Adagium klasik *non scholae sed vitae discimus* (kita belajar bukan untuk sekolah [nilai ujian], tetapi untuk hidup) menemukan relevansinya di sini.

Menarik bahwa di tengah wacana pemberlakuan *deep learning* mencuat istilah *brain rot* yang dinobatkan sebagai Kata

Terpilih Tahun 2024 menurut Penerbit Universitas Oxford (OUP), Inggris. Frasa yang bermakna 'pembusukan otak' itu didefinisikan sebagai kemerosotan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat konsumsi berlebihan konten daring yang remeh dan tidak menantang (Kompas, 14/12/2024).

Fenomena *brain rot* tentu relevan dengan konteks Indonesia. Data terakhir yang dirilis DataReportal, sebuah pusat data global berbasis web, pada Januari 2024 jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 139 juta pengguna aktif atau setara dengan 49,9 persen, hampir separuh dari total jumlah penduduk.

Ada potensi pembusukan otak yang terjadi secara masif mengingat media sosial kita penuh dengan konten-konten hiburan receh yang sukses membuat orang kecanduan menonton, tetapi sama sekali tidak memacu mereka untuk bernalar.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2024), 48,2 persen responden mengaku menghabiskan lebih dari dua jam sehari untuk bermedia sosial; dan mayoritas yang berselancar di dunia maya ini adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012), yakni sebanyak 34,40 persen. Artinya, putra-putri harapan bangsa yang kini duduk di bangku pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi kini banyak yang menghabiskan waktunya di media sosial.

Kita tidak sedang mengatakan bahwa media sosial itu pasti selalu buruk. Namun, perlu disadari bahwa ada potensi pembusukan otak yang terjadi secara masif mengingat media sosial kita penuh dengan konten-konten hiburan receh yang sukses membuat orang kecanduan menonton, tetapi sama sekali tidak memacu mereka untuk bernalar.

“Ada potensi pembusukan otak yang terjadi secara masif mengingat media sosial kita penuh dengan konten-konten hiburan receh yang sukses membuat orang kecanduan menonton, tetapi sama sekali tidak memacu mereka untuk bernalar.”

Selain itu, masalah gangguan mental jelas tak terhindarkan baik karena kurangnya interaksi langsung dengan lingkungan sosial, kelimbungan karena terlalu banyak menelan informasi, maupun karena efek langsung dari pesan yang ditangkap dari konten.

Itulah sebabnya mengapa Australia, misalnya, pada November 2024 mengesahkan peraturan larangan terhadap anak-anak di bawah 16 tahun untuk bermedia sosial. Larangan serupa juga sudah diterapkan satu tahun sebelumnya di negara bagian Utah, AS, meski agak longgar karena masih diperbolehkan sejauh ada persetujuan orang tua.

Tantangan dan Peluang

Brain rot menjadi tantangan serius karena jangankan langkah restriktif seperti ditempuh Australia atau Utah, sistem kontrol minimum untuk mengatur jenis konten yang dapat diakses anak-anak usia sekolah saja belum kita punya. Filter yang dipakai sejauh ini hanya berkuat pada urusan pornografi dan pornoaksi. Sementara itu, apakah sebuah konten itu edukatif dalam arti menambah wawasan dan merangsang nalar atau tidak, belum banyak tersentuh karena dianggap terlalu kompleks.

Ada kebingungan, misalnya bagaimana mengategorikan sebuah konten itu edukatif atau tidak, bagaimana sistem kontrol dilakukan, atau siapa yang pantas melakukannya. Belum lagi sistem kontrol tersebut bertabrakan dengan tuntutan mengenai kebebasan berekspresi di media sosial, dan seterusnya.

Brain rot dengan demikian terjadi karena kendali sepenuhnya ada pada mekanisme operasi media sosial. Pada titik inilah *deep learning* menjadi peluang yang berpotensi membalikkan keadaan dengan mengandalkan beberapa kekuatan berikut.

Pertama, merujuk pada ilustrasi yang diangkat di awal tulisan ini, *deep learning* dapat membentuk peserta didik yang mampu berpikir secara mandiri. Hanya orang yang mampu berpikir mandiri yang dapat mengambil kendali atas apa yang benar-

benar bermanfaat untuk dirinya, termasuk memilah dengan kritis berbagai pilihan yang muncul di media sosial.

Kedua, *deep learning* pula yang memungkinkan lahirnya konten-konten berkualitas. Artinya, ketika *deep learning* itu sudah membudaya dalam pembelajaran, dalam jangka panjang standar tontonan masyarakat juga akan beralih ke konten-konten berkualitas.

Dengan begitu, para kreator konten pun menyesuaikan kualitas kontennya karena konten-konten yang semata-mata berisi hiburan receh tak lagi punya pasar penonton. Menjadi lebih lengkap lagi ketika para kreator konten itu adalah produk dari *deep learning* itu sendiri, mereka tentu akan selalu mengutamakan kedalaman substansi daripada sekadar polesan kulit luar yang superfisial.

Ketiga, tujuan *deep learning* memang menumbuhkan kompetensi setiap individu untuk menghadapi masalah aktual secara tepat dan bijak berbasis pada ilmu-ilmu yang dipelajari, termasuk menghadapi bahaya *brain rot*. Namun, tetap perlu ada intervensi lain sebagai alternatif pelarangan media sosial seperti yang terjadi di negara lain.

Intervensi itu adalah adanya mata pelajaran khusus di sekolah mengenai bagaimana berhadapan dengan media sosial. Materinya dapat terbentang dari sejarah media sosial, etika bermedia sosial, peraturan bermedia sosial di berbagai negara, manfaat bermedia sosial, bahaya atau efek negatif bermedia sosial, dan seterusnya. Harapannya, peserta didik yang memegang kendali atas media sosial dan bukan sebaliknya. •

09

Pembelajaran Mendalam dan Revolusi Belajar*

Arif Jamali Muis

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

DUNIA pendidikan nasional saat ini tengah berdiri di persimpangan krusial. Di tengah arus perubahan sosial akibat penetrasi digital, pendidikan tak boleh sekadar bertahan, lebih dari itu harus bertransformasi. Tanpa langkah yang cermat dan akurat, pendidikan dapat kehilangan asas dan tujuannya. Inilah landasan sosiologis perlunya pembelajaran mendalam (*deep learning*) sebagai bagian dari ijtihad merevolusi pembelajaran di Indonesia.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Pundi.or.id*, 18 Februari 2025.

Pembelajaran Mendalam

Marton dan Saljo (1970) mengategorikan level belajar siswa pada dua tingkatan, yaitu *surface process* dan *deep process*. Pada level *surface process*, proses belajar siswa hanyalah terbatas pada teks dan hafalan belaka. Sementara itu, pada level *deep process*, siswa belajar untuk memaknai materi secara mendalam, belajar untuk mengerti. *Deep process* melibatkan pemahaman lebih komprehensif, di mana siswa tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi juga kemampuan untuk menginterpretasikan makna, mengidentifikasi hubungan antarkonsep serta menganalisis keterkaitan antarvariabel yang dipelajari.

Pendekatan pembelajaran mendalam kemudian terus mengalami perkembangan. Pada dekade 1980-an, pembelajaran mendalam berkembang seiring dengan teori pembelajaran yang lain, utamanya teori pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning theory*). Basis teori ini berpendapat bahwa pembelajaran mendalam terjadi melalui pengalaman konkret, proses refleksi, konseptualisasi dan pengujian aktif (Kolb, 1984).

Pada dekade 1990-an berkembang teori belajar *transformative learning*, Jack Mezirow (1991) adalah pihak yang memperkenalkan konsep itu. Sebangun dengan semangat pembelajaran mendalam, konsep tersebut menekankan keterlibatan siswa bukan hanya pada usaha memahami materi, melainkan lebih dari itu juga mengubah pandangan dan persepsi mereka.

Pada awal dekade 2000-an, paradigma pembelajaran mengalami perkembangan, sebuah masa ketika pembelajaran diarahkan pada siswa sebagai pusat pembelajaran. Mereka didorong untuk memiliki kemampuan mengatur, merencanakan dan mengontrol proses belajar mereka secara mandiri. Siswa dipandang sebagai sosok otonom yang mampu untuk mengatur strategi belajar mereka. Melalui metode itu, siswa dipandang mampu belajar lebih mendalam.

Memasuki dekade 2010-an hingga sekarang, konsep pembelajaran mendalam mulai diintegrasikan dengan teknologi pendidikan. Pada masa ini, konsep *connectivisme* yang diperkenal-

kan oleh pakar pendidikan dari Universitas Manitoba George Siemens mulai berkembang. Teori itu menunjukkan bagaimana pengetahuan dibangun melalui jaringan informasi di internet sehingga hal itu memungkinkan pembelajaran mendalam dilaksanakan di dalam lingkungan digital yang serbadinamis.

“Pada dekade 1980-an, pembelajaran mendalam berkembang seiring dengan teori pembelajaran yang lain, utamanya teori pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning theory).

Basis teori ini berpendapat bahwa pembelajaran mendalam terjadi melalui pengalaman konkret, proses refleksi, konseptualisasi dan pengujian aktif (Kolb, 1984).”

Demikian itulah histori pembentukan Teori Pembelajaran Mendalam sebagai pendekatan baru dalam praktik pembelajaran. Fullan dan Langworthy (2014) memaknai pembelajaran sebagai pendekatan yang berupaya memanfaatkan kekuatan mitra baru guna melibatkan para siswa dalam mempraktikkan proses pembelajaran melalui proses menemukan dan menguasai pengetahuan untuk kemudian menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru di dunia.

Menurut Suwandi (2023) pendekatan itu berupaya mentransformasikan paradigma pendidikan tradisional yang cenderung terjebak pada penghafalan dan pengulangan informasi, menjadi proses pembelajaran yang lebih konstruktif dan reflektif. Perubahan itu memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami konten pembelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan penekanan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menggembirakan (*joyful*) melalui proses olah pikir (intelektual), olah hati (etika), olah rasa (estetika), dan olahraga (kinestetik) secara holistik dan terpadu.

Pembelajaran Mendalam di Indonesia

Pembelajaran mendalam belakangan menjadi buah perbincangan para akademisi setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan gagasan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan baru dalam pembelajaran di Indonesia. Gagasan ini diproyeksikan oleh Abdul Mu'ti sebagai pendekatan pembelajaran yang menysasar pembentukan peserta didik yang sanggup memecahkan masalah-masalah konkret kehidupan sehari-hari, bukan sekadar penyelesaian soal-soal tekstual di atas kertas belaka.

Dalam konteks Indonesia, konsep pembelajaran mendalam diproyeksikan sebagai respons berbagai faktor multidimensional yang saling memengaruhi. Pertama, pembelajaran mendalam adalah strategi pendidikan nasional untuk menghadapi ketidakpastian masa depan yang serbadinamis dan sulit untuk diprediksi. Persis dengan penjabaran Wareen Bennis dan Burts Nanus (1987), dunia sedang berada dalam sebuah masa yang perubahan serbacepat, volatilitas (*volatility*), penuh ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), serta penuh ambiguitas (*ambiguity*).

Pendidikan nasional perlu merespons tantangan tersebut dengan kesanggupan melakukan adaptabilitas pada kurikulum, mempersiapkan tenaga pendidikan, dan memastikan proses pendidikan yang mendalam bagi para siswa. Konsep pembelajaran mendalam memungkinkan para siswa tidak hanya menghafal tumpukan informasi, tetapi juga mampu menghubungkan beragam konsep dan mengamalkan pengetahuan dalam situasi yang serbacepat.

Kedua, pembelajaran mendalam adalah respons atas bonus demografi Indonesia tahun 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Serupa jamak dipahami, bonus demografi di Indonesia—yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif telah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan nasional dalam upaya mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Jika tidak segera berbenah, bonus demografi tersebut dapat memperlebar kesenjangan keterampilan, meningkatkan angka pengangguran terdidik serta menurunkan daya saing nasional Indonesia. Dalam kerangka masalah tersebut, pembelajaran mendalam diharapkan sebagai solusi ketika siswa tidak hanya memahami pengetahuan secara permukaan dan melalui hafalan, melainkan juga dapat berpikir mandiri, kritis, dan kreatif.

Ketiga, pembelajaran mendalam adalah strategi Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, utamanya untuk menyelesaikan problem Literasi, Numerasi, HOTS, Ketimpangan Mutu Pendidikan. Seperti dipahami, jika merujuk pada indeks pendidikan dalam dunia internasional, posisi pendidikan Indonesia tampak belum memberikan kabar menggembirakan. Jika dibandingkan negara-negara lain, Indonesia membutuhkan strategi yang lebih cermat agar mampu bersaing di level internasional.

Keempat, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang digunakan guna mempersiapkan generasi masa depan yang memiliki kualitas dan kompetensi yang mumpuni. Pada masa depan, dunia membutuhkan SDM yang memiliki kreativitas, kemampuan kolaborasi, dan penguasaan terhadap teknologi. Mereka yang tidak memiliki kompetensi relevan akan tersisih dari perubahan yang serbacepat. Hal itu sebangun dengan semangat yang dicanangkan oleh pendekatan pembelajaran mendalam yang diharapkan dapat memperkuat *metacognitive skills*, kemampuan para siswa untuk dapat melihat diri sendiri, menjadi subjek otonom yang mengatur dan mengorganisasi proses berpikir secara mandiri.

Pembelajaran Mendalam dan Agenda Revolusi Belajar

Di tengah harapan besar publik terhadap pendidikan nasional, pendekatan pembelajaran mendalam adalah solusi strategis, seirama dengan kehendak melakukan revolusi belajar. Dalam kerangka pendidikan keindonesiaan, pendekatan pembelajaran

mendalam akan menjadi revolusi baru dalam sistem pendidikan nasional. Hal itu tentu didorong oleh kehendak bersama untuk meninggalkan budaya pendidikan tradisional yang masih berorientasi pada teks dan hafalan.

Sebagai revolusi belajar, penerapan pembelajaran mendalam bukan hanya membutuhkan kebijakan dan inovasi kurikulum dari pemerintah, melainkan juga membutuhkan kemampuan praktik pedagogis yang mumpuni, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan lingkungan pembelajaran yang baik serta kesanggupan untuk membangun sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. •

10

Menunggu Dampak Deep Learning*

Hendarman

Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen
Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor

PENDIDIKAN Nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Hal itu dilakukan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan agar berkembangnya potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Selain itu, agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Republika*, 25 Maret 2025.

Namun, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini masih belum cukup untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, kementerian yang mengurus pendidikan dasar dan menengah telah menetapkan pentingnya pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam (PM). Berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini masih belum cukup untuk meningkatkan akses dan kalitas pendidikan dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Menteri yang mengurus pendidikan dasar dan menengah mengeklaim bahwa pemikiran dan arah kebijakan terkait konsep PM ini telah mendapat respons luas yang positif dari masyarakat dan akademisi. Menteri juga menegaskan bahwa untuk konteks Indonesia, PM bukan kurikulum melainkan suatu pendekatan pembelajaran. Diakui bahwa sesungguhnya PM bukan pendekatan baru dalam sistem pendidikan Indonesia.

Sejak tahun 1970-an telah dikenalkan beberapa pendekatan pembelajaran. Pendekatan tersebut, antara lain, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM), Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM), Contextual Teaching and Learning (CTL). Namun, sekali lagi bahwa pendekatan-pendekatan tersebut masih menghadapi kendala dalam tataran konsep maupun implementasi.

Yang menarik, PM bukan sekadar menghafal atau mengerjakan soal-soal ujian, tetapi agar siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh, mengaitkan dengan disiplin ilmu, dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Implementasinya akan menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan menyenangkan, yaitu mengajak siswa lebih aktif mengeksplorasi konsep dan menghubungkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu kognitif hingga penerapannya dalam dunia nyata.

Juga PM mendorong agar belajar mampu memuliakan manusia dengan segala perbedaan kemampuan dan keahliannya.

Dengan kata lain, PM berhubungan dengan teori kognitif, yang menunjukkan bahwa proses belajar melibatkan perhatian (attention), pengolahan informasi yang mendalam (deep level processing), dan memori.

Informasi yang dipelajari akan lebih mudah diingat jika diproses dengan cara yang lebih mendalam dan terkait dengan pengalaman sebelumnya. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam psikologi kognitif yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Sejak tahun 1970-an telah dikenalkan beberapa pendekatan pembelajaran. Pendekatan tersebut, antara lain, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM), Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM), Contextual Teaching and Learning (CTL). Namun, sekali lagi bahwa pendekatan-pendekatan tersebut masih menghadapi kendala dalam tataran konsep maupun implementasi.”

Dengan *deep learning*, para guru dimungkinkan lebih terlibat memantau dan mengarahkan proses pembelajaran siswa dengan lebih efektif. Dengan PM, para guru dimungkinkan lebih terlibat memantau dan mengarahkan proses pembelajaran siswa dengan lebih efektif.

Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak siswa untuk memahami makna dan relevansi materi yang diajarkan. Ini akan menuntut pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, dan yang terpenting, penuh makna bagi siswa.

Menunggu Dampak

Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan *deep learning*, maka pendidikan di Indonesia dapat semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu melahirkan

generasi yang memiliki daya pikir kritis serta kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik.

Untuk memastikan terwujudnya harapan tersebut, perlu diantisipasi beberapa hal.

Pertama, sejauh mana penerapan PM pada setiap jenjang pendidikan didukung oleh ekosistem pembelajaran yang kondusif, kemitraan pembelajaran yang luas dan bermakna, dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif.

Ini semua akan menjadi prasyarat agar terwujud belajar penuh kesadaran dan perhatian, bermakna dan relevan, serta belajar dengan gembira, antusias, dan semangat.

Kedua, perlu dipastikan bahwa PM memang benar dapat mengubah kondisi pembelajaran yang selama ini belum maksimal yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih cenderung stagnan. Salah satunya ditunjukkan oleh munculnya fenomena bersekolah, tetapi tidak belajar.

Untuk itu berbagai pemangku kepentingan harus mempertimbangkan prinsip PM yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menggembirakan (*joyful*).

Juga prinsip memuliakan guru, siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan lain serta memberikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Ketiga, tantangan yang cukup besar adalah sejauh mana efisiensi anggaran memengaruhi percepatan dan pencapaian PM pada satuan pendidikan, terutama untuk memastikan bahwa para guru memahami PM ini secara utuh.

Secara utuh dimaknai bahwa guru tidak hanya mengetahui apa dan mengapa PM, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dapat menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari dan tidak menimbulkan tambahan beban administratif bagi para guru itu sendiri. •

11

Membumikan Pembelajaran Mendalam*

Syamsir Alam

Dewan Pengawas Yayasan Sukma

MESKIPUN wacana tentang pembelajaran mendalam (*deep learning*) kian ramai diperbincangkan di kalangan akademisi dan media pendidikan, banyak guru masih memandangnya sebagai konsep yang jauh dari jangkauan praktik. Bagi sebagian besar guru, pembelajaran mendalam terasa abstrak, normatif, dan sulit diterapkan di ruang kelas.

Tak mengherankan jika beragam pandangan—bahkan keraguan—muncul dari mereka yang justru menjadi ujung tombak pendidikan. Itu menunjukkan adanya jurang antara wacana dan praktik, antara idealisme konsep dan realitas pembelajaran sehari-hari di sekolah.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 14 April 2025.

Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa banyak guru merasa pembelajaran mendalam sulit diterapkan. Pertama, masih banyak guru yang belum benar-benar memahami apa itu pembelajaran mendalam dan bagaimana cara menggunakannya dalam pengajaran sehari-hari. Sebagian juga menganggap bahwa pendekatan tersebut hanya cocok untuk siswa yang pintar. Padahal, justru semua siswa—tanpa kecuali—perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis.

Kedua, banyak sekolah merasa mereka kekurangan sumber daya untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Padahal, guru dapat memulai dari apa yang sudah ada dan menyesuaikan metode belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Ketiga, pembelajaran mendalam sering dianggap hanya cocok untuk pelajaran tertentu, seperti matematika atau sains. Padahal, pendekatan ini dapat diterapkan di semua mata pelajaran untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna.

Keempat, ada anggapan bahwa pembelajaran mendalam tidak dapat diukur. Faktanya, jika guru menggunakan alat ukur yang tepat seperti rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur, proses dan hasil belajar siswa tetap dapat dinilai secara objektif. Mitos-mitos semacam ini perlu diluruskan melalui diskusi dan pelatihan guru yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis praktik.

Pembelajaran Mendalam

Apa itu pembelajaran mendalam? Pada tataran praktik di ruang kelas, pembelajaran mendalam sederhananya dapat didefinisikan sebagai proses ketika siswa memahami dan memperoleh (*earned*) pengetahuan yang sudah dipelajari, dan siswa bersangkutan dapat menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan persoalan baru yang dihadapi pada situasi yang berbeda.

Pendidikan modern, menurut McTighe dan Gareis (2022), harus mempersiapkan siswa untuk dapat menerapkan hasil

pembelajaran mereka pada situasi baru—dengan kata lain, mampu mentransfer. Grant Wiggins (2005) menyatakan bahwa kemampuan transfer akan tampak ketika siswa mampu memanfaatkan hasil pembelajaran itu pada waktu, tempat, dan keadaan yang berbeda. Kemampuan untuk mentransfer membutuhkan pemikiran strategis serta kebiasaan berpikir reflektif dan fleksibel, bukan sekadar mengingat informasi atau melakukan prosedur secara mekanis. Pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa siswa telah belajar secara mendalam?

“Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa banyak guru merasa pembelajaran mendalam sulit diterapkan. Pertama, masih banyak guru yang belum benar-benar memahami apa itu pembelajaran mendalam dan bagaimana cara menggunakannya dalam pengajaran sehari-hari.”

Menurut McTighe dan Gareis (2022), pertanyaan itu mencerminkan pola pikir ‘jika-maka’: jika kita meyakini bahwa tujuan utama pembelajaran adalah mempersiapkan siswa untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan mereka, *maka* kita harus mengumpulkan bukti yang dapat menunjukkan sejauh mana siswa mampu melakukan transfer sebagai indikator dari pembelajaran mendalam.

Desain Pembelajaran

Grant Wiggins dan Jay McTighe, melalui pendekatan *Understanding by Design* (UbD), menawarkan kerangka pembelajaran mendalam dengan fokus pada perencanaan yang berorientasi ke hasil akhir. Langkah pertama dan terpenting ialah merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Tujuan ini menggambarkan profil perilaku, kemampuan, atau kompetensi yang diharapkan muncul pada siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.

Setelah itu, guru perlu menetapkan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai. Pada tahap ini, guru juga sudah menentukan jenis dan bentuk penilaian (*multiple measures*) yang sesuai. Barulah setelah itu, strategi dan metode pembelajaran dipilih dan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tiga tahap utama dalam pendekatan UbD dapat diringkas sebagai berikut: Tahap pertama adalah identifikasi tujuan, yakni guru menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Tahap kedua adalah perancangan penilaian, yakni guru menyusun bentuk penilaian autentik dan berbasis kinerja untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa. Adapun tahap ketiga ialah perencanaan pembelajaran, yakni guru merancang kegiatan pembelajaran yang sistematis dan bermakna agar siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui strategi UbD, guru dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama terhadap materi pembelajaran.

Dalam menerapkan ketiga tahapan itu, penting untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan antarkomponen, yakni 1) memastikan bahwa penilaian yang dirancang benar-benar mencerminkan dan mencakup keseluruhan aspek dari tujuan pembelajaran; 2) memastikan bahwa strategi pembelajaran yang dipilih relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran; serta 3) memastikan bahwa metode penilaian sejalan dengan strategi pembelajaran yang digunakan sehingga hasil yang diukur sesuai dengan proses yang dijalankan.

Berikut ini beberapa pendekatan yang sangat mungkin sudah dikenal luas oleh guru dan dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran.

1. Menyajikan beragam contoh. Guru dapat memperkaya pemahaman siswa dengan memberikan berbagai contoh yang relevan sehingga siswa mampu mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam konteks yang berbeda.
2. Mengaitkan dengan kasus nyata. Melibatkan kasus-kasus dari dunia nyata membantu siswa memahami konsep secara

lebih konkret dan melatih kemampuan mereka menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menggunakan proyek berbasis masalah. Proyek yang dirancang dari persoalan nyata mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep secara mendalam sekaligus membangun keterampilan berpikir kritis dan transfer pengetahuan.
4. Menerapkan penilaian autentik. Penilaian yang mencerminkan situasi nyata memungkinkan siswa menunjukkan sejauh mana mereka mampu menggunakan konsep yang dipelajari dalam konteks yang bermakna, sekaligus mengembangkan keterampilan transfer.

Menerapkan pendekatan UbD dalam pembelajaran mendalam menempatkan guru sebagai perancang utama pengalaman belajar yang bermakna. Melalui strategi ini, guru tidak hanya mengajarkan konsep, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kritis, mengenali pola, mengintegrasikan informasi, dan menciptakan solusi baru.

Proses ini memperkuat kemampuan transfer siswa--yakni kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang beragam dan tak terduga. Inilah investasi jangka panjang yang sesungguhnya: membekali siswa dengan cara berpikir yang lentur, bernalar, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi terus hidup dalam tindakan mereka sehari-hari. •

12

Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Memperkuat Deep Learning*

Idris Apandi

Widyaprada Ahli Madya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat

MENGGUNAKAN jargon “Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Kemendikdasmen berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satunya dengan mendorong guru-guru mengimplementasikan pembelajaran mendalam (*deep learning*).

Gaung *deep learning* sudah memenuhi ruang diskusi di media sosial. Sebagai hal yang baru, tentunya ada yang pro, kontra, bahkan apatis dalam menyikapi hal tersebut.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompasiana.com*, 1 Februari 2025.

Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong murid berpikir bukan hanya hapal materi, tetapi mampu memahaminya, mampu berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah dalam suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Oleh karena itu, melalui *deep learning*, kreativitas murid harus terus diasah, dan dikembangkan. Hal itu penting sebagai bekal kompetensi abad ke-21 dan menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.

Implementasi *deep learning* ditopang oleh tiga hal, yaitu 1) *mindful* (berkesadaran), 2) *meaningful* (bermakna), dan 3) *enjoyful* (menyenangkan). Dalam konteks National Pedagogies for Deep Learning (Michael Fullan, Joanne Quinn, and Joanne McEachen, 2018), hasil yang diharapkan adalah tercapainya enam kompetensi (6C) global, yaitu 1) karakter, 2) kewarganegaraan, 3) kolaborasi, 4) komunikasi, 5) keaktifan, dan 6) berpikir Kritis.

“Gaung deep learning sudah memenuhi ruang diskusi di media sosial. Sebagai hal yang baru, tentunya ada yang pro, kontra, bahkan apatis dalam menyikapi hal tersebut.”

Adapun dalam konteks Indonesia (Kemendikdasmen), ada delapan kompetensi atau profil lulusan yang diharapkan melalui *deep learning*, yaitu 1) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, 2) kewargaan, 3) penalaran kritis, 4) kreativitas, 5) kolaborasi, 6) mandiri, 7) kesehatan, dan 8) komunikasi.

Berdasarkan hal tersebut, enam kompetensi global tetap diadopsi, ditambah dua kompetensi khas, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME karena Indonesia adalah negara yang berfalsafah Pancasila dan kesehatan untuk menyiapkan generasi emas 2045.

Dalam sebuah kelas, idealnya, setiap murid aktif, bersemangat, dan antusias saat mengikuti proses pembelajaran. Idealnya, dalam proses pembelajaran, ruang kelas ramai, menjadi sarana untuk berdiskusi, berbagi pendapat, mengeksplorasi gagasan setiap

murid, dan mengembangkan kreativitasnya, tetapi faktanya kelas kadang sepi.

Guru saja yang sibuk menjelaskan materi di depan kelas. Murid hanya duduk dan diam mendengarkan penjelasan guru. Bahkan, ada yang terantuk-antuk dan kurang memiliki motivasi belajar. Saat guru menawarkan ada murid yang mau bertanya, hanya ada satu atau dua murid yang bertanya, dan biasanya itu-itu saja orangnya. Kalau kondisinya demikian, bagaimana pembelajaran mau *deep learning*?

Mewujudkan *deep learning* bukanlah proses yang *ujug-ujug*. Ada hal yang harus diperhatikan oleh guru. Di antaranya adalah kemampuan awal, kesulitan belajar, minat, dan kondisi psikologis murid. Murid pun memiliki gaya belajar masing-masing. Oleh karena itu, cara dan strategi pembelajaran tidak dapat disamaratakan kepada semua murid. Itulah yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi.

Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, mempertimbangkan keunikan, gaya belajar, kemampuan awal peserta didik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menerapkan beragam metode, sumber belajar, media, dan asesmen. Hal itu memang tidak mudah. Salah satu tantangannya, misalnya, jumlah murid yang banyak dan beragamnya kebutuhan belajar murid.

Berdasarkan hal tersebut, maka asesmen awal (diagnostik) menjadi hal yang perlu dilakukan oleh guru. Tujuannya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi serta kebutuhan belajar murid. Dari hasil asesmen diagnostik tersebut, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan.

Asesmen diagnostik terdiri atas asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik nonkognitif. Asesmen diagnostik kognitif tujuannya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan awal dan kesulitan belajar murid. Instrumen yang digunakan misalnya prates, tanya jawab, atau kuis.

Asesmen nondiagnostik bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi kondisi psikologis dan latar belakang murid. Instru-

men yang dapat digunakan misalnya wawancara dengan yang bersangkutan, wawancara dengan orang tua/wali murid, studi dokumentasi, atau observasi. Dalam melakukan asesmen diagnostik nonkognitif, guru kelas atau guru mata pelajaran dapat bekerja sama dengan guru BK atau wali kelas.

Guru menyusun desain pembelajaran berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kemudian disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas empat jenis, yaitu 1) diferensiasi konten, 2) diferensiasi proses, 3) diferensiasi produk, dan 4) diferensiasi lingkungan belajar.

Diferensiasi konten ialah guru menyajikan materi melalui beragam konten disesuaikan dengan gaya belajar murid (visual, audio, kinestetik), seperti audio, video, visual, atau audio visual.

Murid dengan gaya belajar visual lebih tertarik dengan materi yang disajikan dalam bentuk gambar, grafis, atau video. Murid dengan gaya belajar audio lebih senang mendengarkan suara, rekaman, atau penjelasan dari guru secara langsung. Walau melihat media audio-video, suara video sangat membantu yang bersangkutan untuk lebih memahami materi. Adapun murid dengan gaya belajar kinestetik lebih senang belajar melalui gerakan, praktik, bermain peran, simulasi, dan sebagainya.

Pada diferensiasi proses, guru menerapkan beragam strategi dan metode pembelajaran saat menyampaikan materi pelajaran mengingat beragamnya gaya belajar dan minat murid dalam mempelajari. Di sinilah kreativitas guru diuji dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid.

Pada diferensiasi produk, guru menyampaikan materi yang sama kepada murid, tetapi memberikan penugasan produk yang beragam. Misalnya, saat guru menyampaikan materi keaneragaman hayati, bentuk tugas atau produknya murid membuat makalah tentang flora dan fauna, membuat deskripsi atau video profil tumbuhan atau hewan tertentu, membuat grafis keanekaragaman hayati, membuat video tentang flora atau fauna tertentu, presentasi pengalamannya saat menanam atau memelihara hewan tertentu, dan sebagainya. Intinya, walau bentuknya beragam, produk yang

dibuat oleh murid menggambarkan pemahamannya tentang materi pelajaran.

Pada diferensiasi lingkungan belajar, guru dapat melaksanakan pembelajaran di dalam ruang kelas, di luar kelas, mengajak peserta didik untuk mengobservasi lingkungan, atau berkunjung ke tempat tertentu. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka (luring), tatap maya (daring), atau kombinasi tatap muka dan tatap maya (hibrida).

Mengingat beragamnya kemampuan murid, walau konten materi yang dipelajari murid sama, guru tidak dari mengawali dari start yang sama—bergantung pada hasil asesmen diagnostik.

Materi yang mudah menurut murid tertentu belum tentu sama bagi murid yang lainnya. Oleh karena itu, waktu pencapaian *deep learning* setiap murid berbeda-beda. Pada tahap itu, selain kreativitas, guru juga memerlukan kesabaran dan ketelatenan dalam menyampaikan materi.

Asesmen formatif perlu dilaksanakan dengan optimal. Sifat asesmen formatif sebagai bagian dari proses pembelajaran (*assessment as learning*) dan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran (*assessment for learning*). Dengan demikian, penguatan kemampuan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi akan sangat membantu dan mendukung implementasi *deep learning*.•

Bagian II

Inovasi Tes Kemampuan Akademik

Kemendikdasmen, 2025



13

Tes Kemampuan Akademik: Harapan Baru untuk Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah*

Muhammad Syawal Djamil

Pemerhati Pendidikan Daerah Tertinggal, Guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie

Tes Kemampuan Akademik merupakan langkah awal untuk membangun sistem evaluasi pembelajaran yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan. Ia harus dirancang dengan prinsip kesetaraan, diimplementasikan dengan empati, dan ditindaklanjuti dengan program konkret.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Komparatif.id*, 27 Juni 2025.

Di tengah hiruk pikuk pembicaraan tentang pendidikan bermutu, suara dari daerah tertinggal kerap sayup terdengar. Padahal, di sanalah tantangan pendidikan nyata bermukim, baik itu keterbatasan guru, sarana prasarana yang minim, maupun kualitas pembelajaran yang belum merata.

Laporan Profil Pendidikan Indonesia 2023 yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa lebih dari 70 persen sekolah di wilayah tertinggal menghadapi tantangan infrastruktur dan kekurangan guru bersertifikasi.

Maka dari itu, ketika Kemendikdasmen menggulirkan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem evaluasi pembelajaran nasional pada tahun 2025, sebagai guru kita menyambutnya dengan optimisme.

Melalui Tes Kemampuan Akademik kita yakin ini menjadi momentum yang benar-benar dan menjadi alat pemerataan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar pengukur prestasi akademik siswa. Di sinilah peran semua pemangku kepentingan—termasuk media—untuk mengawal pelaksanaannya secara adil dan kontekstual, terutama untuk daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam banyak hal.

Sebagai pemerhati pendidikan di daerah, saya melihat bahwa sistem evaluasi selama ini terlalu beragam dan sangat bergantung pada subjektivitas sekolah. Tidak semua sekolah punya sumber daya yang mumpuni untuk menilai capaian pembelajaran secara komprehensif.

Sebuah studi oleh OECD (Education Policy Outlook: Indonesia, 2022) menyebutkan bahwa perbedaan pendekatan penilaian antarsekolah memperlebar ketimpangan hasil belajar antarwilayah. Dengan hadirnya TKA, yang digagas oleh Kemendikdasmen, terlihat bahwa negara mulai mengambil alih peran pentingnya yakni dengan menyediakan alat ukur standar, adil, dan setara bagi semua sekolah.

TKA bukan sekadar ujian, melainkan instrumen untuk *evidence-based policy*. Data dari TKA dapat digunakan pemerintah pusat dan

daerah untuk melihat wilayah mana yang tertinggal, kompetensi apa yang lemah, dan intervensi seperti apa yang dibutuhkan.

Misalnya, jika hasil TKA di satu kabupaten menunjukkan skor numerasi siswa kelas 6 sangat rendah, pemerintah daerah dapat segera menurunkan program pelatihan guru matematika, memperkuat modul pengayaan, dan menambah jam belajar tematik.

Pendekatan itu sejalan dengan temuan *Indonesian Journal of Educational Review* (Vol. 10 No. 1, 2023) yang menyimpulkan bahwa intervensi berbasis data hasil asesmen meningkatkan efektivitas pelatihan guru hingga 30 persen dibandingkan pendekatan umum.

Kebijakan TKA juga menyiratkan pesan kuat tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas. Di daerah tertinggal, siswa tidak hanya tertinggal secara geografis, tetapi juga digital.

Survei yang dilakukan oleh AIPI dan Program INOVASI pada 2022 mengungkapkan bahwa empat dari 10 sekolah di wilayah 3T belum memiliki akses internet yang layak, sementara 60 persen guru mengaku belum terbiasa menggunakan platform digital pembelajaran.

Namun, TKA berbasis teknologi dapat menjadi pintu masuk akselerasi transformasi digital. Ketika sekolah dipersiapkan untuk menyelenggarakan TKA, infrastruktur, pelatihan, dan bimbingan teknis akan ikut mengalir. Itulah efek domino positif yang dibutuhkan.

Agar tidak menjadi beban tambahan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyiapkan perangkat dan SDM. Bahkan, lebih dari itu, partisipasi masyarakat, LSM pendidikan, dan sektor swasta harus ikut bergerak—karena pendidikan bukan kerja satu arah, tetapi kolaborasi.

TKA akan berhasil jika diletakkan dalam kerangka besar pembelajaran yang berpusat pada murid. Evaluasi seharusnya bukan untuk menilai siapa yang pintar dan siapa yang tidak, tetapi untuk melihat siapa yang butuh dibantu dan bagaimana cara membantunya. Prinsip ini selaras dengan arah Kurikulum Merdeka

yang menekankan asesmen sebagai alat refleksi pembelajaran, bukan klasifikasi murid.

TKA juga bukan “cap nilai nasional” yang menekan guru atau siswa, melainkan alat refleksi dan pemicu perbaikan. Setiap data harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Misalnya, sekolah dengan hasil rendah harus diberi pendampingan, bukan stigma.

Guru-guru perlu diberdayakan untuk memahami data hasil TKA, bukan sekadar menerima laporan. Laporan UNICEF Indonesia menegaskan bahwa asesmen yang digunakan secara bijak dapat memperkuat peran guru sebagai agen perubahan, bukan hanya pelaksana kurikulum.

TKA adalah langkah awal untuk membangun sistem evaluasi pembelajaran yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan. Ia harus dirancang dengan prinsip kesetaraan, diimplementasikan dengan empati, dan ditindaklanjuti dengan program konkret.

Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan: data hanyalah awal dari perubahan, bukan perubahan itu sendiri. Yang lebih menentukan adalah keberanian kita—pemerintah, pendidik, masyarakat—untuk menindaklanjuti data itu dengan kebijakan dan tindakan nyata. TKA hanya akan berarti jika menjadi dasar penyusunan anggaran pendidikan yang lebih adil, perekrutan dan pelatihan guru yang lebih strategis, serta penyediaan fasilitas yang benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Lebih dari sekadar angka di atas kertas, TKA seharusnya menjadi cermin yang jujur tentang kondisi pendidikan kita—dan dari sana, lahirlah tekad untuk memperbaikinya, bersama-sama.

Sebagai orang yang melihat langsung denyut pendidikan di pelosok, saya percaya bahwa anak-anak dari Aceh, Nusa Tenggara, Papua, hingga Maluku memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berkembang. Tes Kemampuan Akademik dapat menjadi jembatan menuju keadilan itu—asal kita tak hanya mengukurnya, tapi juga mengubahnya menjadi aksi nyata.

Hal ini karena pada akhirnya, kualitas pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh skor tertinggi di kota besar, tetapi oleh seberapa kuat kita mengangkat yang paling tertinggal agar bisa maju bersama.●

14

Tes Kemampuan Akademik dan Evaluasi Pendidikan Nasional*

Toni Toharudin

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung

PENDIDIKAN yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan kita dalam mengevaluasi dan menjamin kualitas capaian belajar murid secara konsisten dan adil.

Pembelajaran di ruang kelas adalah separuh cerita, separuh lain soal bagaimana hasil belajar diukur dan dibandingkan secara konsisten.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 11 Juni 2025.

Dalam lanskap yang kian menuntut akuntabilitas dan kesetaraan akses, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk memperkenalkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi murid di kelas akhir SD, SMP, dan SMA-SMK atau yang sederajat menjadi langkah penting yang layak mendapat perhatian serius.

TKA bukan sekadar alat ukur, tetapi bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan terhadap sistem evaluasi capaian belajar yang selama ini terasa timpang antarsekolah.

TKA juga bukan reinkarnasi Ujian Nasional yang pernah menjadi hakim tunggal kelulusan murid. Ia tidak datang membawa palu, tidak pula menggeser guru dari kursi penilai.

Sebaliknya, TKA bersifat opsional, sebagai layanan yang disediakan pemerintah untuk mendukung guru, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya yang ingin memperoleh informasi tentang capaian belajar individu murid secara lebih terstandar. TKA pelengkap sekaligus penguat sistem penilaian yang sudah ada, bukan menggantikannya.

Pengganti Ujian Nasional, yaitu Tes Kemampuan Akademik, akan diberlakukan pada November 2025 untuk kelas XII SMA dan SMK.

Empat tahun terakhir, sistem pendidikan kita berjalan dengan dua jenis evaluasi: Asesmen Nasional untuk memotret kinerja sistem secara makro, dan penilaian harian oleh guru untuk mengevaluasi capaian belajar secara mikro.

Keduanya berjalan berdampingan, masing-masing dengan fungsi dan ruangnya sendiri. TKA tak hadir untuk menyingkirkan yang lama, tetapi melengkapi. Asesmen Nasional tetap dibutuhkan sebagai tolok ukur sistem tanpa membebani murid, sementara kedaulatan guru dalam menilai dan menentukan kelulusan tetap jadi pijakan utama dalam praktik pendidikan di sekolah.

Penguatan Mutu Ujian Sekolah

Selama ini, seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik antarsekolah maupun ke perguruan tinggi, umumnya mengandalkan nilai rapor sekolah. Padahal, nilai rapor sekolah kerap kali tidak dapat dibandingkan secara adil antarsatuan pendidikan.

Tidak adanya penilaian individu yang terstandar secara nasional membuat nilai 90 di satu sekolah dapat sangat berbeda maknanya dengan nilai serupa di sekolah lain. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi institusi pendidikan lanjutan, termasuk perguruan tinggi, dalam melakukan pemeringkatan dan seleksi secara objektif.

TKA hadir menjawab tantangan ini. Dengan instrumen tes yang dikembangkan secara nasional, hasil TKA memberikan gambaran yang lebih terstandar tentang kemampuan akademik siswa.

Ini akan menjadi referensi tambahan yang kredibel dalam seleksi berbasis prestasi akademik, baik untuk SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) maupun seleksi masuk perguruan tinggi. Harapannya, seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya jadi lebih adil dan akuntabel, tanpa bergantung sepenuhnya pada nilai rapor yang tak seragam.

Lebih dari sekadar alat seleksi, TKA juga berpotensi jadi katalis penguatan kualitas ujian sekolah. Hal ini karena TKA tak menentukan kelulusan, guru dan sekolah tetap memiliki peran utama dalam menilai murid melalui ujian sekolah.

Namun, kehadiran TKA yang hasilnya dapat dibandingkan antar-individu dan antarsekolah dapat menjadi cermin objektif bagi sekolah dalam mengevaluasi kualitas ujian dan pembelajarannya.

Sekolah yang memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan ujian sekolah akan cenderung memiliki korelasi hasil yang tinggi dengan capaian TKA muridnya.

Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan besar antara nilai ujian sekolah dan hasil TKA, hal itu dapat menjadi alarm bagi sekolah untuk meninjau kembali proses evaluasi dan pembelajarannya. Dengan kata lain, TKA dapat berfungsi sebagai

instrumen pengendalian mutu yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

Aspek positif lain dari kebijakan TKA adalah pendekatan kolaboratifnya. Pada tingkat SMA/SMK, seluruh soal akan disusun oleh kementerian. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, pemerintah pusat akan berbagi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan soal.

Itu bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini juga penting sebagai bentuk *ownership* bersama atas suatu kebijakan. Dalam era desentralisasi ini, peran pusat yang terlalu dominan dalam suatu program sering kali menimbulkan tantangan dalam implementasinya di daerah. Itu karena pemerintah daerah merasa bukan program mereka.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan instrumen tes, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki yang lebih kuat terhadap kebijakan ini.

Pada saat yang sama, proses ini juga akan memperkaya perspektif pusat terhadap konteks lokal sehingga instrumen TKA yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Kebijakan tidak lagi terasa seperti titah dari atas, tetapi menjadi karya bersama.

Menyikapi Kekhawatiran

Tentu saja, setiap kebijakan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan murid dan sekolah menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Berbagai kekhawatiran yang timbul di masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satunya soal potensi TKA menjadi beban tambahan bagi murid atau menjelma menjadi “Ujian Nasional” gaya baru.

Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang jernih. Penjelasan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan perlu secara konsisten dikomunikasikan. TKA adalah alat bantu yang justru memberi keuntungan kepada murid dan lembaga pendidikan.

Untuk menghindari tekanan berlebih terhadap murid, integrasi hasil TKA dalam proses seleksi pun sebaiknya bersifat proporsional, menjadi salah satu komponen pertimbangan di antara komponen lainnya, termasuk rapor sekolah.

Kekhawatiran lain adalah potensi kesenjangan. Murid dari sekolah-sekolah atau keluarga dengan sumber daya memadai akan lebih siap menghadapi TKA dibandingkan mereka yang kekurangan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem dukungan yang memadai, termasuk penyediaan contoh soal yang dapat diakses secara bebas. Dengan begitu, TKA benar-benar menjadi instrumen yang mendukung keadilan pendidikan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.

Kehadiran TKA menandai upaya serius pemerintah untuk menyempurnakan evaluasi capaian belajar individu yang selama ini terlalu beragam dan sulit dibandingkan. Di tengah kebutuhan akan sistem seleksi yang lebih adil dan berbasis data, TKA menawarkan jalan tengah antara penilaian sekolah yang kontekstual dan kebutuhan akan tolok ukur nasional yang objektif.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Pemerintah perlu menjaga transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil TKA.

Sekolah dan guru perlu melihat kebijakan itu sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya, bukan sebagai ancaman.

Masyarakat pun perlu memahami bahwa standardisasi bukan berarti penyeragaman, melainkan upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang dan melanjutkan pendidikannya.

Dengan semangat gotong-royong dan komitmen pada mutu serta keadilan, Tes Kemampuan Akademik (TKA) dapat menjadi batu pijakan penting menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.●

15

TKA dan Moderasi Penilaian Berbasis Individu*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Melalui peraturan ini pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki rapor mutu pendidikan berbasis kemampuan akademik setiap murid.

Permendikdasmen 9/2025 penting karena sejak Ujian Nasional (UN) dihapuskan di tengah musim pandemi Covid-19,

*Artikel telah dipublikasikan Harian *Disway*, 24 Juli 2025.

pemerintah tidak memiliki data mutu pendidikan yang berbasis kemampuan individu setiap murid. Asesmen Nasional (AN) yang dilaksanakan sejak 2021 untuk menggantikan UN sejatinya lebih menggambarkan hasil survei terhadap mutu satuan pendidikan. Hal itu karena AN hanya menilai kemampuan beberapa murid yang terpilih sebagai sampel survei. Apalagi faktanya pelaksanaan AN belum menjangkau semua sekolah di penjuru tanah air.

Karena berorientasi pada capaian akademik individu setiap murid, hasil TKA diharapkan terintegrasi dengan kebijakan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Seperti diketahui, Kemendikdasmen juga telah meluncurkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB yang secara efektif mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026. Bentuk integrasinya adalah menjadikan hasil TKA sebagai salah satu dasar penerimaan murid baru dalam setiap jenjang SMPB.

Pembandingan Nilai Rapor

Pelaksanaan Permendikdasmen 9/2025 akan dimulai untuk murid SMA dan yang sederajat pada November 2025. Adapun TKA untuk murid SD dan SMP akan dilaksanakan pada 2026. Hasil TKA tingkat SMA dan yang sederajat pada November 2025 diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Untuk kepentingan itu, Kemendikdasmen telah melakukan serangkaian pertemuan dengan para pihak yang terkait, termasuk pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Forum Rektor.

Sementara itu, hasil TKA SD dan yang sederajat dapat digunakan masing-masing murid untuk mendaftar SPMB SMP melalui jalur prestasi. Demikian juga dengan hasil TKA SMP dan yang sederajat dapat digunakan setiap murid untuk mendaftar SPMB SMA melalui jalur prestasi. Untuk pemerintah daerah yang belum memiliki tes terstandar dapat menjadikan hasil TKA sebagai dasar penerimaan SPMB melalui jalur prestasi. Selain bermanfaat untuk kepentingan SPMB, secara keseluruhan hasil TKA SD, SMP, SMA,

dan SMK sekaligus juga dapat menjadi pembanding nilai rapor setiap murid.

Pertanyaannya, mengapa hasil TKA dikatakan dapat menjadi pembanding nilai rapor setiap murid? Jawabnya, karena banyak pihak yang sejak lama mempertanyakan kredibilitas nilai rapor. Di antara pihak yang menyoal kredibilitas nilai rapor murid adalah pimpinan perguruan tinggi. Sebagian mereka mengatakan bahwa nilai rapor yang digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mendaftarkan murid SMA dan yang sederajat ke perguruan tinggi telah dinaikkan dari nilai aslinya.

Dengan kata lain, nilai rapor dipandang belum mencerminkan kemampuan akademik murid. Bahkan, dengan berseloroh, seorang teman mengatakan bahwa nilai rapor yang dibagikan ke murid itu sebagiannya adalah “nilai sedekah” atau “nilai syafa’at” dari gurunya. Akan tetapi, kita yakin bahwa tidak semua nilai rapor murid itu hasil rekayasa. Guru-guru yang bekerja dengan pengabdian sepenuh hati pasti tidak mau melakukan tindakan yang dapat mencederai integritasnya sebagai pendidik.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa masih ada sekolah yang melakukan praktik ketakjujuran yang di antara modusnya adalah dengan menaikkan nilai rapor murid? Jawabnya, hal itu dilakukan agar murid dapat diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta favorit melalui jalur prestasi. Sekolah tentu akan memanfaatkan data penerimaan lulusan di berbagai perguruan tinggi berkategori favorit sebagai dasar untuk meyakinkan calon wali murid dalam setiap pelaksanaan SPMB.

Dengan banyaknya murid yang diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta favorit berarti satuan pendidikan itu akan dikesankan bermutu. Padahal, dalam kenyataannya ada ketakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang dilakukan sebagian sekolah untuk meloloskan lulusannya masuk ke berbagai perguruan tinggi berkategori unggulan. Dalam kondisi inilah hasil TKA penting sebagai validator nilai rapor yang dikeluarkan sekolah. Hasil TKA yang dilaksanakan secara jujur dan berintegritas pasti mencerminkan kemampuan akademik murid.

TKA sebagai Moderasi

Jalan panjang telah dilakukan Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengundang Permendikdasmen 9/2025 tentang TKA. Berbagai perhelatan tingkat nasional telah diselenggarakan, seperti rembuk pendidikan, konsolidasi pendidikan, dan diskusi terpumpun. Berbagai agenda ini melibatkan dinas pendidikan provinsi dan daerah, pakar, pegiat, dan praktisi pendidikan. Pelibatan para pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan benar-benar sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, Mendikdasmen melakukan serangkaian kegiatan silaturahmi dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) penyelenggara pendidikan. Mendikdasmen juga melakukan rapat yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Apa yang tidak boleh ketinggalan adalah rapat dengar pendapat bersama anggota DPR. Semua kegiatan itu penting untuk memperoleh masukan sekaligus berbelanja ide demi menghadirkan kebijakan untuk memajukan pendidikan nasional.

Dari berbagai kegiatan itulah dirumuskan kebijakan untuk memastikan penjaminan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah menghadirkan sistem evaluasi pendidikan yang diharapkan menjadi jalan tengah antara kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan menghidupkan kembali UN. Seperti diketahui, pandangan dua kelompok pro dan kontra UN ini sangat sulit dipertemukan. Bagi kelompok yang tidak setuju, UN dinilai tidak ramah dengan capaian anak-anak yang bertalenta di bidang non-akademik (*nonacademic achievement*).

Dengan kata lain, UN dipahami lebih mengedepankan penilaian berbasis kemampuan akademik (*academic achievement*) murid. Beban UN yang begitu tinggi juga dinilai selalu menghadirkan perasaan traumatik pada diri anak-anak. Dan, yang paling banyak disorot selama pelaksanaan UN adalah persoalan ketakjuran. Bahkan, lebih dramatis dikatakan bahwa ketakjuran merupakan "anak kandung" UN. Berbagai insiden yang menunjukkan praktik

ketakjujuran, misalnya, saling sontek antarmurid serta jual beli soal dan jawaban UN kerap terjadi.

Sementara itu, kelompok yang setuju mengatakan UN merupakan alat ukur yang penting untuk menilai capaian pembelajaran murid. Secara teoretis juga tidak ada perdebatan mengenai pentingnya sistem evaluasi dalam proses belajar dan mengajar. Apalagi di negara lain yang lebih maju dalam bidang pendidikan juga masih menyelenggarakan ujian nasional (*national exam*). Ujian nasional dengan berbagai nomenklaturinya di banyak negara dinilai efektif untuk mengevaluasi mutu pendidikan.

Di negeri tercinta ini persoalan ketimpangan pelayanan mutu pendidikan antardaerah juga meniscayakan adanya penilaian yang terstandar secara nasional. Hasil evaluasi secara nasional ini tentu sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dengan kewenangan masing-masing dapat menjadikan hasil UN sebagai dasar melakukan intervensi yang tepat sasaran untuk mewujudkan pendidikan bermutu secara lebih merata.

Posisi UN yang tidak lagi menjadi alat penentu kelulusan seharusnya juga dapat mengurangi beban bagi murid, sekolah, dan orang tua. Sementara persoalan ketakjujuran yang sering kali mewarnai pelaksanaan UN sudah dimitigasi dengan menghadirkan beberapa paket soal yang berbeda untuk setiap murid. Semua kebijakan ini diambil untuk meminimalkan praktik katakjujuran tatkala UN.

Di tengah kontroversi UN dan pelaksanaan AN yang belum menjangkau semua sekolah itulah penyelenggaraan TKA menemukan momentumnya. Apalagi ditekankan bahwa TKA bersifat opsional bagi murid. Hasil TKA juga tidak menentukan kelulusan murid. Kelulusan murid sepenuhnya ditentukan guru di setiap sekolah. Melalui Ujian Sekolah dan penilaian autentik (*authentic assessment*), guru memiliki otoritas untuk meluluskan atau tidak meluluskan murid.

Permendikdasmen 9/2025 juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan TKA ini setiap murid diberikan pilihan untuk mengikuti atau tidak. Namun, penting diingat, bagi murid yang mengikuti

TKA pasti memperoleh banyak keuntungan. Hal itu karena hasil TKA yang terbaik memberikan peluang bagi murid untuk diterima di jenjang pendidikan lanjutan melalui jalur prestasi.

“Di negeri tercinta ini persoalan ketimpangan pelayanan mutu pendidikan antardaerah juga meniscayakan adanya penilaian yang terstandar secara nasional. Hasil evaluasi secara nasional ini tentu sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah.”

Semoga TKA benar-benar menjadi jalan moderasi untuk menilai kemampuan akademik berbasis individu murid. Mendikdasmen tentu menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan apa pun yang diambil pasti menyisakan pro dan kontra. Setiap pihak dapat beradu argumen dengan membawa kajian teoretis dan empiris sesuai dengan kepentingannya. Pada konteks inilah keberanian mengambil keputusan menjadi sangat penting. Untuk itulah, Mendikdasmen menetapkan keputusan tentang TKA yang diyakini menjadi jalan tengah sekaligus memastikan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. •

16

Tes Kemampuan Akademik Berintegritas*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen
Guru Besar UIN Sunan Ampel, Surabaya

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan peraturan tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA). Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA. TKA untuk SMA dan yang sederajat akan dilaksanakan pada 1-9 November 2025. Sementara TKA untuk SD dan yang sederajat serta SMP dan yang sederajat akan dimulai pada Maret 2026.

Kebijakan TKA diputuskan karena sejak Ujian Nasional (UN) dihapuskan pada 2021, pemerintah tidak memiliki data hasil belajar

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Jawa Pos*, 29 Agustus 2025.

yang terstandar secara nasional dan berbasis kemampuan individu setiap murid. Sebagai pengganti UN, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis kompetensi melalui Asesmen Nasional (AN) yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Dalam implementasinya AKM penting untuk menilai literasi murid, yakni literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Dua kompetensi ini dipilih karena dinilai sangat fundamental serta dibutuhkan untuk menunjang apa pun profesi yang dipilih murid. Sementara itu, Survei Karakter untuk mengukur profil pelajar Pancasila, sedangkan Survei Lingkungan Belajar untuk memotret kualitas lingkungan belajar.

Akan tetapi, harus diakui, AN lebih menekankan evaluasi pada satuan pendidikan. Melalui AKM memang diperoleh data mengenai literasi dan numerasi murid. Namun, hasil AKM belum menggambarkan kompetensi literasi dan numerasi semua murid dari setiap satuan pendidikan. Hal itu karena AKM hanya diikuti sebagian murid yang terpilih secara acak (*random*) dari satuan pendidikan.

Diberikan Pilihan

Di tengah kekosongan data hasil belajar berbasis kemampuan individu setiap murid di semua jenjang satuan pendidikan itulah pelaksanaan TKA sangat penting. Hasil TKA diharapkan menjadi evaluasi pembelajaran sekaligus pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Penting ditekankan bahwa pelaksanaan TKA bersifat pilihan bagi murid. Murid diberikan pilihan mengikuti atau tidak mengikuti TKA.

Meski bersifat pilihan, murid yang mengikuti TKA dipastikan memiliki banyak keuntungan. Sebagai ilustrasi, seseorang dapat mengambil kesempatan untuk mengikuti Test of English as a Foreign Language (TOEFL) atau tidak. Bagi yang mengikuti TOEFL dengan capaian nilai yang tinggi maka dipastikan akan memperoleh banyak keuntungan. Skor TOEFL yang tinggi memberikan kesempatan

seseorang untuk memperoleh beasiswa di berbagai universitas luar negeri.

Demikian halnya dengan murid yang mengikuti TKA. Hasil TKA dapat digunakan untuk mendaftarkan diri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur prestasi. Hasil TKA SD berguna untuk mendaftarkan diri ke jenjang SMP. Demikian juga, hasil TKA SMP penting untuk mendaftarkan diri ke jenjang SMA. Bagi murid SMA dan yang sederajat, hasil TKA dapat digunakan untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi (PT) melalui jalur prestasi.

“Hasil TKA diharapkan menjadi evaluasi pembelajaran sekaligus pemetaan mutu pendidikan secara nasional. Penting ditekankan bahwa pelaksanaan TKA bersifat pilihan bagi murid. Murid diberikan pilihan mengikuti atau tidak mengikuti TKA.”

Sejauh ini pendaftaran murid SMA ke PT melalui jalur prestasi salah satunya menggunakan nilai rapor. Sayangnya, kredibilitas nilai rapor murid banyak diragukan. Nilai rapor dipersepsi tidak lagi menunjukkan kemampuan akademik yang autentik dari murid. Ironisnya, praktik memberikan nilai yang tinggi melampaui kemampuan akademik murid itu menjadi fenomena umum di semua level pendidikan.

Padahal nilai rapor seharusnya menggambarkan konsistensi capaian belajar murid. Melalui rapor guru juga berkesempatan untuk menunjukkan hasil penilaian autentik (*authentic assessment*) berdasarkan capaian akademik setiap murid. Penilaian autentik dapat dipahami sebagai kegiatan asesmen dengan berdasar pada apa yang seharusnya dinilai, menilai dengan beberapa metode, dan menilai dari berbagai sumber.

Dari kegiatan penilaian autentik melalui rapor itu akan diperoleh data mengenai potret portofolio setiap murid. Berdasarkan portofolio itulah pimpinan sekolah bersama dewan guru memiliki otoritas untuk memutuskan apakah seorang murid akan naik kelas atau tinggalkan kelas serta lulus atau tidak lulus.

TKA Berintegritas

Ketidakjujuran sebagian guru dalam memberikan nilai rapor untuk murid merupakan persoalan serius. Pada konteks inilah hasil TKA sekaligus dapat menjadi validator nilai rapor. Tantangannya adalah bagaimana semua pemangku kepentingan pendidikan berkontribusi untuk mewujudkan TKA yang berintegritas.

Pertanyaan tersebut penting menjadi refleksi pemerintah, dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, murid, orang tua, media, dan pegiat pendidikan. Sebab harus diakui, berbagai kasus yang menunjukkan praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) dalam sejarah pelaksanaan UN selalu muncul. Bahkan, sebagian pihak menyimpulkan bahwa ketidakjujuran merupakan “anak kandung” dari UN.

Pada konteks itulah Kemendikdasmen penting membuat sistem untuk memitigasi potensi ketidakjujuran dalam pelaksanaan TKA. Jika kita gagal mewujudkan TKA berintegritas, publik akan tetap meragukan kredibilitas ujian, tes, atau apa pun namanya. Semua elemen bangsa penting menyadari dampak jangka panjang dari ketidakjujuran di dunia pendidikan.

Untuk itulah Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam *Reproduction in Education, Society and Culture* (1990) menekankan pentingnya membangun habitus anak sejak dini. Dimulai dari keluarga sebagai sekolah pertama dan terpenting bagi anak. Selanjutnya, sekolah memperkuat internalisasi nilai-nilai baik itu melalui pembelajaran dan keteladanan. Internalisasi nilai-nilai di keluarga dan sekolah diharapkan mampu mewujudkan generasi yang berintegritas.

Ingat, persoalan korupsi yang terus menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara sangat mungkin berkorelasi dengan kegagalan kita membangun kejujuran. Termasuk kejujuran tatkala murid mengikuti ujian di sekolah. Dengan demikian, pelibatan semua pihak untuk mewujudkan TKA berintegritas merupakan sebuah keniscayaan. •

17

Menakar Efektivitas Tes Kemampuan Akademik untuk Membentuk Siswa Berpikir Kritis*

Fahrudin Eko Hardiyanto

Dosen PPG Universitas Pekalongan,
Mudir TrenQu Muhammadiyah Rogoselo, dan
Ketua Yayasan Insan Cendekia Rogoselo

DI TENGAH arus perubahan zaman yang cepat dan penuh tantangan, dunia pendidikan Indonesia terus melakukan penyesuaian. Salah satunya melalui pembaruan sistem penilaian akademik nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes

*Artikel ini telah dipublikasikan di *SuaraMerdeka.com*, 4 Agustus 2025.

Kemampuan Akademik (TKA), sebagai langkah strategis untuk menjamin mutu dan kesetaraan pendidikan di semua jalur dan jenjang.

TKA hadir bukan sekadar untuk menguji, melainkan juga untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang berpikir kritis dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Pertanyaannya, seberapa besar kemampuan TKA dalam mendorong siswa menjadi sosok pemelajar yang unggul dan berpikir kritis?

TKA merupakan bentuk pengukuran capaian akademik siswa dalam mata pelajaran tertentu, yang dilaksanakan secara nasional, baik untuk jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Berbeda dari ujian konvensional yang hanya mengukur hafalan, TKA menekankan pada pemahaman konsep, penalaran logis, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda.

Tujuannya pun cukup luas: mulai dari menyediakan data capaian akademik siswa secara objektif, membuka akses kesetaraan bagi jalur nonformal, hingga menjadi dasar untuk penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah dan sekolah. Dengan pendekatan itu, TKA sejatinya bukan sekadar alat seleksi, melainkan juga alat refleksi bagi siswa, guru, dan pembuat kebijakan pendidikan. Siswa unggul masa kini bukan lagi mereka yang hanya mampu menghafal, melainkan mereka yang mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan.

TKA hadir untuk mendorong ke arah itu. Soal-soal TKA dirancang berdasarkan kerangka asesmen nasional yang terukur dan mengandung unsur *higher order thinking skills* (HOTS). Misalnya, siswa tidak cukup hanya tahu rumus, tetapi harus bisa menganalisis persoalan, mengaitkannya dengan konteks kehidupan, serta memilih strategi penyelesaian yang paling tepat.

Selain itu, hasil TKA digunakan dalam berbagai aspek penting: seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pengakuan pendidikan kesetaraan, hingga sebagai acuan pengendalian mutu oleh pemerintah pusat dan daerah. Maka, tak berlebihan jika

TKA disebut sebagai tulang punggung sistem evaluasi pendidikan nasional yang baru.

Tentu saja, agar TKA benar-benar dapat membentuk siswa yang kritis, ekosistem pembelajaran juga harus bertransformasi. Tantangannya, saat ini masih banyak guru dan sekolah yang terjebak dalam paradigma lama: mengajar demi nilai, bukan demi pemahaman.

Kurikulum yang padat juga kerap membuat guru hanya berfokus menuntaskan materi, tanpa ruang bagi eksplorasi dan diskusi. Padahal, berpikir kritis tidak lahir dari *drill* soal semata, melainkan dari kebiasaan bertanya, berdiskusi, menyusun argumen, dan merefleksikan pemahaman. Oleh karena itu, implementasi TKA yang optimal memerlukan dukungan dari semua pihak. Guru perlu dilatih menyusun dan mengajarkan soal berbasis pemikiran kritis. Sekolah perlu menyediakan ruang untuk pembelajaran bermakna.

Pemerintah daerah dan pusat perlu konsisten memantau pelaksanaan dan menjamin keadilan akses teknologi di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, TKA dapat menjadi jembatan menuju generasi emas Indonesia. Bukan hanya sebagai alat seleksi, melainkan juga sebagai alat untuk membentuk watak belajar siswa: jujur, reflektif, dan kritis.

TKA menuntut siswa memahami materi, bukan sekadar menghafal. Ia mendorong siswa memecahkan masalah, bukan sekadar menjawab soal. Maka dari itu, jika dijalankan dengan komitmen dan integritas, TKA akan menjelma menjadi instrumen pendidikan yang bukan hanya mengukur, tetapi juga membangun. Pada akhirnya, kita tidak hanya akan mencetak siswa dengan nilai tinggi, tetapi juga generasi pemelajar seumur hidup yang mampu berpikir jernih, bertindak bijak, dan berkontribusi bagi bangsa.

TKA butuh kesungguhan semua pihak untuk mengimplementasikannya dalam pendidikan kita untuk mendorong atmosfer pembelajaran dengan penilaian yang sehat, memberdayakan, dan mendorong siswa untuk dapat berpikir logis. Itu butuh waktu untuk mewujudkannya. Kapankah kita akan serius memulainya?•

18

Tes Kompetensi Akademik dan Arah Baru Penjaminan Mutu Pendidikan*

Mohammad Nur Riantor Al Arif

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

PENDIDIKAN berkualitas bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu cepat, pendidikan menjadi fondasi utama untuk mencetak generasi yang tangguh, adaptif, dan siap bersaing di kancah global.

Namun, kualitas pendidikan Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Laporan PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis oleh OECD secara berkala

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Republika*, 6 Agustus 2025.

menunjukkan capaian yang masih memprihatinkan dalam aspek literasi, numerasi, dan sains. Di sisi lain, berbagai studi lokal pun mencatat rendahnya kompetensi guru, lemahnya implementasi kurikulum, serta tidak meratanya sumber daya pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Dalam konteks itulah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) memperkenalkan Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai bagian dari strategi penjaminan mutu pendidikan nasional. TKA menjadi instrumen baru dalam memetakan dan mengevaluasi capaian pembelajaran serta kompetensi akademik siswa dan guru secara lebih terukur, objektif, dan komprehensif.

TKA merupakan suatu asesmen berbasis standar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam bidang literasi, numerasi, serta kemampuan berpikir kritis dan reflektif.

Namun, TKA bukan sekadar ujian semacam Ujian Nasional (UN) yang telah dihapus beberapa tahun lalu. TKA akan dirancang dengan pendekatan yang lebih formatif, diagnostik, dan berorientasi pada perbaikan proses pembelajaran. Dengan demikian, TKA menjadi langkah inovatif dalam menata ulang sistem evaluasi pendidikan yang selama ini dianggap terlalu fokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses dan potensi siswa secara menyeluruh.

Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa Kemdikdasmen merasa perlu untuk meluncurkan TKA sebagai kebijakan strategis. Alasan pertama terkait dengan kebutuhan data yang lebih akurat. Selama ini, data mutu pendidikan di Indonesia sebagian besar diambil dari nilai rapor, ujian sekolah, atau hasil asesmen daerah yang cenderung tidak seragam. TKA bertujuan menyediakan data nasional yang konsisten dan terstandar sehingga dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Setelah penghapusan Ujian Nasional, banyak daerah dan sekolah kebingungan mencari instrumen penilaian yang objektif. TKA dapat menjadi jembatan yang sehat dan bukan sebagai

penentu kelulusan, melainkan sebagai alat refleksi dan evaluasi bersama. Kondisi inilah yang menjadi alasan kedua mengapa TKA harus dilakukan.

Alasan berikutnya ialah untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan TKA, guru dan sekolah akan mendapatkan umpan balik yang detail terkait capaian peserta didiknya. Hal itu diharapkan mendorong perbaikan metode pengajaran, penyusunan program remedial, hingga pengembangan kurikulum lokal yang adaptif.

Keempat, melalui TKA, pemerintah bisa memetakan secara lebih adil mana sekolah atau daerah yang tertinggal dari sisi kompetensi siswa. Intervensi seperti pelatihan guru, bantuan buku, hingga infrastruktur pendidikan dapat dilakukan secara lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Banyak masyarakat yang masih menganggap TKA sebagai pengganti terselubung dari UN. Padahal, keduanya memiliki filosofi, tujuan, dan pendekatan yang berbeda secara mendasar. Perbedaan pertama ialah terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. UN hanya mengukur hasil belajar untuk kelulusan. Adapun TKA lebih kepada mendiagnosis capaian belajar untuk perbaikan.

Perbedaan berikutnya dari sifatnya, dalam hal ini UN bersifat wajib dan seragam serta menentukan kelulusan. Adapun TKA lebih bersifat pilihan dan tidak menentukan kelulusan. Perbedaan itu menentukan pengaruhnya kepada siswa, yakni UN lebih memberikan tekanan tinggi dan menjadi momok bagi siswa. Adapun TKA lebih reflektif tanpa ancaman kelulusan.

Perbedaan berikutnya ialah dari fungsi utamanya, yakni UN lebih ke arah seleksi dan penilaian. Adapun TKA lebih ke arah pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan. Perbedaan itu penting untuk dipahami agar publik tidak salah persepsi dalam menanggapi kebijakan baru tersebut.

Meskipun tampak menjanjikan, implementasi TKA tidaklah tanpa tantangan. Beberapa kendala mungkin akan muncul di lapangan. Kendala pertama terkait dengan keterbatasan infrastruktur digital. Di beberapa daerah, masih terdapat keter-

batasan akses terhadap perangkat komputer, jaringan internet, atau listrik yang stabil. Hal itu dapat menghambat pelaksanaan TKA yang berbasis daring.

“Banyak masyarakat yang masih menganggap TKA sebagai pengganti terselubung dari UN. Padahal, keduanya memiliki filosofi, tujuan, dan pendekatan yang berbeda secara mendasar.”

Tantangan berikutnya berkenaan dengan kesiapan SDM. Guru dan tenaga kependidikan masih membutuhkan pelatihan untuk memahami teknis dan filosofi TKA. Tanpa pemahaman yang baik, TKA dapat disalahgunakan menjadi sekadar “ujian formalitas”.

Tantangan berikutnya berkenaan dengan resistensi dari masyarakat. Sebagian orang tua dan guru masih trauma dengan sistem UN. Jika tidak disosialisasikan dengan baik, TKA dapat kembali menimbulkan kecemasan dan penolakan.

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan agar TKA dapat menjadi instrumen penjaminan mutu yang efektif. Rekomendasi pertama ialah pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif dan jelas. Pemerintah harus menjelaskan secara perinci bahwa TKA bukan alat hukuman, melainkan alat bantu. Informasi itu harus sampai ke semua level, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga siswa.

Rekomendasi kedua ialah peningkatan kapasitas guru. Guru adalah garda terdepan dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah perlu menyusun modul pelatihan TKA, memberikan pendampingan, dan menyediakan komunitas belajar yang mendukung.

Rekomendasi ketiga terkait dengan pemanfaatan hasil secara bijak. Hasil TKA tidak boleh digunakan untuk memberi label negatif atau menciptakan stigma. Hasil yang didapat harus menjadi dasar untuk tumbuh bersama, bukan untuk membandingkan dan menyalahkan.

TKA adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang ditawarkan pemerintah dalam rangka membenahi sistem pendidikan nasional. Ia bukan solusi tunggal, apalagi jawaban atas semua masalah pendidikan. Namun, jika dikelola dengan baik, TKA dapat menjadi titik tolak menuju sistem yang lebih berbasis data, adaptif, dan berkeadilan.

Pendidikan yang bermutu membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Ia menuntut kolaborasi, kepercayaan, dan kesabaran. Seluruh elemen mulai dari pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapat hak yang sama untuk belajar dan berkembang.

TKA adalah arah baru. Namun, arah ini hanya akan menjadi jalan terang jika semua pihak berjalan bersama, tanpa saling curiga, tanpa merasa dipaksa, dan tanpa melupakan bahwa pendidikan adalah tentang manusia, bukan sekadar angka. •

19

Tes Kemampuan Akademik, Menumbuhkan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa*

Endang Suprpti

Dosen Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya

PENDIDIKAN Indonesia di abad ke-21 tidak hanya sekadar menuntut anak bangsa untuk menghafal dan mengerjakan soal rutin biasa. Hal ini disebabkan oleh permasalahan dunia yang semakin dinamis, kompleks, dan berbasis teknologi sehingga memerlukan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan adaptif dalam menghadapinya.

Di tengah tuntutan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai langkah strategis dalam

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Pijarnews.id*, 16 Agustus 2025.

menguatkan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan resmi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Nomor 95/M/2025 yang menetapkan bahwa TKA akan dilaksanakan secara serentak mulai November 2025 di seluruh satuan pendidikan.

TKA dirancang bukan sekadar alat seleksi seperti Ujian Nasional pada masa lalu, melainkan sebagai instrumen evaluasi yang mengukur kemampuan bernalar, menganalisis, mengevaluasi, dan berinovasi—keterampilan yang termasuk dalam *higher order thinking skills* (HOTS).

Menggeser Paradigma Evaluasi Pendidikan

Indonesia selama ini dalam sistem evaluasi hanya berfokus pada kemampuan menghafal materi, evaluasi seperti itu bersifat mengejar nilai tanpa memahami secara sungguh-sungguh dalam memahami konsep yang dipelajari. Metode yang hanya sekadar menghafal tersebut menyebabkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kurang berkembang. Kebijakan pemerintah terkait Tes Kemampuan Akademik (TKA) diharapkan dapat mengubah paradigma lama.

TKA dirancang untuk mengukur pemahaman konseptual ketika siswa diuji bukan dengan hafalan, melainkan dengan pemahaman dan penerapan konsep dalam situasi nyata. TKA diharapkan dapat mengasah keterampilan berpikir kritis, hal ini karena TKA mendorong siswa menganalisis informasi, membedakan fakta dari opini, dan menarik simpulan logis.

Selanjutnya, TKA dapat mendorong berpikir kreatif yang dalam hal ini beberapa bagian tes dirancang agar siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir orisinal dan dapat menemukan solusi baru terhadap masalah yang diberikan. TKA diberikan dengan tujuan melengkapi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang lebih dulu telah diterapkan.

Kita ketahui bahwa ANBK dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan mutu pendidikan di sekolah dan daerah melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. Jika ANBK memberikan gambaran makro tentang mutu pendidikan, TKA memberikan potret mikro tentang kemampuan akademik individu siswa.

“Indonesia selama ini dalam sistem evaluasi hanya berfokus pada kemampuan menghafal materi, evaluasi seperti itu bersifat mengejar nilai tanpa memahami secara sungguh-sungguh dalam memahami konsep yang dipelajari. Metode yang hanya sekadar menghafal tersebut menyebabkan keterampilan berpikir tingkat tinggi kurang berkembang.”

Sinergi ini penting karena hal berikut. Pertama, ANBK membantu pemerintah melihat tren dan kesenjangan mutu antarwilayah. Kedua, TKA memberikan informasi spesifik tentang kekuatan dan kelemahan setiap siswa, yang dapat dijadikan acuan guru untuk intervensi pembelajaran. Dengan kombinasi keduanya, sistem evaluasi pendidikan Indonesia menjadi lebih holistik, menggabungkan pemetaan mutu sistem dengan penilaian individual.

Menumbuhkan Berpikir Kritis dan Kreatif

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif bukanlah keterampilan yang muncul secara instan, melainkan hasil dari latihan yang berkesinambungan. TKA, jika dilaksanakan dengan

tepat, dapat menjadi stimulus penting bagi siswa untuk: (a) Berpikir Analitis—mengurai informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan memahami hubungan antarbagian tersebut; (b) Mengembangkan Ide Baru—Menemukan cara-cara unik untuk memecahkan masalah, termasuk di luar jawaban konvensional; (c) Menerapkan Pengetahuan Lintas Disiplin—Menggunakan konsep dari berbagai mata pelajaran untuk menyelesaikan tantangan yang bersifat multidimensi.

Misalnya, soal TKA dalam bidang sains tidak hanya menguji rumus, tetapi juga mengajak siswa memecahkan masalah lingkungan dengan mempertimbangkan data, etika, dan solusi teknologi yang realistis.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa TKA adalah bagian dari strategi pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan itu selaras dengan Asta Cita keempat Presiden RI, yang menekankan pembangunan sumber daya manusia unggul, berbudi luhur, dan berdaya saing.

Dengan pelaksanaan yang serentak, terstandar, dan berbasis komputer, TKA memberikan peluang yang sama bagi siswa di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Standardisasi ini penting untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi.

Namun, pemerataan bukan hanya soal memberikan tes yang sama, melainkan juga memastikan kesiapan sekolah dan guru. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan infrastruktur, pelatihan guru, dan pendampingan siswa berjalan optimal sebelum TKA dilaksanakan penuh.

Meski potensinya besar, TKA juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain (a) Kesenjangan Infrastruktur—Tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai untuk pelaksanaan tes berbasis komputer; (b) Kesiapan Guru—Guru perlu memahami model soal TKA dan cara memanfaatkan hasilnya untuk memperbaiki pembelajaran; dan (c) Budaya Belajar—Mengubah kebiasaan belajar dari hafalan menuju analisis dan kreasi membutuhkan waktu dan dukungan ekosistem yang kuat.

Menghadapi tantangan itu, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. TKA adalah tonggak baru dalam evaluasi pendidikan Indonesia. Dirancang untuk mengukur dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, TKA selaras dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, dan visi membangun generasi unggul di era global.

Jika diimplementasikan dengan tepat, TKA tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pendorong perubahan paradigma belajar. Ia dapat menjadi katalis yang menggeser pendidikan Indonesia dari sekadar mengejar nilai menuju proses pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, TKA adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa—mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di panggung dunia. •

20

Terobosan Strategis Tes Kemampuan Akademik*

Hendarman

Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikdasmen
Dosen Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor

Apakah perubahan kebijakan merupakan sebuah keharusan apabila terjadi transisi atau pergantian kepemimpinan? Apakah perubahan kebijakan harus diterima sebagai sebuah keniscayaan? Secara normatif, kebijakan yang telah ditetapkan pada saatnya perlu dicermati kembali akibat adanya perubahan yang terjadi. Hal ini dikatakan Widodo (2007) dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik”.

Perubahan tersebut dapat terjadi di lingkungan internal (*internal environment*) maupun lingkungan eksternal (*external environment*). Dampak perubahan tersebut dapat berupa yang

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Republika*, 1 Juli 2025.

dikehendaki (*intended-impact*) maupun tidak dikehendaki (*unintended-impact*). Adanya perubahan dimaksud menimbulkan dampak yang berimplikasi potensi timbulnya masalah-masalah yang mengharuskan pembuat kebijakan atau pihak yang terkait dengan kebijakan dimaksud sudah harus memikirkan langkah antisipasi atau upaya pemecahannya.

Sebuah perubahan kebijakan telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertimbangan mengapa dilakukan perubahan adalah untuk memastikan tersedianya pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara melalui penilaian terstandar. Kebijakan dimaksud dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, yang telah ditandatangani pada 28 Mei 2025, dan diundangkan di Jakarta, pada 3 Juni 2025. Tes Kemampuan Akademik (TKA) tersebut dapat diikuti murid jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Mengapa TKA

Dalam kaitan dengan penilaian terstandar, sebelum ini masyarakat umum telah mengenal bentuk penilaian lain, yaitu Asesmen Nasional (AN). AN adalah program evaluasi yang diselenggarakan pada saat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum dipecah menjadi tiga kementerian baru. AN mengukur mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Dibandingkan Ujian Nasional (UN) maka AN tidak menentukan kelulusan siswa dan lebih berfokus pada pemetaan mutu pendidikan secara keseluruhan, termasuk kualitas proses pembelajaran dan lingkungan belajar. Hasil AN digunakan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pendidikan, bukan untuk menilai individu siswa.

Asesmen Nasional menggunakan tiga instrumen utama. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Kedua, Survei

Karakter untuk mengukur sikap dan nilai-nilai yang mencerminkan Profil Pelajar Pancasila. Ketiga, Survei Lingkungan Belajar untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan, termasuk iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan. Intinya, AN bukan hanya sekadar penilaian, melainkan juga merupakan alat untuk melakukan evaluasi sistem pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Adapun tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) pada mata pelajaran tertentu. TKA diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

TKA memiliki empat tujuan. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Dalam sejumlah kesempatan, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mewajibkan murid untuk mengikutinya. Ditengarai bahwa pengalaman empiris selama ini menunjukkan bahwa tes di penghujung jenjang akademik sering kali dinilai sebagai sumber stres para murid. Atas dasar tersebut maka TKA didesain untuk mereka yang memang siap dan mampu menghadapi tes guna menambah penilaian individu saja.

Hal yang menarik adalah bahwa keputusan untuk menetapkan TKA tidak serta merta menggantikan peran asesmen nasional karena tujuan keduanya memang berbeda. Asesmen nasional wajib diikuti oleh satuan pendidikan dan bertujuan menilai capaian pembangunan pendidikan. Adapun TKA untuk mengetahui potensi dan kemampuan akademik siswa. Juga, khusus untuk kelas XII

hasil dari penilaian TKA dapat menjadi komponen penilaian pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masuk perguruan tinggi. Artinya, sistem itu tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi dapat memengaruhi (proses) ke jenjang selanjutnya.

“Ditengarai bahwa pengalaman empiris selama ini menunjukkan bahwa tes di penghujung jenjang akademik sering kali dinilai sebagai sumber stres para murid. Atas dasar tersebut maka TKA didesain untuk mereka yang memang siap dan mampu menghadapi tes guna menambah penilaian individu saja.”

Menunggu Implementasi

Masyarakat pasti menunggu bagaimana implementasi kebijakan baru ini. Mutu dari kebijakan sangat bergantung pada kebenaran mengidentifikasi masalah secara tepat dalam makna bahwa masalah yang diidentifikasi tersebut tidak sekadar benar dalam arti *plausible* atau masuk akal, tetapi juga dapat ditangani (*actionable*) ditinjau dari berbagai sarana dan kondisi yang ada dan mungkin dapat diusahakan.

Kehadiran kebijakan TKA seyogianya sudah pasti melalui tahapan analisis yang didasarkan atas keakuratan dalam mengidentifikasi masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mengukur mutu dengan penilaian standar. Itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman terdahulu seperti yang dikatakan Abidin (2006) bahwa ketepatan masalah selalu menjadi isu yang dapat diperdebatkan ketika perubahan kebijakan terjadi. •

21

TKA dan Mutu Pendidikan Kita*

Ahmad Tholabi Kharlie

Wakil Rektor bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

KEBIJAKAN pemerintah tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa sekolah terus menjadi perbincangan publik. Dalam forum bersama rektor perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia (28/7/2025) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan posisi strategis TKA sebagai kebijakan nasional untuk penguatan kualitas dan integritas pendidikan Indonesia.

Menurut Mu'ti, TKA merupakan jalan tengah antara kebutuhan akan alat ukur akademik yang objektif dan tekanan publik untuk tidak menghidupkan kembali ujian nasional. TKA sejatinya

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Detik.com*, 25 Juli 2025.

dirancang bukan sebagai ujian kelulusan, melainkan sebagai instrumen pemetaan dan penempatan.

TKA tidak menilai karakter siswa, tetapi murni memotret kompetensi akademik, dan hasilnya menjadi referensi penting baik bagi sekolah, perguruan tinggi, maupun pemerintah dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Di tengah dinamika perubahan pendidikan yang terus bergulir, kehadiran TKA yang dimotori oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) patut dipahami bukan sekadar kebaruan kebijakan. Lebih dari itu, TKA merupakan artikulasi dari kebutuhan mendasar sistem pendidikan nasional untuk meneguhkan kembali prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengukuran capaian akademik siswa.

Dalam lanskap pendidikan kita, penilaian akademik selama ini kerap dibelenggu oleh homogenitas nilai rapor yang nyaris seragam, kendati realitas kompetensi siswa sangat variatif sebagaimana terpotret dari hasil UN, Asesmen Nasional, hingga UTBK.

Fenomena itu menunjukkan adanya ketimpangan antara representasi nilai dalam rapor dan pencapaian riil siswa yang diukur secara eksternal. Dalam konteks ini, TKA hadir sebagai solusi untuk menutup jurang tersebut melalui asesmen terstandar berbasis komputer yang bersifat eksternal.

Tentu, TKA bukanlah upaya menggantikan penilaian satuan pendidikan. Ia hanya bersifat melengkapi. Dalam semangat ini, TKA mengingatkan kita pada gagasan klasik dari Benjamin Bloom (1956) yang menyatakan bahwa asesmen merupakan bagian integral dari pembelajaran, bukan sekadar pengukur hasil.

Asesmen yang baik bukan hanya mengukur apa yang siswa tahu, melainkan juga memberi umpan balik bagi guru dan sistem untuk memperbaiki proses belajar.

Dengan pilihan mata pelajaran wajib, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan dari berbagai disiplin ilmu, TKA tidak hanya menguji pengetahuan dasar, tetapi juga memberi ruang bagi pemetaan potensi akademik yang lebih spesifik.

Ini sejalan dengan prinsip *multiple intelligences* yang dikemukakan Howard Gardner (1989) bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda dan memerlukan ruang untuk diekspresikan secara adil.

Hal yang menarik, posisi TKA dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi bukan sebagai substitusi SNBP atau SNBT, melainkan sebagai validator nilai rapor. Dalam skema SNBP yang selama ini sangat bergantung pada penilaian internal sekolah, kehadiran TKA dapat menjadi penyeimbang sekaligus penguat objektivitas. Hal itu mengingatkan pada gagasan Thomas R. Guskey (2003) bahwa asesmen harus memiliki integritas dan keadilan demi menjamin kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

“Dalam lanskap pendidikan kita, penilaian akademik selama ini kerap dibelenggu oleh homogenitas nilai rapor yang nyaris seragam, kendati realitas kompetensi siswa sangat variatif sebagaimana terpotret dari hasil UN, Asesmen Nasional, hingga UTBK.”

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa dalam jalur prestasi, nilai rapor tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan, melainkan akan divalidasi oleh hasil TKA sebagai bentuk asesmen akademik yang sah dan berstandar nasional (5/3/2025). Mu'ti menegaskan bahwa TKA bersifat tidak wajib dan bukan penentu kelulusan, tetapi alat bantu untuk meningkatkan objektivitas seleksi serta menguatkan ekosistem asesmen nasional.

Dalam jangka panjang, data TKA yang diintegrasikan ke sistem Satu Data Nasional dan SNBP dapat menjadi sumber informasi penting bagi pengambil kebijakan, baik untuk perbaikan kurikulum, pengembangan guru, maupun strategi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. TKA, dalam hal ini, bukan hanya alat ukur individual, melainkan bagian dari *quality assurance* sistemik yang bersifat kolektif.

Lebih jauh, TKA merepresentasikan pergeseran penting dalam paradigma evaluasi pendidikan, yakni dari sistem *assessment of learning* menuju *assessment for learning*. Dengan adanya Sertifikat Hasil TKA (SHTKA) yang dapat diakses oleh siswa dan sekolah, proses evaluasi menjadi lebih transparan dan reflektif. Siswa tidak hanya mengetahui posisinya, tetapi juga dapat merancang langkah perbaikan secara mandiri.

Namun, di balik keunggulannya, implementasi TKA tetap menuntut kehati-hatian. Skema pelaksanaan daring dan semidaring, sistem pengawasan silang, hingga rekrutmen penyelia dari perguruan tinggi, menjadi aspek krusial yang perlu dijaga integritasnya. Sebab, sebagaimana dikemukakan Pasi Sahlberg (2011), pakar pendidikan asal Finlandia, integritas sistem pendidikan tidak hanya dibangun oleh kurikulum dan asesmen, tetapi oleh kepercayaan antarpemangku kepentingan.

Instrumen Dialog

Dalam konteks seleksi mahasiswa baru, TKA berperan penting sebagai penyeimbang antara penilaian internal sekolah dan kebutuhan perguruan tinggi atas data akademik yang lebih terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) selama ini mengandalkan nilai rapor sebagai komponen utama, tetapi kerap dipersoalkan karena sifatnya yang sangat bergantung pada kebijakan dan kultur asesmen tiap-tiap sekolah.

Di sinilah TKA hadir sebagai instrumen yang mampu memberikan dimensi objektivitas, yang tidak hanya memperkuat akurasi seleksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses masuk ke perguruan tinggi negeri.

Posisi perguruan tinggi dalam kerangka ini tidak sekadar sebagai pengguna hasil TKA, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjamin kredibilitas sistem. Keterlibatan PTN dalam penyediaan pelaksanaan TKA, sebagaimana dirancang oleh BSKAP Kemdikdasmen, telah menciptakan ruang kolaborasi sangat baik.

Dengan memantau langsung ruang-ruang ujian, perguruan tinggi ikut memastikan bahwa proses asesmen berlangsung adil dan bebas dari manipulasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *quality assurance* pendidikan tinggi yang selama ini menjadi fokus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sinergi ini tentu tidak akan berjalan efektif tanpa konsolidasi kelembagaan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Sebagai dua poros yang selama ini bekerja dalam ritme masing-masing, keduanya dituntut membangun sistem komunikasi kebijakan yang terintegrasi, utamanya dalam perumusan standar asesmen, pengolahan data akademik, dan pengambilan kebijakan strategis lintas jenjang.

Konsolidasi ini niscaya akan memperkuat keberlanjutan kebijakan TKA serta menjamin bahwa *output* pendidikan menengah selaras dengan kebutuhan dan standar dunia pendidikan tinggi.

Lebih jauh, integrasi TKA ke dalam ekosistem seleksi mahasiswa baru mencerminkan kebutuhan akan sistem pendidikan nasional yang tidak fragmentaris. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi semestinya terhubung dalam satu ekosistem yang menjunjung tinggi prinsip *equity, excellence, dan transparency*.

Dalam skema seperti itu, TKA menjadi titik temu antara hulu dan hilir pendidikan nasional, yang saling menyapa dan mengoreksi, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Maka dari itu, ketika TKA mulai diimplementasikan secara nasional pada November 2025 nanti, kita berharap kehadirannya tidak semata-mata disambut sebagai kebijakan teknokratik, tetapi sebagai *landmark* perubahan paradigma dalam penilaian pendidikan. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita ajarkan, tetapi juga bagaimana kita mengukur dan merespons hasilnya secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. •

22

Tes Kemampuan Akademik untuk Semua*

Wiguna Yuniarsih

Wakil Kepala SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

DALAM kehidupan, setiap insan pasti mengalami ujian dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ujian itu dapat datang dengan sendirinya, seperti kecelakaan yang menyebabkan sakit, bahkan meninggal dunia. Boleh juga ujian yang memang telah disiapkan sebelumnya, seperti ujian masuk sekolah, ujian kelulusan sekolah, ujian masuk kerja, ujian kenaikan pangkat/karier, dan sebagainya.

Perbedaan antar-setiap ujian atau tes terletak pada ruang lingkup dan tujuan penggunaannya. Dalam proses belajar mengajar, sistem penilaian diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses, hasil, dan prestasi akademik. Pada akhirnya, ini menjadi sebagai

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Republika Online*, 30 Juni 2025.

bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu teknik penilaian yang sering digunakan lembaga pendidikan adalah tes. Menurut Suryabrata (1987), tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan.

Orang yang diuji mesti menjawab pertanyaan atau melakukan perintah-perintah yang ada. Adapun penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau peserta (*testee*) lainnya.

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan (Arikunto, 2008). Adapun menurut Chaplin (2005), tes adalah satu perangkat pertanyaan yang sudah dibakukan, yang dikenakan pada seseorang dengan tujuan mengukur perolehan atau bakatnya dalam suatu bidang tertentu.

Tes pada umumnya dimaksudkan untuk mengukur aspek-aspek perilaku manusia, baik kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Bidang kognitif diukur melalui uji tes, sedangkan afektif diukur melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Adapun bidang psikomotor diukur melalui perbuatan dan pengamatan (Naga, 1992).

Dengan demikian, tanpa adanya tes, penyelenggara pendidikan akan sulit mengukur dan mengetahui secara objektif kemampuan dan keterampilan peserta didiknya. Apabila tes tidak dilakukan, prestasi dan kelulusan pun akan sulit pula ditentukan.

Fungsi Tes Belajar

Ebel (1991) menjelaskan fungsi tes prestasi belajar, yakni (1) mengukur keberhasilan siswa dalam belajar, (2) membantu guru dan instruktur dalam membuat nilai yang akurat dan bermakna, serta (3) memotivasi dan mengarahkan siswa dalam belajar.

Peserta didik akan cenderung belajar lebih giat apabila akan mengikuti tes. Mereka belajar lebih serius pada mata pelajaran yang akan diujikan pada saat berlangsungnya tes.

Agar fungsi tes dapat terpenuhi, ia pun mesti memenuhi syarat dan ketentuan. Suryabrata (2006) mengemukakan syarat-syarat tes yang baik. Pertama, tes harus valid. Artinya, tes tersebut hanya mengukur satu aspek atau satu domain sehingga tepat mengukur apa yang hendak diukur.

Kedua, tes harus reliabel, yakni ajek atau konsisten. Ketiga, tes harus standar. Artinya, setiap peserta (*testee*) harus mendapat perlakuan yang sama, baik mengenai materi, penyelenggaraan, pemberian skor, maupun interpretasi hasil tes. Alhasil, seorang *testee* yang mendapat skor tertentu di suatu tempat akan mendapat skor yang sama di tempat lain.

Keempat, tes harus objektif. Penilaian yang dilakukan oleh pemberi tes (*tester*) yang satu dengan yang lain akan sama untuk satu *testee*. Kelima, tes harus bersifat diskriminatif. Artinya, tes harus dapat mengungkapkan perbedaan suatu gejala yang terdapat pada setiap diri individu.

Tes Kemampuan Akademik

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) RI Nomor Nomor 9 tahun 2025, dijelaskan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Ini diselenggarakan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan dan akuntabilitas.

Beleid itu juga mengemukakan tujuan-tujuan TKA. Pertama, memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar.

Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Keempat,

memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Adapun mata uji TKA untuk SD/MI/program paket A/ sederajat dan SMP/MTs/program paket B/ sederajat terdiri atas Bahasa Indonesia dan Matematika. Sementara itu, mata uji TKA untuk SMA/MA/program paket C/ sederajat dan SMK/MAK terdiri atas Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan.

“Peserta didik akan cenderung belajar lebih giat apabila akan mengikuti tes. Mereka belajar lebih serius pada mata pelajaran yang akan diujikan pada saat berlangsungnya tes.”

Hasil TKA disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaian TKA yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Hasil itu di semua jenjang pendidikan dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru ke jejang berikutnya melalui jalur prestasi. Itu pun dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Hasil TKA digunakan untuk menyetarakan hasil pendidikan nonformal dan pendidikan informal dengan hasil pendidikan formal. Bagi pemerintah, hasil TKA dapat digunakan sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, TKA dapat diikuti oleh murid dari berbagai jalur pendidikan formal, nonformal, serta informal. Peserta akan memperoleh nilai dan kategori capaian yang ditetapkan secara nasional, dan bagi peserta dari jalur formal maupun nonformal, hasil ini akan disertai dengan sertifikat resmi.

TKA menjamin hak setiap murid untuk menunjukkan prestasinya tanpa diskriminasi dan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menjamin mutu pendidikan yang adil, terstandar, dan inklusif.

Pada tahun 2025, TKA baru akan dilaksanakan bagi siswa kelas XII SMA dan kelas akhir SMK. Adapun untuk jenjang SD dan SMP, TKA dimulai pada tahun 2026.

Hasil TKA akan menjadi referensi dalam seleksi akademik lainnya dan menjadi alat kendali mutu pendidikan oleh Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) RI sebagai penyelenggara pendidikan di bidang agama. Pemerintah daerah pun menggunakan hasil TKA ini.

Kita berharap, semoga kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem penilaian pendidikan nasional. Harapannya, TKA tidak hanya menjamin kualitas, tetapi juga membuka ruang kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. •

Bagian III

Terobosan Koding dan Kecerdasan Artifisial

Kemendikdasmen, 2025



23

AI dan Masa Depan Pendidikan*

Siti Murtiningsih

Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

TANTANGAN teknologi kecerdasan buatan (AI) terhadap dunia pendidikan mulai dirasakan sangat masif ketika AI generatif tersedia untuk publik. Para pendidik pusing bagaimana mengevaluasi tugas siswa/mahasiswa saat mereka dapat dengan mudah menjawab soal atau menyusun esai dengan bantuan AI generatif, seperti ChatGPT dan Google Bard.

Selain itu, pentingnya kehadiran guru/dosen di kelas mulai dipertanyakan mengingat siswa/mahasiswa kini sudah dapat bertanya apa saja pada mesin AI generatif. Bahkan, kini sudah muncul ide untuk mengganti kehadiran guru di kelas dengan robot yang dilengkapi dengan sistem AI (Bushweller, 2020).

*Artikel ini telah dipublikasi di *Kompas*, 2 Mei 2024.

Ukuran pasar teknologi AI di sektor pendidikan juga semakin meningkat. Dari 363,7 juta dollar AS (2020) menjadi 556,9 juta dollar AS (2021) (Grand View Research). Peningkatan sangat fantastis terjadi pada 2022, mencapai 2,5 miliar dollar AS. Ukuran pasar AI itu diprediksi terus meningkat dan diperkirakan 88,2 miliar dollar AS pada 2032 (Allied Market Research).

Aplikasi AI di sektor pendidikan yang pasar paling besar adalah platform pembelajaran dan fasilitator virtual dan diikuti oleh sistem tutor cerdas (*intelligent tutoring system*). Keduanya bersentuhan langsung dengan peran krusial yang selama ini dimainkan guru/dosen. Sistem tutor cerdas, misalnya, benar-benar melakukan apa yang secara umum dilakukan guru/dosen selama ini: memberikan instruksi dan umpan balik bagi siswa/mahasiswa.

Melihat perkembangan ini, kita perlu memikirkan ulang masa depan pendidikan di era AI. Pendidikan itu hendak diarahkan ke mana?

Sejumlah aplikasi AI di sektor pendidikan, seperti fasilitator virtual dan sistem tutor cerdas, banyak bergantung pada sistem AI generatif dan, lebih spesifik, pemroses bahasa alamiah. Sistem itu memang merupakan jenis AI yang didesain dengan pendekatan tes Turing (Russell & Norvig, 2022: 19).

Kategori cerdas pada sistem itu didasarkan pada ketakterbedaannya dengan perilaku manusia. Saat sebuah sistem mampu berperilaku dengan cara yang tak dapat dibedakan lagi dari manusia, berarti ia adalah sebuah sistem yang cerdas.

Kecanggihan sistem AI itu mampu memberikan sejumlah manfaat bagi pendidik sendiri. Selama ini sering muncul keluhan tentang beban administratif yang berlebihan. Dengan hadirnya teknologi AI, beban administratif pendidik harusnya dapat dikurangi, bahkan ditiadakan sama sekali dengan dialihbankan sepenuhnya ke mesin.

Laporan dan perencanaan kegiatan pembelajaran, misalnya, dapat dialihbankan pada sistem teknologi AI. Para dosen tak perlu dituntut membuat pedoman beban kerja dosen (BKD) dan lembar kinerja dosen (LKD) tiap semester. Semua sudah terekam

secara otomatis di sistem. Dengan demikian, mereka dapat fokus pada pengembangan diri dan pembaruan bahan ajar terus-menerus.

Selain dampak positif, teknologi AI juga menghadirkan beberapa tantangan bagi dunia pendidikan. Misalnya AI generatif membuat pendidik bingung bagaimana mengevaluasi hasil pekerjaan siswa/mahasiswa. Mereka akan sulit membedakan apakah itu hasil pekerjaan manusia atau mesin. Oleh karena itu, perlu reorientasi pendidikan pada era AI ini.

Menurut Priten Shah (2023: 32), pendidikan masa kini dan masa depan seharusnya tak didesain untuk menciptakan "generator", tetapi untuk melahirkan "evaluator". Generator memiliki keterampilan menghasilkan sesuatu, yang dalam tahap tertentu kini sudah dapat diganti oleh teknologi AI. Evaluator memiliki keterampilan untuk menilai sesuatu secara tepat. Untuk memiliki keterampilan itu, perlu sejumlah keterampilan lain, seperti keterampilan berpikir kritis dan analitis.

Pendidikan masa depan, dengan bantuan AI, harus dikembalikan pada tujuan asalnya: mendidik manusia menjadi manusia, bukan melatih manusia menjadi pekerja. Dengan demikian, orientasi pendidikan masa depan seharusnya bukan lagi untuk melahirkan generasi yang bisa membuat sesuatu, melainkan generasi yang bisa mengevaluasi sesuatu secara tepat. Keterampilan teknis seharusnya tak lagi menjadi orientasi utama pendidikan.

Evaluator selalu berpikir dalam kerangka normatif: apa yang baik/buruk atau apa yang seharusnya ada/tidak ada. Dalam banyak percakapan publik, berpikir normatif memiliki makna peyoratif. Ia sering dipahami sebagai cara berpikir yang sekadar berdasarkan pada norma yang sudah jelas. Jika norma yang diterima mengatakan A itu buruk, seseorang yang berpikir normatif akan mengatakan A itu buruk. Seolah tidak ada aktivitas berpikir sama sekali dalam cara berpikir normatif.

Namun, bukan cara berpikir dangkal semacam itu yang dimaksud berpikir normatif seorang evaluator. Apa yang baik/buruk tak selalu jelas dengan sendirinya atau ternyata secara

eksplisit dalam norma. Karena itu, menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk tak pernah mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

“Masifnya AI generatif membuat pendidik bingung bagaimana mengevaluasi hasil pekerjaan siswa/mahasiswa. Mereka akan sulit membedakan apakah itu hasil pekerjaan manusia atau mesin. Oleh karena itu, perlu reorientasi pendidikan pada era AI ini.”

Selain itu, nilai baik/buruk bukan kategori biner *all-or-nothing*, yang mengandaikan jika sesuatu itu baik, mutlak baik dan jika sesuatu itu buruk, mutlak buruk. Nilai baik/buruk itu bersifat gradual. Ada spektrum kebaikan-keburukan dan, karena itu, ada kasus tengah-tengah (*borderline case*) antara baik dan buruk.

Karena itu, berpikir normatif sebenarnya tak pernah mudah kecuali mengasumsikan kebaikan/keburukan adalah kategori biner *all-or-nothing*. Namun, asumsi demikian justru akan menjauhkan kita dari kenyataan. Apa yang kita temui di kenyataan hidup tidak selalu merupakan sesuatu yang mutlak baik atau mutlak buruk.

Oleh karena itu, untuk menjadi evaluator diperlukan keterampilan khusus, keterampilan filosofis. Itu mencakup keterampilan kognitif dan emotif, mulai dari berpikir kritis, analitis, kreatif, dan imajinatif, hingga kemampuan untuk peka dan berempati pada orang lain.

Dengan sepaket keterampilan filosofis itu, manusia masa depan dapat menavigasi hidupnya di tengah-tengah mesin bertenaga AI. Ia tak akan menjadi manusia yang diperbudak mesin. Dengan demikian, masa depan pendidikan sebenarnya bertumpu pada filsafat. Jika pendidikan tetap diinginkan menjadi suatu proses sosial yang relevan dan bernilai, ia harus diarahkan pada tujuan untuk mendidik manusia yang memiliki kecerdasan evaluatif, suatu kecerdasan yang berguna untuk hidup bersama dengan entitas cerdas nonmanusia.●

24

Saatnya Anak Indonesia Belajar Menari dengan AI*

Toni Toharudin

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung

APAKAH sekolah yang hanya mengandalkan buku, papan tulis, dan hafalan masih relevan pada abad ke-21? Pertanyaan itu harus kita jawab dengan jujur. Dunia telah berubah terlalu jauh. Mesin kini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga mampu menulis esai, menyusun kode, bahkan menciptakan karya seni yang memenangkan lomba. Jika anak-anak kita masih dididik dengan cara lama, mereka tidak sekadar tertinggal, tetapi juga berisiko kehilangan masa depan.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Jawa Pos*, 24 September 2025.

Realitas itu sudah nyata di hadapan kita. Stanford AI Index 2024 melaporkan, lebih dari 67 persen mahasiswa global menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas akademik. Di Indonesia, survei internal menunjukkan, 73 persen mahasiswa telah mencoba teknologi AI generatif. Namun, hanya 12 persen yang memahami penggunaannya secara etis dan produktif. Angka itu menunjukkan jurang yang berbahaya. Anak-anak sudah masuk ke dalam arus besar AI, sementara sistem pendidikan kita masih tertatih untuk menyiapkan panduan dan pagar etis agar mereka mampu menunggangi gelombang perubahan itu.

Berubah Cepat

McKinsey Global Institute memperkirakan, 375 juta pekerja dunia harus dilatih ulang pada 2030. World Economic Forum menambahkan, separuh pekerja global membutuhkan peningkatan keterampilan hanya dalam lima tahun. Apa yang lebih mengejutkan, 85 persen pekerjaan yang akan digeluti lulusan 2030, bahkan belum tercipta hari ini.

Di Indonesia, tanda-tanda perubahan itu sudah jelas. Bank besar menggunakan AI untuk menilai kelayakan kredit, rumah sakit mengandalkan AI dalam diagnosis, dan usaha kecil menengah memanfaatkan chatbot untuk melayani pelanggan dan mengatur inventori. Dunia kerja bukan lagi sekadar digital, melainkan kolaboratif antara manusia dan mesin. Karena itu, pembelajaran koding dan literasi AI harus segera dijadikan bekal wajib bagi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi generasi yang kehilangan arah.

Dari Hafalan ke Kreativitas

Selama puluhan tahun, pendidikan kita lebih banyak mengajarkan cara menghafal. Namun, hafalan tidak lagi menjadi keunggulan. GPT-4 mampu lulus ujian hukum dengan nilai di atas mayoritas calon pengacara. Model AI lain menulis kode lebih baik dari

sebagian besar pemula. Bahkan, karya seni berbasis AI telah memenangkan kompetisi internasional.

Namun, mesin tetap tidak mampu menggantikan sisi kemanusiaan. AI tidak mampu memahami kearifan lokal, mengambil keputusan etis dalam dilema yang rumit, atau membangun empati dan inspirasi. Maka dari itu, pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk menguasai teknologi, tetapi untuk melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan bijaksana. Anak-anak kita harus diajari menggunakan AI sebagai mitra, bukan sebagai pengganti sehingga mereka dapat menari bersama teknologi alih-alih terhanyut olehnya.

"Koding dan literasi AI harus segera dijadikan bekal wajib bagi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi generasi yang kehilangan arah."

Kebijakan Pendidikan

Menyadari tantangan besar itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menempatkan koding dan kecerdasan artifisial sebagai kompetensi dasar dalam kurikulum. Sejak sekolah dasar, siswa diperkenalkan pada cara berpikir komputasional. Di tingkat menengah, mereka belajar koding kreatif dan pemrograman sederhana. Sementara itu, di sekolah menengah kejuruan dan pendidikan vokasi, pembelajaran diarahkan pada literasi AI sesuai dengan kebutuhan industri.

Kebijakan itu memastikan bahwa koding dan AI bukan sekadar tambahan, tetapi bagian dari bahasa baru pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, seorang murid di Papua dapat membuat animasi pembelajaran dengan menggunakan asisten AI, di pihak lain seorang anak di Sabang dapat belajar matematika dari tutor digital setara profesor MIT. AI membuka peluang besar bagi pemerataan pendidikan dan memberi kesempatan Indonesia untuk melompat lebih cepat, tidak hanya mengekor negara maju.

Guru Sebagai Koreografer

Di tengah derasnya perkembangan teknologi, guru dan dosen tidak akan pernah tergantikan. Justru peran mereka menjadi semakin penting. Guru adalah arsitek pembelajaran yang merancang pengalaman bermakna, pelatih berpikir kritis yang mendorong siswa untuk bertanya, pembimbing etis yang mengarahkan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab, sekaligus katalis inovasi yang menumbuhkan kreativitas.

Guru adalah koreografer tarian baru pendidikan. Mereka yang menentukan bagaimana anak-anak Indonesia belajar menari bersama AI dengan indah, penuh makna, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Indonesia Emas 2045

Visi besar kita adalah Indonesia Emas 2045. Kita membayangkan setiap siswa memiliki pendamping belajar berbasis AI yang memahami gaya belajarnya. Setiap guru mampu mengorkestrasi pembelajaran yang transformatif. Setiap sekolah menjadi pusat inovasi yang menyelesaikan masalah lokal dengan solusi global. Semua itu bukan mimpi kosong, melainkan target yang dapat dicapai apabila kita konsisten menempatkan coding dan AI sebagai bekal wajib generasi emas.

Revolusi AI dalam pendidikan bukan tentang manusia melawan mesin, melainkan tentang kolaborasi yang membuat manusia lebih kreatif, lebih empatik, dan lebih bijaksana. Seperti pepatah Sunda, *"Hirup mah ulah saukur ngindung ka usum, ngabapa ka jaman."* Hidup jangan hanya ikut musim, tetapi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kini, perkembangan itu adalah AI. Maka dari itu, tugas kita adalah menuntun anak-anak agar mampu menyesuaikan diri, belajar menari bersama AI, dan menjadi penentu irama masa depan bangsa.

Saatnya anak Indonesia belajar menari dengan AI. Bukan sebagai penonton yang pasif, melainkan sebagai penentu irama yang akan menggiring bangsa ini menuju masa depan lebih cerah. •

25

Pelajaran Koding: Inovasi Masa Depan atau Beban Baru?*

Ananda

Dosen Program Studi Teknik Informatika
dan Magister Terapan Teknik Komputer, Politeknik Caltex Riau

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana memperkenalkan pembelajaran Pemrograman (sering disebut dengan istilah koding) dan AI (*artificial intelligence*) sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah dasar mulai tahun ajaran 2025-2026.

Langkah tersebut ditenggarai bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital yang semakin kompleks. Muncul pertanyaan penting: Mengapa anak-anak kita perlu mempelajari

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 11 Februari 2025.

keterampilan ini sejak dini, dan bagaimana perubahan ini akan memengaruhi masa depan Indonesia?

Urgensi

Di dunia yang berkembang pesat saat ini, literasi digital menjadi sama pentingnya dengan membaca dan menulis. Kemampuan untuk memprogram penggunaan komputer dan AI tidak hanya alat bagi para insinyur perangkat lunak, tetapi juga keterampilan fundamental yang akan membentuk masa depan pekerjaan, bisnis, dan inovasi.

Pasar kerja global sedang bergeser menuju otomatisasi, pembelajaran mesin, dan pengambilan keputusan berbasis data. Negara-negara Asia, seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan China, telah lama mengintegrasikan pemikiran komputasional ke dalam sistem pendidikan mereka, memastikan generasi mudanya siap bersaing dalam ekonomi digital.

Situasi pandemi Covid-19 pun mempercepat penetrasi teknologi informasi ke masyarakat luas. Hal itu harus diimbangi dengan literasi keterampilan pengembangan produk digital sehingga tidak hanya menjadi pengguna, tetapi memiliki andil sebagai pengembang dan kontributor.

Dengan memperkenalkan mata pelajaran ini sejak dini, siswa Indonesia diharapkan mampu semakin mengembangkan pemikiran logika, keterampilan pemecahan masalah, dan kreativitas. Mempelajari cara kerja AI juga mengajarkan pertimbangan etis, membantu generasi mendatang menghadapi tantangan otomatisasi dan misinformasi.

Mengapa Dibutuhkan?

Indonesia memiliki ekonomi digital yang berkembang pesat. Dengan populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, ekonomi digital Indonesia, menurut situs indonesia.

go.id, saat ini bernilai 90 miliar dollar AS dan diproyeksikan mencapai 130 miliar dollar AS pada 2025.

Namun, negara ini masih menghadapi kesenjangan keterampilan digital. Banyak perusahaan kesulitan menemukan karyawan yang mahir dalam koding dan AI sehingga terpaksa merekrut tenaga kerja asing.

“Pasar kerja global sedang bergeser menuju otomatisasi, pembelajaran mesin, dan pengambilan keputusan berbasis data. Negara-negara Asia, seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan China, telah lama mengintegrasikan pemikiran komputasional ke dalam sistem pendidikan mereka, memastikan generasi mudanya siap bersaing dalam ekonomi digital.”

Selain itu, industri berbasis AI berpotensi menggantikan banyak pekerjaan tradisional. Data hasil survei yang diselenggarakan secara global oleh penyedia layanan pendidikan daring Coursera berjudul *2024 Global Skills Report* menampilkan bahwa di Indonesia, *top skills* yang dikejar oleh pemelajar daring pada platform adalah *Artificial Neural Networks* (dalam bahasa lainnya bisa dikata sebagai AI), *Applied Machine Learning*, *Computer Graphics Techniques*. Itu sebagai tiga teratas *skills* yang ingin diasah. Pada laporan yang sama, pemelajar menarget pekerjaan-pekerjaan seperti *Cloud Security Engineer*, *Network Engineer*, dan *Operation Manager* sebagai *top target roles* yang dituju.

Banyak perusahaan kesulitan menemukan karyawan yang mahir dalam koding dan AI sehingga terpaksa merekrut tenaga kerja asing.

Laporan terbaru yang dirilis pada World Economic Forum bertajuk *Future of Jobs Report 2025-Insight Report January 2025* melaporkan bahwa kemajuan transformatif, terutama dalam kecerdasan buatan generatif (generative AI/gen-AI), tengah merevolusi berbagai industri dan pekerjaan di semua sektor.

Laporan itu menunjukkan perkembangan teknologi ini juga menghadapi tantangan yang lebih luas, seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan dalam dinamika geoekonomi, permasalahan lingkungan, serta ekspektasi sosial yang terus berubah.

Temuan mereka seperti perluasan akses digital dan meningkatnya biaya hidup sehingga membuat konsumen mengimplementasikan gaya hidup yang lebih 'hemat,' 'berkelanjutan,' dan ramah lingkungan; perubahan pasar tenaga kerja yang didorong oleh preferensi kerja yang jauh berbeda pada generasi sekarang; serta *aging population* yang menuntut peran besar teknologi dalam membantu kehidupan keseharian mereka. Hal itu memerlukan perhatian bahwa saat ini Indonesia menuju populasi generasi produktif yang besar dan perlu dipersiapkan mengambil peran besar dalam perkembangan dunia ke depan.

Dengan mempersiapkan siswa sejak dini, kita memastikan mereka tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga pencipta dan inovator yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia daripada tertinggal.

Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing global dengan mengintegrasikan koding dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pendidikan. Kesiapan tenaga kerja menjadi salah satu keuntungan utama, yang dalam hal ini siswa yang terlatih dalam bidang itu akan lebih siap menghadapi tantangan karier masa depan.

Selain itu, dorongan terhadap inovasi dan startup menjadi lebih kuat karena semakin banyak individu yang memiliki keterampilan teknis untuk membangun bisnis berbasis teknologi, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, serta mempercepat perkembangan inovasi lokal.

Tidak hanya itu, pengenalan koding dan AI dalam kurikulum juga berperan dalam menjembatani kesenjangan digital, memung-

kinkan anak-anak dari berbagai latar belakang untuk memperoleh keterampilan yang semakin relevan di era digital.

Bahkan, bagi mereka yang tidak berkarier di bidang teknologi, pemahaman koding tetap memberikan manfaat signifikan dengan melatih pemikiran logis dan pemecahan masalah secara terstruktur, yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang profesi.

Dengan berbagai manfaat ini, Indonesia dapat membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan progresif, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta memperkuat posisinya di panggung global.

Tantangan dan Risiko

Meskipun integrasi koding dan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan menawarkan banyak keuntungan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kesiapan sekolah dan guru, terutama di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan sumber daya, akses internet, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidang ini.

Selain itu, beban kurikulum yang sudah padat menjadi tantangan tersendiri karena penambahan mata pelajaran baru dapat meningkatkan stres siswa dan mengurangi fokus mereka pada bidang lain yang juga penting. Tidak hanya itu, ada pula risiko kebergantungan teknologi sejak dini, yang dalam konteks ini penggunaan perangkat dan AI secara berlebihan dianggap dapat menghambat perkembangan kecerdasan sosial serta emosional anak.

Tantangan lainnya adalah aspek etika dan keamanan, yakni tanpa adanya pedoman yang jelas, siswa berpotensi menyalahgunakan teknologi, baik dalam bentuk pelanggaran privasi data maupun penggunaan AI untuk tujuan yang tidak etis. Risiko itu semakin besar jika kesadaran akan dampak teknologi tidak ditanamkan sejak dini. Oleh karena itu, agar implementasi koding dan AI dalam pendidikan berjalan efektif, diperlukan perencanaan matang, peningkatan kapasitas guru, serta regulasi yang dapat

meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan manfaatnya bagi masa depan Indonesia.

Implementasi yang Bijaksana

Pengintegrasian koding dan AI ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah bertujuan menyiapkan anak-anak Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat global. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan yang matang.

Kemendikbudristek (nama kementerian saat itu sebelum dipecah menjadi tiga kementerian) sepanjang 2020-2022 telah memberikan bantuan satu juta perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada lebih dari 70.000 sekolah untuk mendukung program digitalisasi seperti yang diberitakan artikel daring tanggal 11 September 2022 oleh kantor berita VOA Indonesia.

Rencana penambahan pelajaran-pelajaran baru ini membuat pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program koding dan AI, termasuk sosialisasi, subsidi pelatihan guru, dan pembelian perangkat teknologi.

Dengan persiapan yang tepat dan komitmen bersama, integrasi koding dan AI dalam kurikulum dapat menjadi langkah strategis untuk memajukan pendidikan Indonesia dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan pada era digital.

Pada akhirnya, mengintegrasikan koding dan AI ke dalam kurikulum sekolah tidak hanya tentang mengikuti tren global—ini tentang mengamankan posisi Indonesia dalam ekonomi masa depan. Jika dilakukan dengan benar, kebijakan itu dapat menjadi *game-changer*, membekali generasi muda kita dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berkembang di dunia digital yang semakin maju.

Pertanyaan sesungguhnya adalah: Apakah orang Indonesia siap untuk mengambil lompatan besar ini?•

26

Mana yang Lebih Penting, Literasi atau Koding?*

Ifah Hanifah Misbach

Psikolog dan Dosen Prodi Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia

APAKAH koding dan kecerdasan buatan perlu diajarkan sejak di tingkat sekolah dasar? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin menerapkan pelajaran koding sejak di tingkat sekolah dasar sebagai bagian dari gagasan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Gibran ingin agar generasi muda Indonesia menguasai sejumlah keahlian di bidang kecerdasan buatan, koding, termasuk mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkenalkan pelajaran Matematika di tingkat taman kanak-kanak.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 5 Desember 2024

Bukan hal baru

Pernyataan Gibran tersebut sebenarnya sudah sangat terlambat, seolah koding merupakan hal baru di dunia pendidikan. Umumnya, koding dipahami sebagai penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman komputer. Proses koding harus mengikuti aturan sintaks yang dapat dipahami komputer, diibaratkan seperti bahasa sehari-hari atas perintah yang diberikan oleh programmer.

Komputer merupakan mesin yang hanya mampu menjalankan perintah sesuai dengan aturan sintaks yang telah ditentukan. Kesalahan kode pada aturan sintaks dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan perintah oleh komputer.

Jika pengertian koding hanya diartikan sempit terkait teknologi, hal ini tidak akan membawa pada pemahaman mendalam bahwa di balik koding diperlukan keterampilan cara berpikir manusia yang justru ditiru komputer. Keterampilan berpikir itu mengacu pada cara berpikir komputasional (*computational thinking*) yang saling melengkapi dengan keterampilan memecahkan masalah (*problem solving*).

Sejarah cara berpikir komputasional dimulai oleh Papert (1996) di Departemen Matematika Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang mengenalkan “cara berpikir prosedural” pada komputer.

Ia mengklaim bahwa pemikiran komputasional dapat digunakan untuk mencari pola hubungan antara suatu masalah berdasarkan penataan data dan mengembangkan bahasa pemrograman bernama Logo pada 1960. Logo adalah bahasa pemrograman yang mengolah aktivitas pembelajaran individual. Tujuannya untuk membantu siswa dapat berpikir secara matematis dan logis.

Menurut Jeannete (2011), cara berpikir komputasional adalah metode untuk menyelesaikan masalah ketika otak dilatih berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Cara kerja komputasional ditandai empat hal.

Pertama, dekomposisi, yaitu mengolah komponen persoalan kecil dan sederhana, kemudian bertahap menyelesaikan persoalan

yang kompleks. Kedua, pengenalan pola untuk mengidentifikasi ciri persamaan, perbedaan, dan keteraturan pola untuk membuat prediksi.

Ketiga, abstraksi untuk melakukan generalisasi berdasarkan hasil pemetaan hubungan benang merah antarpola-pola komponen. Keempat, algoritma untuk mengembangkan sistem petunjuk pemecahan masalah yang mirip.

Sebelum memasuki dunia koding, negara-negara yang telah menerapkan pembelajaran teknologi digital dalam kurikulum sekolah telah memperkuat kemampuan literasi.

Artinya, cara berpikir komputasional merupakan keterampilan cara bagaimana otak manusia belajar berpikir, yang tidak hanya terbatas dalam pengembangan aplikasi koding pada layar digital, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin lintas ilmu pengetahuan lainnya.

Sebelum memasuki dunia koding, negara-negara yang telah menerapkan pembelajaran teknologi digital dalam kurikulum sekolah telah memperkuat kemampuan literasi sebagai dasar metode pemecahan masalah untuk mendukung cara berpikir komputasional pada era 2014-2020. Negara-negara tersebut, antara lain Selandia Baru, Amerika, Australia, Korea Selatan, Finlandia, Jepang, Singapura, China, dan India.

Perkuat Literasi dan Pendidikan Karakter

Menerapkan pelajaran koding sulit terjadi tanpa dilandasi cara berpikir komputasional. Umumnya, anak dapat mengoperasikan teknik koding ketika memiliki pemahaman operasi matematika yang baik. Anak yang paham operasi matematika umumnya memiliki kemampuan berpikir kritis, paham instruksi, dan aturan operasi bilangan.

Kemampuan berpikir kritis dan mematuhi aturan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sementara kemampuan memahami instruksi berasal dari

kemampuan memahami makna dalam literasi. Artinya, cara berpikir komputasional harus memiliki fondasi literasi yang kuat.

Literasi bukanlah pengertian sempit seperti kemampuan teknis membaca huruf dan menulis saja. Literasi yang diperlukan siswa Indonesia adalah siswa dibiasakan melibatkan makna ketika membaca informasi untuk masuk ke dalam pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang melibatkan kemampuan belajar caranya belajar. Hal itu akan membantu siswa mudah melihat benang merah antarlintas bidang (National Institute for Literacy, 1991).

Saat ini, dunia pendidikan sudah menikmati hasil kecerdasan buatan, salah satunya melalui ChatGPT untuk membantu mengerjakan tugas. Siswa dengan mudah mendapatkan berbagai sumber informasi bergantung pada instruksi berupa "prompt" yang diberikan kepada ChatGPT. Selanjutnya, ChatGPT akan menghasilkan respons dengan menggabungkan semua jawaban berdasarkan algoritma *big data* atas topik yang ditanyakan.

Kemampuan berpikir kritis dan mematuhi aturan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter.

Jika kemampuan literasinya lemah, siswa tidak dapat mengetahui dari mana informasi tersebut berasal. Kemampuan literasi yang rendah dapat membuat siswa enggan mempertanyakan dari mana kredibilitas informasi berasal, padahal ChatGPT dapat membuat kesalahan. Pertanyaannya ialah apakah siswa masih dapat menulis esai yang baik ketika mereka tidak lagi memiliki akses ke ChatGPT?

Kecerdasan buatan sedang mengubah cara anak-anak belajar, bahkan bersosialisasi. Sistem algoritma telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak yang tidak disadari. Misalnya, secara otomatis Youtube merekomendasikan video berikutnya untuk diputar berdasarkan riwayat tontonan anak. Itu merupakan contoh sederhana anak-anak telah berinteraksi dengan kecerdasan buatan secara tersembunyi karena telah menjadi kebutuhan.

Ying Xu (2024), peneliti dari Harvard Graduate School of Education, mengingatkan bahwa meskipun kecerdasan buatan

dapat menyajikan informasi dalam gaya percakapan seperti manusia, kecerdasan buatan tidak memiliki keterlibatan emosi dan empati yang tulus, yang hanya dapat dirasakan anak ketika dicontohkan langsung oleh manusia. Kuncinya ada di pendampingan mencontohkan karakter baik oleh guru di sekolah dan orang tua di rumah.

“Jika kemampuan literasinya lemah, siswa tidak dapat mengetahui dari mana informasi tersebut berasal. Kemampuan literasi yang rendah dapat membuat siswa enggan mempertanyakan dari mana kredibilitas informasi berasal, padahal ChatGPT dapat membuat kesalahan.”

Etika adalah Kunci

Perkembangan kecerdasan buatan yang pesat sudah dibuktikan oleh kehadiran Sophia, robot humanoid pada 2016. Sophia mengesankan ekspresi natural dan mampu menjawab seperti manusia ketika menjawab pertanyaan karena kecerdasan buatan yang ditanamkan pembuatnya, yakni David Hanson.

Sophia adalah makhluk yang mirip manusia, tetapi tanpa jiwa. Hal ini justru telah menimbulkan ketakutan di kalangan para ahli komputer *scientist*. Secara terang-terangan Elon Musk, pendiri Tesla, mengaku takut dengan teknologi kecerdasan buatan karena dapat berbalik mengalahkan manusia. Hal itu dapat terjadi ketika manusia memiliki kebergantungan tinggi untuk selalu dipermudah teknologi.

Ketakutan Elon Musk sebenarnya sudah diperingatkan ribuan tahun yang lalu oleh kisah mitologi Yunani kuno sekira 700 SM. Munculnya sosok robot Talos yang diberikan kecerdasan buatan oleh Hephaestus, sang Dewa Api yang piawai mengolah logam.

Lulusan yang Tak Tergantikan oleh AI

Talos awalnya diprogram menghabisi musuh untuk menjaga Pulau Kreta. Kemudian, Talos berbalik menjadikan warga lokal sebagai target karena ia tidak dapat membedakan lagi mana warga lokal dan musuh ketika masuk ke Pulau Kreta.

Ketakutan Elon Musk juga divalidasi oleh CEO Google Sundar Pichai yang mengingatkan etika adalah landasan yang harus dipegang perusahaan teknologi yang membangun kecerdasan buatan agar tidak merugikan manusia seperti pada kisah Talos.

Meskipun menguasai teknologi adalah penting, sesungguhnya ancaman Indonesia bukan karena tertinggal teknologi, melainkan negara berulang kali menghasilkan produk pendidikan yang menghasilkan manusia dewasa yang melanggar etika karena meninggalkan pendidikan karakter. •

27

Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah*

Muhammad Muchlas Rowi

Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial; Wakil Bendahara Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah

PEMERINTAH telah menetapkan Koding dan kecerdasan artifisial (KA) sebagai ‘mata pelajaran pilihan’ di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI No 13/2025 yang merupakan perubahan atas Permendikbud-Ristek No 12/2024 tentang Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

Kebijakan itu selaras dengan Asta Cita pilar keempat sebagaimana tercantum dalam dokumen visi pembangunan 2025-2029 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks itu, pembelajaran koding

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 31 Juli 2025.

dan KA bukan sekadar inovasi pendidikan, melainkan juga upaya strategis mempercepat transformasi digital dan mempersiapkan generasi unggul.

Merujuk data yang diolah Kominfo dalam laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, kebutuhan talenta digital nasional pada 2030 mencapai 12 juta orang. Sementara itu, perguruan tinggi di Indonesia hanya mampu menyediakan sampai 9 juta talenta digital. Itu artinya ada kekurangan 3 juta talenta digital pada 2030.

Lebih dari itu, dengan lahirnya mapel koding dan KA, sekolah di seluruh Indonesia kini punya dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas untuk mulai mengenalkan cara berpikir abad ke-21 kepada murid. Dari ruang kelas, kita berharap akan lahir generasi baru yang bukan cuma pengguna teknologi, melainkan juga pencipta masa depan.

Mengapa Koding dan AI Masuk Sekolah?

Kita tak dapat menutup mata jika ada sebagian pihak yang merasa khawatir kalau koding dan kecerdasan artifisial diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Kekhawatiran itu muncul dari sejumlah temuan awal di beberapa negara, seperti Swedia, yang menunjukkan adanya indikasi penurunan daya pikir kritis siswa ketika pembelajaran teknologi tidak diimbangi dengan pendekatan pedagogis yang tepat. Koding yang terlalu teknokratis, tanpa kontekstualisasi sosial, berisiko menjauhkan anak dari empati dan nalar etis.

Hal serupa juga disinggung dalam penelitian yang dilakukan oleh MIT Media Lab yang menemukan bahwa penerapan kecerdasan artifisial dalam pendidikan tanpa pengawasan dan kerangka etika dapat menyebabkan *'brain off' behavior*, yakni kebergantungan penuh pada mesin dan menurunnya refleksi kritis pada diri siswa. Dalam beberapa kasus, anak-anak menerima saran atau jawaban dari sistem Ai tanpa bertanya lebih jauh yang pada akhirnya mengurangi keaktifan berpikir.

Kekhawatiran itu wajar, terutama jika kita meletakkan teknologi—termasuk koding dan kecerdasan artifisial—hanya pada aras pemanfaatan semata (*AI for learning*) tanpa dibarengi pemahaman terhadap etika dan literasi digital. Sebaliknya, jika sejak dini anak-anak dipahamkan pentingnya etika, literasi digital, serta diberi pengetahuan tentang bagaimana AI bekerja, teknologi justru menjadi jalan untuk memperkuat kesadaran kritis, bukan mematikannya.

“Kita tak dapat menutup mata jika ada sebagian pihak yang merasa khawatir kalau koding dan kecerdasan artifisial diajarkan kepada anak-anak di sekolah. Kekhawatiran itu muncul dari sejumlah temuan awal di beberapa negara, seperti Swedia, yang menunjukkan adanya indikasi penurunan daya pikir kritis siswa ketika pembelajaran teknologi tidak diimbangi dengan pendekatan pedagogis yang tepat.”

Namun, justru karena risiko-risiko itulah, pembelajaran koding dan KA perlu hadir lebih awal, lebih terstruktur, dan lebih etis. Indonesia memilih tidak membiarkan generasi mudanya menjadi konsumen pasif teknologi. Sebaliknya, melalui penetapan koding dan KA sebagai mapel pilihan yang dirancang berbasis nilai dan berpikir kritis, kita sedang menyiapkan anak-anak untuk hidup berdampingan dengan mesin—tanpa kehilangan kendali sebagai manusia.

Itulah mengapa mapel itu mulai diajarkan di kelas 5 (fase C). Pemilihan kelas 5 sebagai fase awal pengenalan mapel koding dan KA bukan tanpa alasan. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak-anak pada usia 10 hingga 12 tahun telah memasuki tahap ‘operasional konkret’, yaitu fase ketika mereka mulai mampu berpikir logis, menyusun hubungan sebab-akibat, serta memahami konsep abstrak yang disajikan secara konkret. Itulah masa krusial untuk membentuk cara berpikir algoritmik dan nalar digital secara bertahap (Piaget, 1972).

Pada usia itu pula anak-anak sudah memiliki fondasi literasi dasar yang cukup kuat—mereka dapat membaca petunjuk, menulis instruksi, dan mulai memahami struktur. Hal tersebut menjadi modal penting untuk memahami konsep berpikir komputasional, mengenali pola, dan mulai membangun solusi berbasis logika. Dengan memberikan stimulasi yang tepat sejak kelas 5, pendidikan teknologi tidak hanya menjadi efektif secara kognitif, tetapi juga selaras dengan perkembangan psikologis anak.

Bukan Sekadar Pemrograman

Mapel koding dan KA bukan hanya tentang pemrograman. Lebih dari itu, ia mengajarkan cara berpikir sistematis dan logis (*computational thinking*), keterampilan menyelesaikan masalah kompleks, serta memahami bagaimana algoritma dan data membentuk keputusan. Dalam konteks inilah, mapel itu tidak sekadar melatih keterampilan teknis, tetapi juga membentuk dasar cara berpikir generasi masa depan.

Dalam Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025 disampaikan bahwa pembelajaran koding dan KA dimasukkan sebagai mata pelajaran pilihan dalam intrakurikuler (mapel inti), dari kelas 5 SD hingga kelas 12 SMA/SMK. Implementasi dilakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026 disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan.

Kurikulum ini dirancang dalam empat fase bertahap: fase C (SD kelas V-VI), fase D (SMP), fase E (SMA/SMK kelas X), dan fase F (SMA/SMK kelas XI-XII). Di dalamnya, murid tidak hanya diajak menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi dan penilai kritis atas dampak sosial dari inovasi teknologi.

Mapel koding dan KA dirancang berbasis enam elemen terintegrasi: berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah secara logis; literasi digital mencakup produksi konten, keamanan siber, dan etika daring; algoritma pemrograman sebagai dasar instruksi pemecahan masalah; serta analisis data untuk memahami dan mengolah informasi. Dua elemen lainnya mencakup literasi

dan etika KA, serta pengembangan KA lewat proyek dan aplikasi nyata yang berdampak sosial.

Setiap fase dalam kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan kebutuhan murid. Di fase C (SD kelas V-VI), murid mulai dikenalkan dengan konsep berpikir logis, pola algoritmik, dan keterampilan dasar literasi digital secara menyenangkan dan kontekstual. Di fase D (SMP), murid mulai diperkenalkan dasar-dasar pemrograman visual menggunakan blok-blok instruksi sederhana, serta memahami awal analisis data dan dampak sosial dari teknologi digital.

Memasuki fase E (SMA/SMK kelas X), pembelajaran berkembang ke arah penggunaan bahasa pemrograman yang lebih kompleks, pengolahan data, serta eksplorasi aplikasi KA sederhana seperti chatbot atau generator visual. Sementara itu, di fase F (SMA/SMK kelas XI-XII), murid diarahkan pada pengembangan proyek teknologi yang utuh dan etis--seperti merancang sistem rekomendasi, mengembangkan aplikasi berbasis KA, atau menyusun pemecahan masalah berbasis data.

Perlu diingat, selain mengakomodasi pembelajaran koding dan KA, Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam (PM) kini menjadi bagian dari kerangka dasar pembelajaran. Pendekatan itu menggantikan metode pengulangan dan hafalan dengan eksplorasi konsep serta pemahaman yang utuh dan kontekstual.

Jika memakai kaca mata PM, mapel koding dan KA bukan sekadar pengenalan alat atau teknik digital. Ia dirancang untuk menumbuhkan cara berpikir sistematis, reflektif, dan bernalar kritis. Para murid belajar tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami logika di baliknya dan menilai dampak sosialnya.

Mapel koding dan KA mendorong eksplorasi lintas disiplin, proyek kolaboratif, serta refleksi diri dalam menghadapi tantangan nyata. Bahkan, saat anak belajar mengoreksi kesalahan kode (*debugging*), mereka sedang melatih metakognisi dan kemandirian belajar. Teknologi menjadi pintu masuk, tetapi tujuan akhirnya ialah anak yang berpikir lebih dalam, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. •

28

Antara Etika dan Otomatisasi: Refleksi Pengenalan Koding dan AI di Sekolah*

Muhammad Isa Anshori

Peneliti di Yayasan Pegiat Pendidikan Indonesia (Pundi)

LANGKAH Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) memperkenalkan koding dan kecerdasan buatan (AI) ke sekolah-sekolah menjadi perbincangan hangat. Sebagian menyambutnya dengan semangat, sebagian lagi penuh waswas. Di satu sisi, itu merupakan jawaban terhadap dunia yang semakin terdigitalisasi. Di sisi lain, muncul pertanyaan besar: apakah anak-anak kita sudah siap secara karakter menghadapi gelombang teknologi yang tak terbendung ini?

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Dailypost.id*, 27 Juni 2025.

Tidak dapat dimungkiri, kemampuan literasi teknologi memang sangat dibutuhkan. Dunia kerja dan kehidupan masa depan akan makin erat dengan pemrograman, otomasi, dan kecerdasan buatan. Maka dari itu, mengenalkan AI sejak sekolah dinilai sebagai strategi jangka panjang yang menjanjikan. Anak-anak diajak memahami dan menguasai alat masa depan sejak dini.

Namun, tidak sedikit pula yang merasa skeptis. Banyak orang tua dan guru yang mengkhawatirkan kemampuan anak-anak dalam mengontrol penggunaan teknologi secara bijak. Kekhawatiran itu muncul karena kenyataan bahwa teknologi sering kali digunakan tanpa pendampingan nilai yang kuat. Jika tidak hati-hati, anak-anak dapat tergoda memanfaatkan AI sebagai jalan pintas, bukan alat pengembangan diri. Proses belajar pun menjadi instan, tanpa pemahaman mendalam.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang serba cepat. Mereka terbiasa dengan akses instan dan solusi instan. Maka dari itu, jika tidak dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran etis, pengenalan AI dapat menjadi bumerang yang justru menghambat pembentukan karakter.

AI Cermin Kecerdasan atau Celah Keculasan?

Pernyataan menarik datang dari Mendikdasmen, Abdul Mu'ti dalam sebuah pidato. Ia mengingatkan bahwa AI tidak secara otomatis membuat manusia menjadi lebih cerdas, justru dapat membuat manusia semakin culas. Itu menjadi refleksi penting di tengah arus besar digitalisasi pendidikan.

Namun, tidak sedikit pula yang merasa skeptis. Banyak orang tua dan guru yang mengkhawatirkan kemampuan anak-anak dalam mengontrol penggunaan teknologi secara bijak.

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak siswa lebih memilih menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas secara cepat tanpa berpikir. Mulai dari menjawab soal pilihan ganda, membuat ringkasan, bahkan hingga menyusun karya ilmiah semuanya dilakukan tanpa benar-benar memahami isinya. Proses belajar berubah menjadi aktivitas teknis semata, bukan lagi perjalanan intelektual.

Dalam hal ini, muncul pergeseran dari *in-depth thinking* (berpikir mendalam) ke *superficial thinking* (berpikir dangkal). Anak-anak terbiasa menerima jawaban tanpa bertanya, menyerap tanpa mengolah. Mereka kehilangan proses belajar yang membentuk daya juang, nalar kritis, dan integritas.

Namun, teknologi tidak bisa disalahkan. Hal yang perlu dipertanyakan adalah kesiapan manusia dalam mengelola teknologi itu sendiri. AI hanyalah alat. Ia dapat menjadi jalan menuju pemahaman yang luas, tetapi juga dapat menjadi lorong menuju kemalasan jika disalahgunakan. Di sinilah pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk mengimbangi kemajuan teknologi.

Kolaborasi Pendidikan: Peran Guru dan Orang Tua

Keberhasilan pengenalan AI di sekolah sangat bergantung pada pendampingan yang tepat. Guru dan orang tua memegang peran sentral untuk memastikan bahwa AI tidak menjauhkan anak dari semangat belajar, tetapi justru mendekatkannya.

Guru tidak dapat hanya sekadar mengajarkan cara menggunakan teknologi. Mereka juga harus menjadi penjaga nilai dan penuntun etika. Siswa perlu dibimbing agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pemikir yang mampu menilai manfaat dan risiko dari teknologi yang mereka gunakan. Guru juga dapat mengembangkan tugas-tugas yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah nyata, bukan hanya menguji hafalan atau menyalin informasi dari AI.

Orang tua tidak boleh lepas tangan. Di rumah, mereka perlu membangun ruang diskusi tentang penggunaan teknologi secara sehat. Anak-anak perlu diajak memahami kapan harus mengandalkan AI dan kapan harus menggunakan otak mereka sendiri. Pengawasan, dialog terbuka, dan penanaman nilai akan menjadi kunci agar teknologi tidak mengambil alih tanggung jawab moral.

Kurikulum pendidikan juga harus menyentuh aspek ini. Literasi digital bukan hanya soal teknis menggunakan perangkat, melainkan juga tentang etika, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan informasi. AI harus dikenalkan bukan sekadar sebagai alat, melainkan sebagai media untuk membentuk akhlak mulia di tengah zaman otomatisasi. Pendidikan digital tanpa fondasi moral hanya akan melahirkan pengguna, bukan pemimpin.

Mewujudkan Generasi Tangguh di Tengah Kemudahan-Kemudahan

Pendidikan pada era digital tidak cukup hanya mengajarkan kecerdasan, tetapi juga perlu membekali anak dengan kekuatan karakter. Teknologi secanggih apa pun tidak berguna jika penggunanya tak punya ketangguhan moral. Dalam konteks ini, AI adalah ujian sekaligus peluang. Ia menguji sejauh man karakter dn etika menjadi bagian dari proses belajar.

Pengenalan AI di sekolah seharusnya bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan juga harus menjadi bagian dari pendidikan karakter yang menyeluruh. Jika diimplementasikan dengan bijak, program itu akan menjadi jembatan menuju generasi yang kreatif, reflektif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Mari kita tempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti proses belajar. Jangan biarkan anak-anak terjebak dalam kenyamanan teknologi tanpa memahami nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi. Mari bentuk generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menguasai dirinya generasi yang cakap digital dan kuat secara moral. •

29

Edukasi Era Digital: Tantangan Screen Time saat AI dan Koding Masuk Kurikulum Sekolah*

Yudhi Kurnia

Guru Informatika dan STEM SMP Muhammadiyah 8 Bandung

TAHUN ajaran 2025/2026 akan menjadi tonggak baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Pada tahun ini, untuk kali pertama direncanakan materi *artificial intelligence* (AI) dan koding akan diajarkan secara sistematis mulai jenjang SD hingga SMA.

Langkah itu tidak hanya menambah konten dalam kurikulum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan pendidikan untuk selaras

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Pikiran Rakyat*, 14 Mei 2025.

dengan perkembangan dunia yang semakin mengandalkan teknologi digital.

Pengenalan AI dan koding kepada siswa sejak dini bukan sekadar mempersiapkan mereka untuk menjadi ahli teknologi pada masa depan, melainkan juga untuk melatih keterampilan abad ke-21 yang melibatkan pola pikir logis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Koding, yang dulunya dianggap sebagai keahlian teknis terbatas, kini menjadi bahasa universal yang diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains hingga seni.

Perubahan itu juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya *screen time* atau waktu yang dihabiskan di depan layar. Pengajaran AI dan koding jelas memerlukan perangkat teknologi, seperti komputer dan tablet, yang dapat meningkatkan penggunaan layar secara signifikan di kalangan anak-anak.

Menurut American Academy of Pediatrics (AAP), anak-anak sebaiknya tidak menghabiskan lebih dari dua jam per hari untuk aktivitas rekreasional yang melibatkan layar. Kelebihan waktu di depan layar dapat berisiko mengganggu kualitas tidur, menurunkan kemampuan konsentrasi, dan bahkan memengaruhi perkembangan sosial serta emosional anak.

“Perubahan itu juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya screen time atau waktu yang dihabiskan di depan layar. Pengajaran AI dan koding jelas memerlukan perangkat teknologi, seperti komputer dan tablet, yang dapat meningkatkan penggunaan layar secara signifikan di kalangan anak-anak.”

Untuk mengatasi risiko *screen time* yang berlebihan, metode pengajaran *unplugged coding* dapat menjadi alternatif yang efektif. Metode ini mengajarkan konsep koding tanpa melibatkan perangkat elektronik, melalui permainan logika, simulasi algoritma, atau aktivitas kinestetik yang melibatkan pergerakan fisik. De-

ngan pendekatan ini, siswa tetap dapat memahami dasar berpikir komputasional tanpa kebergantungan pada layar.

Selain itu, kebijakan sekolah juga harus memperhatikan pengelolaan waktu penggunaan perangkat digital. Sekolah perlu merancang jadwal rotasi penggunaan perangkat, waktu istirahat layar yang cukup, serta kegiatan fisik yang mengimbangi waktu di depan layar. Kebijakan itu sebaiknya juga disosialisasikan dengan orang tua agar mereka dapat turut mengawasi dan membatasi *screen time* di rumah. Selain itu, keberhasilan implementasi kurikulum AI dan koding juga sangat bergantung pada kesiapan guru. Pelatihan intensif untuk guru menjadi hal yang tak terhindarkan. Guru harus mampu tidak hanya menguasai materi AI dan koding, tetapi juga menyampaikannya dengan metode yang sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa, serta mampu mengelola penggunaan teknologi dengan bijak.

Akhirnya, pendidikan pada era digital bukan hanya soal mengenalkan teknologi kepada siswa, melainkan juga mengajarkan mereka untuk menggunakannya dengan bijak. Melindungi anak dari bahaya *screen time* bukan berarti menghindari teknologi, tetapi mengarahkan mereka untuk menggunakan teknologi dengan sehat, bijak, dan produktif. •

30

Teknologi Pendidikan untuk Kualitas Pembelajaran*

Moh. Abduh

Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Bidang Teknologi Pendidikan

TIDAK dimungkiri bahwa teknologi pendidikan telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam dunia pendidikan modern. Dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, berbagai alat dan platform kini tersedia untuk mendukung proses pembelajaran.

Teknologi pendidikan sudah seharusnya menjadi solusi menghadapi tantangan pembelajaran pada era digital. Apakah kemudian keberadaan seorang guru menjadi tidak diperlukan lagi? Dalam bukunya yang berjudul *Modern Teaching: Essential Practices for Personalized Learning*, Terry Heick (2020) menyatakan

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Jawa Pos*, 15 Januari 2025.

teknologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan guru, tetapi untuk memperluas jangkauan mereka dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak mungkin.

Ditambahkan juga bahwa guru modern bukan hanya pengajar, melainkan juga fasilitator, mentor, dan desainer pembelajaran. Karenanya teknologi hanyalah sekadar alat, di sisi lain peran guru tetap menjadi inti pembelajaran dan tidak akan tergantikan.

Teknologi pendidikan mencakup berbagai perangkat, aplikasi, dan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Teknologi pendidikan berperan untuk menyediakan akses informasi yang luas.

Melalui ketersediaan fasilitas internet, guru dan siswa dapat mengakses berbagai referensi dan sumber belajar dari seluruh belahan dunia. Buku elektronik, artikel jurnal ilmiah, dan video pembelajaran yang dibutuhkan dapat diakses secara cepat. Pun, proses pembelajaran menjadi semakin interaktif.

Teknologi pendidikan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik melalui penyediaan alat dan media pembelajaran seperti simulasi, gim edukasi, dan video animasi. Dalam bukunya *E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning* (4th ed.), Ruth C. Clark dan Richard E. Mayer (2016) mengatakan, *“People learn better from words and pictures than from words alone, as long as the pictures are directly relevant to the learning objectives.”*

Teknologi pendidikan juga dapat dimaksimalkan perannya sebagai personalisasi pembelajaran, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan, kompetensi dan kecepatan daya pikir siswa. Melalui platform daring, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan mereka belajar sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Terry Heick (2020) menyatakan, pemanfaatan perangkat digital seperti platform pembelajaran daring, aplikasi analitik, dan *artificial intelligence* dapat mendukung proses personalisasi pembelajaran.

Di sisi lain, pada konteks kolaborasi, teknologi pendidikan juga memungkinkan siswa dan guru dari berbagai belahan dunia untuk berkomunikasi dan bekerja sama melalui berbagai platform seperti forum, video konferensi, dan proyek kolaboratif daring secara nasional, regional dan global.

Meskipun demikian, implementasi teknologi pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan. Kesenjangan digital menjadi tantangan yang sangat serius dan perlu percepatan solusinya.

Tidak banyak siswa yang memiliki perangkat pembelajaran kekinian dan akses internet yang kuat melimpah di wilayah mereka. Tantangan krusial berikutnya adalah kurangnya pelatihan teknologi pembelajaran bagi guru. Guru perlu dilatih menggunakan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran.

Meski beberapa tahun terakhir ini sudah banyak dilakukan, jumlah guru yang dilatih masih belum sepadan dan proporsional jika dibandingkan jumlah guru seluruhnya. Tantangan berikutnya, mitigasi dan antisipasi kebergantungan pada teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi pendidikan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan akan mengurangi kemampuan guru menyiapkan materi pembelajaran secara manual dan kemampuan siswa belajar secara konvensional.

“Meskipun demikian, implementasi teknologi pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan. Kesenjangan digital menjadi tantangan yang sangat serius dan perlu percepatan solusinya.”

Apa yang penting dan mendesak dilakukan adalah mengoptimalkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa langkah yang dapat disiapkan antara lain sebagai berikut. Pertama, peningkatan infrastruktur. Pemerintah beserta pemangku kepentingan pendidikan setempat perlu

menyiapkan perangkat teknologi dan akses internet yang memadai untuk semua siswa di wilayah tersebut.

Kedua, pelatihan guru. Program pelatihan berkelanjutan bagi guru terkait pemanfaatan teknologi pendidikan perlu diselenggarakan lebih efektif, menyeluruh, dan berkesinambungan. Ketiga, pemilihan jenis teknologi yang tepat, relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran terbaru. Keempat, dukungan regulasi kebijakan yang jelas untuk mengatur penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk aspek privasi dan keamanan data.

Pemanfaatan teknologi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik di dalam maupun luar kelas. Sebagaimana *success story* lainnya, implementasi yang sukses senantiasa memerlukan perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta penanganan terhadap tantangan dan permasalahan yang ada.

Dengan pendekatan yang tepat dan terukur, teknologi pendidikan akan menjadi tools yang sangat efektif tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, interaktif, dan bermakna. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pembelajaran akan memberikan kontribusi optimal bagi Pendidikan Bermutu untuk Semua sebagaimana *tagline* Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. •

31

Menggagas Buku Teks Utama Mapel Koding dan Kecerdasan Artifisial*

Supriyatno

Kepala Pusat Perbukuan, BSKAP, Kemendikdasmen

SEBAGAI negara yang sedang memasuki era transformasi digital secara masif, keputusan Kemendikdasmen untuk menambahkan mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) pada kurikulum mulai tahun ajaran 2025 adalah langkah strategis. Keputusan itu bukan sekadar menambah mata pelajaran baru, melainkan upaya sistemik untuk menyiapkan generasi muda yang mampu memahami, menggunakan, dan mengkritisi teknologi yang semakin mendominasi kehidupan publik dan dunia kerja. Dalam konteks tersebut, tugas Pusat Perbukuan sangat krusial, yakni

*Artikel ini telah dipublikasikan di situs web *Kemendikdasmen*, 9 Oktober 2025.

menyusun buku teks utama sesuai dengan standar dan kaidah sehingga dapat digunakan secara nasional untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pengalaman internasional menunjukkan ada beberapa model bagaimana negara lain mengintegrasikan pemrograman, *computational thinking*, dan—lebih baru—KA ke dalam kurikulum nasional. Inggris misalnya, telah memasukkan *Computer Science* ke dalam kurikulum nasional sejak dekade lalu, dengan penekanan pada konsep pemrograman dan keamanan digital. Finlandia mengintegrasikan pemrograman ke dalam kurikulum inti pada 2016, menekankan berpikir algoritmis dan literasi digital sebagai kompetensi lintas mata pelajaran.

Jepang menjadikan pendidikan pemrograman wajib di tingkat sekolah dasar sejak 2020, sedangkan Australia mengoperasikan kurikulum *Digital Technologies* yang menekankan pengetahuan dan keterampilan otomatisasi data. Singapura menjalankan program “Code for Fun” dan modul KA untuk memperkenalkan *computational thinking* dan teknologi KA kepada siswa sejak tingkat dasar hingga menengah. Estonia, dengan inisiatif “AI Leap”, telah meluncurkan program pembelajaran KA untuk siswa dan pelatihan guru sebagai bagian dari strategi digital nasional. Pengalaman dan pelajaran dari negara-negara itu penting sebagai bahan pembandingan dan inspirasi dalam penyusunan buku teks utama untuk sekolah-sekolah kita.

Prinsip Penyusunan Buku Teks Utama

Prinsip penyusunan buku teks utama Koding dan KA tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan mata pelajaran (mapel) tersebut, yaitu guna membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21, memperkenalkan pemrograman dan KA sejak dini, mendorong cara berpikir kritis dan logis, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Walaupun dinyatakan bersifat opsional sebagai mapel pilihan, Pusat Perbukuan telah menyiapkan buku teks utama dengan pendekatan strategi pembelajaran Koding dan KA, yaitu (1) pembelajaran tanpa perangkat digital; (2) pembelajaran dengan perangkat digital; dan (3) pembelajaran dengan perangkat digital berbasis internet. Untuk itu, buku teks utama harus mampu memainkan peranan untuk mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) agar buku dapat digunakan secara adil dan merata sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Artinya, keterlaksanaan (fisibilitas) dalam pembelajaran KA dan Koding perlu diperhatikan.

“Prinsip penyusunan buku teks utama Koding dan KA tidak terlepas dari tujuan penyelenggaraan mata pelajaran (mapel) tersebut, yaitu guna membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21, memperkenalkan pemrograman dan KA sejak dini, mendorong cara berpikir kritis dan logis, serta mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.”

Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyusunan buku teks utama Koding dan KA yang disiapkan oleh Pusat Perbukuan.

Pertama, berbasis pada capaian pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025. Posisi mapel Koding dan KA merupakan mapel pilihan. Pembelajaran mapel ini dimulai secara bertahap pada tahun ajaran 2025/2026, khususnya untuk kelas V, VII, dan . Dengan demikian, Pusat Perbukuan menyiapkan buku teks utama sesuai dengan tahapan.

Kedua, berbasis pada Manusia dan Etika. Materi KA harus menanamkan pemahaman etika penggunaan KA, bahaya bias algoritma, privasi data, dan literasi digital—bukan sekadar aspek teknis. Pendidikan teknologi harus menegaskan peran manusia sebagai pengendali dan penilai dampak sosial teknologi.

Ketiga, praktik berbasis proyek (*project-based learning*). Pembelajaran koding dan KA paling efektif lewat praktik: latihan pemrograman sederhana, proyek mini (misalnya, robotika, analisis data sederhana), dan studi kasus etis. Buku harus memberikan panduan proyek yang terukur, bahan latihan, serta rubrik penilaian.

Keempat, aksesibilitas dan keberagaman. Buku harus dapat dipakai oleh sekolah di wilayah terpencil dan perkotaan—baik dalam format cetak maupun digital—dengan bahasa yang ramah, contoh kontekstual lokal, dan bahan tambahan untuk siswa berkebutuhan khusus.

Kelima, keterpaduan lintas mata pelajaran. Koding dan KA harus didorong untuk berkolaborasi dengan matematika, IPA, IPS, bahasa, seni, dan sebagainya agar menjadi kompetensi lintas-bidang, bukan sesuatu yang terpisah, terisolasi, dan tidak terhubung.

Menyusun Buku Teks Utama secara Konkret

Dalam konteks tugas utama Pusat Perbukuan, ada beberapa fungsi spesifik yang kami emban untuk memastikan buku teks utama tidak hanya bagus di kertas, tetapi dapat diimplementasikan di kelas.

Penyusunan standar isi dan peta kompetensi. Menetapkan cakupan materi per jenjang kelas, proporsi teori-praktik, serta standar capaian minimal. Hal itu menjadi rujukan bagi penulis, penelaah (pereviu), dan tim penilaian buku.

Seleksi tim penulis dan penelaah multidisiplin. Menggabungkan ahli pendidikan, praktisi KA dan perekayasa perangkat lunak, guru berpengalaman, dan pakar etika digital. Kombinasi itu menjamin keseimbangan antara kedalaman teknis dan pendekatan pedagogis.

Uji coba (*piloting*) buku teks. Buku harus melalui tahap pilot di sekolah sampel, baik urban, sub-urban, maupun rural serta sekolah dengan sumber daya terbatas. Hasil pilot digunakan untuk revisi konten, penyesuaian bahasa, dan format pengayaan.

Pengembangan bahan pendukung guru. Buku guru yang komprehensif—meliputi panduan implementasi, strategi remedial, modul latihan, serta panduan penilaian—adalah kunci. Pusat Perbukuan menyiapkan materi pelatihan terintegrasi untuk mengakselerasi kapasitas guru.

Format ganda. Mengingat tantangan akses, buku utama akan tersedia, baik dalam edisi cetak (untuk jangkauan luas) maupun paket digital interaktif (untuk sekolah dengan infrastruktur). Versi digital menyertakan kode latihan, dataset sederhana, dan simulasi tanpa perlu instalasi kompleks.

Jaminan mutu dan pembaruan berkala. Bidang teknologi berkembang cepat. Pusat Perbukuan akan menetapkan mekanisme revisi berkala (misalnya dalam setiap 2 tahun untuk konten KA) dan modul pembaruan daring untuk menampung perkembangan teknologi dan pedagogi terbaru.

Sinergi Kelembagaan dan Pemangku Kepentingan

Penyusunan buku teks Koding dan KA bukan pekerjaan sendiri-sendiri. Pusat Perbukuan akan membangun sinergi dengan: Direktorat Kurikulum, pusat pelatihan guru, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi (untuk kajian akademik dan riset), industri teknologi (untuk contoh kasus dan sumber daya), serta organisasi internasional untuk *benchmarking*. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas guru dan pengembang open-source akan membantu memperkaya bahan ajar dan menjaga keberlanjutan ekosistem pembelajaran.

Tantangan dan Mitigasi

Pusat Perbukuan menyadari sejumlah tantangan yang mengadang dalam implementasi mapel Koding dan KA, di antaranya (1) keterbatasan kompetensi guru; (2) variabilitas infrastruktur sekolah; (3) risiko ketimpangan akses; dan (4) laju perubahan teknologi.

Untuk itu, dirancang mitigasi, yaitu (1) memprioritaskan sosialisasi kepada guru-guru dalam penggunaan buku sebelum implementasi penuh; (2) mengutamakan materi yang dapat dilaksanakan secara luring; (3) menyiapkan platform SIBI untuk memperbarui materi; dan (4) menyediakan forum-forum diskusi secara daring dan luring.

Pusat Perbukuan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan buku teks utama Koding dan KA yang berorientasi pada kompetensi abad ke-21, adil, dan aplikatif. Buku itu harus menjadi alat yang memberdayakan guru dan siswa—mengajarkan keterampilan teknis sembari menumbuhkan sikap kritis, etis, dan kreatif. Dengan belajar dari praktik internasional dan menyesuainya pada konteks lokal Indonesia, Pusat Perbukuan akan memastikan bahwa peluncuran mata pelajaran ini pada tahun ajaran 2025 bukan sekadar simbol perubahan, melainkan fondasi nyata bagi generasi Indonesia yang siap menghadapi masa depan digital.

Tentu saja masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan selama proses penyusunan dan uji coba buku sangat diperlukan. Dengan kolaborasi yang kuat, buku teks utama yang digagas dan diterbitkan akan menjadi sumber pembelajaran yang relevan, tahan uji, dan mencetak lulusan yang tidak hanya mampu “menggunakan” teknologi, tetapi juga memahami implikasi sosial dan etisnya. •

32

The Deepseek Saga: Why AI Education Matters*

Irsyad Zamjani

Head of the Center for Education Standards and Policy of the Primary and Secondary Education Ministry

THE LAUNCH of Deepseek, a Chinese artificial intelligence model, last month sent shock waves through the global tech industry. Praised for its ability to rival established players like GPT, Gemini, and Llama, Deepseek stood out not just for its capabilities but for its remarkably low development cost.

The revelation triggered a sharp market reaction, with the stock prices of Silicon Valley's tech titans taking a notable hit. The message was clear: the race for AI dominance is no longer the exclusive domain of Silicon Valley's tech behemoths. Innovation hubs are emerging in other corners of the world.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *The Jakarta Post*, 20 Februari 2025.

In November 2024, Stanford University's Institute for Human-Centered AI published its global ranking of the most active AI innovators. The United States, China, the United Kingdom, India, and the United Arab Emirates topped the list of 36 ranked nations.

Other Asian powerhouses followed close behind. South Korea, Japan, Singapore, and Malaysia placed seventh, ninth, 10th, and 26th, respectively. The ranking methodology assessed six key components, including research and development, economic impact, and education. Notably absent from the list is Indonesia.

AI is no longer a science fiction spectacle confined to Hollywood blockbusters. It now powers nearly every sector, from financial markets and creative industries to medical diagnostics and global supply chains.

According to the World Economic Forum (2025), AI is projected to eliminate 92 million jobs by 2030 while simultaneously creating 170 million new ones.

The widening gap between advanced and developing economies will hinge on how well nations prepare their workforce for this shift. One thing is certain: countries that fail to cultivate AI literacy and build an AI-ready labor force will struggle to compete in the future.

That gap is already coming into focus. While AI is reshaping industries and intensifying competition among major economies, much of the world's youth remains passive consumers rather than active creators of this technology.

Even more concerning, many lack AI literacy. A 2024 Ernst & Young survey of 5,000 Gen Z workers across 16 countries found that while most regularly use AI, their AI literacy scores ranged from just 44 to 61 out of 100.

We must consider the possibility that AI literacy, and coding, will soon be as essential as language and math. Around the world, governments are treating this shift with increasing urgency, integrating AI-related skills into education.

The United Kingdom was an early mover. In 2014, it became one of the first countries to mandate coding education for children

as young as five. While AI is not explicitly part of the curriculum, teachers have embraced it: by 2024, 47.7 percent of educators in British schools were using generative AI in their classrooms, up from 31 percent the year before (Harrison, 2024).

“The widening gap between advanced and developing economies will hinge on how well nations prepare their workforce for this shift. One thing is certain: countries that fail to cultivate AI literacy and build an AI-ready labor force will struggle to compete in the future.”

Singapore has taken a similarly structured approach. In 2020, its Ministry of Education introduced four core pillars of digital literacy: find, think, apply, and create. By 2023, its EdTech Masterplan 2030 had expanded these competencies to include technological skills, focusing on AI literacy. The ministry has since rolled out five AI-powered tools for schools, including three marking systems that provide learning feedback, an adaptive learning platform for students, and a lesson-planning assistant for teachers.

China, too, has made a decisive push. In late 2024, its Ministry of Education released a circular on the national AI curriculum framework for primary and secondary schools. The guidelines lay out a progressive structure: elementary students are introduced to AI through exploration and hands-on experience, middle schoolers focus on AI concepts and applications, and high school students engage in advanced AI projects (*South China Morning Post*, 15 Dec 2024).

But AI literacy is not about producing an army of AI software engineers. As UNESCO’s *AI Competency Framework for Students* (2024) emphasizes, it is about preparing creative and responsible citizens for a rapidly evolving world. Beyond understanding AI as a technology, teaching AI will develop students’ essential 21st-century skills: analytical reasoning, problem-solving, collaboration and creativity. These competencies are transversal to all industries.

Working with AI systems also nurtures deeper intellectual habits: refining questioning and problem-framing skills, cultivating curiosity and fostering a critical approach to data. Just as crucially, it instills ethical awareness. AI literacy goes beyond technical proficiency; it must teach young people to engage with AI responsibly, ensuring human agency remains paramount and environmental sustainability remains central when it comes to the development and use of AI-driven tools.

For a nation as vast as Indonesia, with more than 50 million students who will shape its future, integrating AI literacy into the curriculum is no longer optional, it is inevitable. From the outset, Elementary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti has championed this vision as one of national priorities. Yet, implementing it will be no small feat.

The biggest challenges lie in unequal access to technology and a shortage of trained teachers. Nearly 27 percent of schools lack computers, and 20 percent remain without internet access. Currently, informatics education only begins at the middle school level, meaning that if AI literacy is introduced in elementary schools, at least a portion of Indonesia's 1.6 million elementary teachers will need training.

A phased approach is the most pragmatic path forward. Expanding digital infrastructure and equipping teachers with the necessary skills must be foundational steps. In the USA, a study found that introducing AI education in schools with stark disparities in technology access actually deepened educational inequality, not just between schools, but also along racial lines (Pham et al., 2024). Singapore and China, despite their ambitious AI curricula, have also struggled with a shortage of trained educators (Heintz, 2021; Qian & Yan, 2023).

Learning from these experiences, Indonesia could first introduce AI education in schools that are better prepared, using them as models to refine best practices before scaling nationwide. Partnerships with industry and the tech community will be crucial.

Companies can help train teachers, mentor schools, provide infrastructure, and fund research into AI-driven learning tools.

But AI education must go beyond technical skills. Ethics, bias, and the broader social impact of AI must be emphasized to prevent future misuse. The curriculum should also remain flexible, overloading it with too many contents and programs will only breed resistance. Instead, teachers should be empowered with AI-based tools that help personalize learning while easing their workload.

Indonesia's scale and diversity make this transition challenging, but also full of potential. The country has already demonstrated a strong appetite for digital technology, from its booming startup ecosystem to its high mobile penetration. Yet if AI literacy remains confined to a select few rather than becoming a universal competency, Indonesia risks deepening internal inequalities and falling behind in the global digital economy.

The next few years will decide whether Indonesia emerges as a leader in the AI era or remains a consumer of other nations' innovations. With the right policies, the country can ensure that AI education is not just about preparing students for the future, but also about shaping that future itself. •

Bagian IV

Guru Kunci Pendidikan

Kemendikdasmen, 2025



33

Desain Pendidikan Profesi Guru*

Nunuk Suryani

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
Kemendikdasmen

PENDIDIKAN yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang unggul. Dalam konteks itu, guru memegang peran sentral dalam dunia pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempunyai visi besar mewujudkan guru Indonesia menjadi guru profesional, sejahtera, dan berkualitas. Visi berdasar pada pemahaman bahwa dunia pendidikan terus berkembang pesat dan guru sebagai agen perubahan harus siap mengikuti perubahan tersebut.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 1 Juni 2025.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 telah mencakup penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Hal itu menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Salah satu aspek utama yang ditekankan ialah peningkatan kompetensi guru secara menyeluruh. Guru masa kini diharapkan tidak hanya menguasai materi ajar, tapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.

Skema Baru

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru, termasuk program sertifikasi guru dengan berbagai strategi. Dimulai dengan penilaian portofolio, pemberian sertifikat secara langsung, pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dan saat ini melalui pendidikan profesi guru (PPG).

Pada 2024, masih terdapat sekitar 1 juta lebih guru belum memiliki sertifikat pendidik, dengan 240 ribu di antaranya belum S-1/D-4. Hal itu menunjukkan, meski berbagai kebijakan dilaksanakan, tantangan dalam memenuhi kebutuhan guru bersertifikat masih cukup besar.

Sebagai bentuk solusi atas tantangan tersebut, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) telah meluncurkan program percepatan penuntasan sertifikasi guru melalui PPG bagi guru tertentu pada 2024, yang ditargetkan selesai pada 2026.

Untuk memenuhi kebutuhan guru profesional, Ditjen GTKPG menyelenggarakan PPG bagi calon guru sebagai upaya dalam menyiapkan calon guru profesional sesuai dengan amanat undang-undang untuk ditempatkan pada satuan pendidikan yang

membutuhkan guru. PPG tidak hanya bertujuan menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik, tetapi juga untuk memastikan guru-guru yang dihasilkan siap mengajar dengan kompetensi mumpuni sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Secara substansial, program PPG sesungguhnya bertujuan menjadikan guru memiliki kompetensi yang unggul, profesional, dan sejahtera. PPG diharapkan melahirkan guru sebagai pemelajar mandiri, berinovasi, dan berkompentensi. Sebagai agen perubahan, guru akan lebih percaya diri tatkala menunjukkan kompetensi mereka baik di tingkat nasional atau internasional.

Penyelenggaraan PPG dilakukan melalui dua skema gunaenuhi kebutuhan guru profesional. Dua skema tersebut ialah program PPG bagi guru tertentu (dalam jabatan) dan calon guru (prajabatan).

Skema pertama ialah PPG bagi guru tertentu (dalam jabatan) bagi guru tertentu yang telah mengabdikan di satuan pendidikan, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Program itu hadir sebagai upaya untuk melahirkan guru yang profesional, berkompenten, dan sejahtera. Transformasi pendidikan profesi guru fokus pada percepatan penyelesaian sertifikasi pendidik bagi guru tertentu (dalam jabatan) secara lebih efisien dan efektif. Melalui program itu, model pembelajarannya mandiri melalui platform Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (RGTK).

Dalam penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu, proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi dan memvalidasi kesesuaian kualifikasi akademik S-1/D-4 yang dimiliki dengan bidang studi PPG. Peserta PPG yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi bisa menempuh pembelajaran mandiri melalui platform pembelajaran yang telah ditetapkan kementerian. Pembelajaran dilakukan setelah peserta PPG melakukan lapor diri di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Skema kedua ialah PPG bagi calon guru (prajabatan) merupakan program pendidikan profesi untuk mencetak generasi baru guru seluruh Indonesia. Program itu ditujukan bagi individu

yang memiliki panggilan jiwa untuk menjadi guru, profesional, komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi, dan pemelajar sepanjang hayat. PPG calon guru dimulai dengan seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan selama dua semester. Program itu mencakup perkuliahan, praktik kerja lapangan, proyek kepemimpinan, dan pendampingan.

“Secara substansial, program PPG sesungguhnya bertujuan menjadikan guru memiliki kompetensi yang unggul, profesional, dan sejahtera. PPG diharapkan melahirkan guru sebagai pemelajar mandiri, berinovasi, dan berkompetensi. Sebagai agen perubahan, guru akan lebih percaya diri tatkala menunjukkan kompetensi mereka baik di tingkat nasional atau internasional.”

Penerimaan peserta PPG calon guru dilaksanakan melalui seleksi nasional oleh kementerian. Bagi calon peserta yang dinyatakan lulus, wajib lapor diri pada LPTK penempatannya. Tahap selanjutnya, LPTK melaporkan peserta PPG ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan calon peserta ditetapkan secara resmi menjadi peserta PPG oleh kementerian yang selanjutnya ditempatkan ke LPTK tempat penyelenggaranya.

Butuh Kolaborasi

Proses pembelajaran bagi peserta PPG calon guru secara teknis dilaksanakan dengan alur matrikulasi bagi peserta PPG yang berasal dari sarjana nonkependidikan melalui platform pembelajaran.

Matrikulasi dilaksanakan pada rentang masa lapor diri hingga orientasi atau setidaknya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai. Orientasi bagi semua peserta dengan materi utama, yaitu kebijakan umum PPG, kurikulum, sistem dan platform pembelajaran, serta penilaian dan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru (UKPPPG) dengan melakukan perkuliahan yang dilaksanakan selama dua semester secara luring.

Kedua skema itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama: melahirkan guru sebagai pemelajar mandiri, berkualitas, berinovasi, dan berkompetensi karena guru yang berkualitas tidak hanya memperkuat fondasi sistem pendidikan nasional, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia.

Untuk memastikan penyelenggaraan PPG memenuhi atau melampaui standar mutu, perlu dilaksanakan juga penjaminan mutu melalui pemantauan, evaluasi, asesmen diri atau cara lain yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Ditjen GTKPG berkoordinasi dengan lembaga akreditasi mengenai instrumen akreditasi PPG. Langkah itu dilakukan agar hasil penjaminan mutu dapat memuat rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan program PPG.

Masa depan pendidikan Indonesia bertumpu pada kualitas pendidikan hari ini. Program pendidikan profesi guru ialah salah satu ikhtiar strategis negara dalam menyiapkan dan mendampingi guru-guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga bijak secara pedagogik, dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Keberhasilan program itu tidak bisa berjalan sendiri dan perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pelaksanaan PPG sebagai investasi jangka panjang pendidikan Indonesia.

Program PPG merupakan langkah besar dalam menciptakan guru yang lebih profesional dan sejahtera demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Dengan semangat bersama, dukungan diperlukan agar setiap guru di Indonesia supaya memiliki kesempatan terus belajar dan berkembang demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi pendidikan Indonesia. •

34

Hari Belajar Guru, Perlukah?*

Triyanto

Guru Besar FKIP UNS Solo

PADA awal 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah penting bagi pengembangan profesionalisme guru dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 5684/MDM. B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru. Surat tersebut ditandatangani oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Prof Nunuk Suryani pada 26 Maret 2025.

Pada intinya, edaran tersebut mewajibkan komunitas guru dan kepala sekolah untuk menetapkan satu hari khusus dalam satu minggu sebagai hari belajar bersama. Pelaksanaan hari belajar guru diwadahi dalam berbagai forum guru dan kepala sekolah seperti kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), dan musyawarah

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 24 April 2025.

kerja kepala sekolah (MKKS). Kebijakan itu patut diapresiasi dan perlu diberikan catatan untuk beberapa alasan. Perlengkapan sekolah

Secara filosofis, tidak ada yang meragukan peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bertugas mendidik siswa menjadi manusia cerdas dan berakhlak mulia. Saking pentingnya guru, Kaisar Hirohito tidak bertanya berapa sisa tentara atau amunisi setelah Jepang dibom atom oleh AS pada Perang Dunia II, tetapi bertanya berapa jumlah guru tersisa. Kaisar sadar betul bahwa guru merupakan elemen sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa.

Hari belajar guru juga merupakan wujud dari konsep belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang tidak terbatas waktu dan usia. Secara yuridis, menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Hari belajar guru merupakan upaya untuk memastikan bahwa guru mempunyai waktu belajar untuk mengembangkan empat kompetensi tersebut, terutama kompetensi profesional (penguasaan bidang studi) dan kompetensi pedagogik (keterampilan mengajar). Hari belajar guru diperlukan untuk mendukung pemenuhan salah satu kewajiban guru, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Secara sosiologis, guru ialah tokoh panutan di sekolah atau masyarakat. Aktivitas belajar guru dapat memberikan contoh dan motivasi kepada peserta didik agar mereka meneladan semangat belajar para guru mereka. Hari belajar guru dapat menjadi forum pemberdayaan berbagai macam komunitas guru yang ada seperti KKG, MGMP, KKKS, dan MKKS agar tidak sekadar menjadi forum 'kumpul-kumpul', tapi betul-betul menjadi wahana penguatan kompetensi guru.

Guna mengoptimalkan potensi guru, diperlukan waktu belajar khusus yang kolektif kolegial dalam membangun ekosistem

dan semangat belajar sepanjang hayat sesuai dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

“Hari belajar guru juga merupakan wujud dari konsep belajar sepanjang hayat (lifelong learning) yang tidak terbatas waktu dan usia. Secara yuridis, menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.”

Secara empiris, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa guru masih mengalami tantangan dalam pengembangan kompetensi profesional dan pedagogik. Para guru kekurangan wahana diskusi untuk memperkuat kompetensi mereka. Saya sebagai pengajar pendidikan profesi guru (PPG) selama bertahun-tahun menemukan banyak guru atau calon guru memiliki kemampuan profesional dan pedagogik yang kurang memadai. Motivasi guru juga masih menjadi tantangan serius karena guru yang telah lulus PPG cenderung tidak mau belajar lagi.

Continuous Improvement

Penetapan hari belajar guru dapat memunculkan risiko asumsi bahwa selama ini motivasi belajar guru rendah sehingga perlu ‘dipaksa’ belajar pada hari tertentu. Hari belajar guru juga dapat berisiko memunculkan persepsi bahwa guru hanya perlu belajar pada saat hari belajar, hari lainnya tidak perlu belajar. Tantangan terbesar implementasi hari belajar guru ialah bagaimana para guru mempersiapkan bahan belajar mereka dan mempertahankan keberlanjutannya. Jangan sampai hari belajar guru nanti pada akhirnya hanya menjadi forum ‘kumpul-kumpul’ seperti forum yang telah ada selama ini.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberi penjelasan dan penegasan bahwa penetapan hari belajar guru bukan dimaksudkan untuk membuat hari lain tidak belajar. Selain itu, kementerian perlu memberikan pedoman yang lebih detail tentang mekanisme, target, serta prosedur monitor dan evaluasi keberhasilan dan keberlanjutan hari belajar.

Belajar ialah aktivitas sepanjang hayat yang tidak terikat pada hari, waktu, dan usia. Guru harus senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dunia pendidikan terus berubah--kurikulum, teknologi, dan karakter siswa pun berkembang. Dengan terus memperbaiki diri, guru tetap *up-to-date* dan tidak ketinggalan zaman. Guru yang terus belajar akan menemukan metode yang lebih efektif dalam mengajar. Hasilnya? Siswa lebih tertarik, aktif, dan hasil belajar meningkat.

Continuous improvement mendukung kenaikan pangkat, pengakuan profesional, dan posisi strategis dalam dunia pendidikan. Guru yang terus berkembang terbiasa mengevaluasi diri, memperbaiki kelemahan, dan tidak puas dengan pencapaian saat ini. Guru yang semangat belajar akan menjadi contoh nyata bagi siswa bahwa belajar ialah proses seumur hidup.

Kerja Sama dengan LPTK

Pelaksanaan hari belajar guru dapat menjadi wahana pemenuhan salah satu kewajiban PKB bagi guru, yaitu pengembangan diri, penyusunan karya ilmiah, dan pembuatan karya inovatif. Ketiga kegiatan itu tidaklah mudah untuk dilakukan, khususnya dalam hal penyusunan karya ilmiah dan pembuatan karya inovatif bagi guru.

Kegiatan pengembangan diri relatif mudah karena guru hanya perlu mengikuti berbagai macam kegiatan seminar, pendidikan, pelatihan, ataupun workshop tentang pendidikan dan pembelajaran. Tantangan terbesar dari kegiatan itu ialah

pembiayaan mengikuti kegiatan tersebut mengingat tidak semua guru bersedia mengeluarkan biaya untuk pengembangan diri meskipun para guru sudah mendapat tunjangan pendidik yang cukup besar.

Penyusunan karya ilmiah dan pembuatan karya inovatif selalu menjadi tantangan besar sehingga perlu melibatkan perguruan tinggi, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Berbeda dengan dunia dosen yang mempunyai kewajiban riset dan publikasi ilmiah, dunia guru tidak mempunyai tradisi riset dan publikasi yang kuat. Oleh karena itu, kerja sama dengan LPTK menjadi sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan hari belajar guru. •

35

Mewujudkan Pendidikan Bermutu*

Lanny Ilyas Wijayanti

Anggota ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia)

PENDIDIKAN merupakan pilar utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, meresmikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang berfokus pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pemberian insentif bagi guru non-ASN, serta pemberian bantuan biaya untuk guru yang belum berkualifikasi S-1/D-4.

Kebijakan itu menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi pencapaian

*Artikel ini telah dipublikasikan di *RMOL.id*, 16 Mei 2025.

pendidikan bermutu tidak dapat terwujud tanpa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Pendidikan Bermutu: Tanggung Jawab Bersama

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan yang signifikan untuk memperbaiki sektor pendidikan melalui PHTC. Namun, meskipun kebijakan ini sangat penting, pencapaian pendidikan yang bermutu harus melibatkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah.

Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keberhasilan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, temuan dari Survei PISA 2022 menunjukkan meskipun Indonesia naik peringkat, skor literasi siswa Indonesia tetap menurun, yang menandakan bahwa meskipun ada peningkatan kebijakan dan fasilitas, tantangan dalam kualitas pendidikan masih besar. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari fasilitas yang ada di sekolah atau kebijakan pemerintah yang diterapkan, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif, melalui berbagai bentuk dukungan—baik secara langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik, baik dengan cara menyumbangkan dana, keterampilan, atau bahkan tenaga kerja untuk memperbaiki infrastruktur sekolah. Selain itu, masyarakat juga dapat menginisiasi program-program literasi atau pelatihan

keterampilan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

“Sebagai contoh, temuan dari Survei PISA 2022 menunjukkan meskipun Indonesia naik peringkat, skor literasi siswa Indonesia tetap menurun, yang menandakan bahwa meskipun ada peningkatan kebijakan dan fasilitas, tantangan dalam kualitas pendidikan masih besar. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah.”

Kolaborasi Sektor Swasta untuk Pendidikan Berkualitas

Selain pemerintah dan masyarakat, sektor swasta juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Dunia usaha tidak hanya dapat memberikan dukungan berupa dana atau fasilitas, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sektor swasta dapat membantu mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan oleh anak-anak Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Melalui program magang, pelatihan keterampilan, atau pemberian beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dunia usaha dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Digitalisasi untuk Menjangkau Semua Anak Indonesia

Digitalisasi pendidikan yang menjadi bagian dari PHTC merupakan langkah maju dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Program digitalisasi ini bertujuan untuk membawa pembelajaran yang lebih interaktif dan aksesibel melalui platform *online* dan teknologi pendidikan lainnya. Dengan adanya Ruang Murid dan papan interaktif, anak-anak di daerah terpencil pun berpotensi untuk merasakan pendidikan yang berkualitas.

Namun, digitalisasi pendidikan tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan kesetaraan akses. Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang terjangkau, harus dipastikan tersedia di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan teknologi dan memastikan setiap anak mendapatkan akses yang setara.

Kolaborasi dalam Peningkatan Kualitas Guru

Pendidikan yang bermutu juga sangat bergantung pada kualitas guru. Dalam hal ini, kebijakan pemberian insentif bagi guru non-ASN dan bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi S-1/D-4 merupakan langkah penting yang perlu didukung oleh semua pihak. Guru yang berkualitas adalah kunci utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas pula. Namun, untuk mencapainya, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para pengajar harus menjadi prioritas.

Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang diajarkan di sekolah. Dunia usaha dapat berkontribusi dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan bagi guru-guru, sementara masyarakat dapat terlibat dalam mendukung guru dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang lebih baik, baik melalui pelatihan informal atau memberikan akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar mereka.

Menuju Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia adalah cita-cita yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama bagi seluruh elemen bangsa. Pendidikan yang berkualitas dapat terwujud jika ada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan sektor pendidikan itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan PHTC, pemerintah telah memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan sektor pendidikan, tetapi untuk mewujudkannya secara maksimal, diperlukan peran serta aktif dari semua pihak. Jika kita bersinergi, bukan hanya pemerintah yang berperan, melainkan juga masyarakat dan sektor swasta yang ikut berkontribusi, maka pendidikan bermutu akan dapat dinikmati oleh semua anak Indonesia, tanpa terkecuali. •

36

Urgensi Wajib Belajar 13 Tahun*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun. Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun merupakan layanan pendidikan yang mencakup program satu tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program itu diharapkan mampu meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan warga bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masih mengamanahkan program Wajar 9 Tahun. Dikemukakan dalam Pasal 34 ayat 2, UU Sisdiknas, menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 10 Januari 2025.

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Apa yang dimaksud pendidikan dasar ialah SD/yang sederajat (enam tahun) dan SMP/yang sederajat (tiga tahun).

Faktanya, angka partisipasi sekolah secara nasional sudah melampaui sembilan tahun. Pada konteks itulah program Wajar 13 Tahun penting didukung semua elemen bangsa. Program itu bertujuan memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Program itu juga merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan pendidikan inklusif dan merata untuk semua anak bangsa.

Investasi Jangka Panjang

Pendidikan merupakan amanah konstitusi yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Pendidikan menjadi sarana yang ampuh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seorang mantan senator Amerika Serikat sekaligus penggagas yayasan beasiswa Fulbright, James William Fulbright (1905–1995), pernah menyatakan: *the education is a slow movement, but powerful force*. Substansi pernyataan itu bermakna bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang.

Pendidikan merupakan investasi terbaik untuk membangun masa depan. Karena itulah, setiap keluarga, masyarakat, dan negara penting menjadikan pendidikan sebagai perhatian. Meski bergerak lambat, pendidikan memiliki daya dobrak yang dahsyat. Pernyataan Fulbright layak menjadi renungan karena ada begitu banyak harapan pada dunia pendidikan. Institusi pendidikan diharapkan mampu berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu persoalan serius yang dihadapi pemerintah ialah kemiskinan dan pengangguran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Meski jumlah penduduk miskin menurut data BPS dikatakan mengalami penurunan dari 2023,

kondisi tersebut sangat mencemaskan. Apalagi faktanya jumlah pengangguran juga meningkat. Data pengangguran pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2024.

Ironisnya, gelombang pemutusan hubungan kerja juga terus terjadi. Kondisi itu jelas berpengaruh pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran karena kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, adakah keterkaitan persoalan kemiskinan dan pengangguran dengan pendidikan? Jawabnya, karena pendidikan diyakini dapat memutus mata rantai kemiskinan, membuka pilihan-pilihan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan keluarga miskin.

Karena itulah, pemerintah penting melakukan intervensi pada anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses layanan pendidikan yang bermutu. Salah satu intervensi yang selama ini dilakukan pemerintah ialah melalui bantuan program Indonesia pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Beberapa program intervensi pemerintah terbukti sukses meningkatkan angka partisipasi sekolah. Di antara indikatornya ialah kesuksesan program Wajar 9 Tahun menjadi Wajar 12 Tahun.

Jika intervensi pemerintah terus digelorakan, program Wajar 13 Tahun dapat diimplementasikan dengan baik. Program Wajar 13 Tahun jelas membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Kemitraan penting karena negara pasti tidak mampu sendirian menyediakan layanan pendidikan bermutu untuk semua warga bangsa. Dalam kaitan itulah, pemerintah melalui Kemendikdasmen berusaha untuk mewujudkan partisipasi semesta. Tujuannya tentu menyediakan layanan pendidikan yang bermutu.

Perlu Dukungan Regulasi

Program Wajar 13 Tahun yang dicanangkan Kemendikdasmen sejalan dengan Astacita ke-4 dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam Asta Cita ke-4 ditegaskan pentingnya usaha untuk memperkuat pembangunan sumber

daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Mengimplementasikan program Wajar 13 Tahun jelas membutuhkan landasan yuridis. Ketentuan dalam UU Sisdiknas sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan Wajar 13 Tahun. Dalam kaitan itulah penting dipertimbangkan adanya peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum program Wajar 13 Tahun. Alternatif lainnya ialah menuntaskan revisi terhadap UU Sisdiknas yang pada tahun ini menjadi prioritas dan hak inisiatif DPR RI.

Faktor lain yang juga penting dipertimbangkan ialah perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini (PAUD). Posisi PAUD penting untuk meningkatkan resiliensi dan prestasi belajar anak. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang pernah belajar di PAUD memiliki kesiapan yang lebih baik tatkala masuk usia sekolah di jenjang pendidikan dasar.

Sayangnya, hingga kini baru 66% dari seluruh desa/kelurahan di Tanah Air yang memiliki PAUD. Fakta lainnya, 97% dari PAUD yang sudah ada itu diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat alias swasta. Hanya 3% PAUD berstatus negeri. Kondisi itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Karena itulah, gerakan Satu Desa Satu PAUD menjadi suatu keniscayaan. Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu tentu membutuhkan partisipasi semua pihak.

Kebijakan lain yang juga penting dikembangkan ialah menjadikan PAUD dan SD sebagai lembaga pendidikan satu atap. Dengan begitu, seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki SD dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran PAUD. Semua alternatif itu dapat dilakukan secara paralel untuk mewujudkan Wajar 13 Tahun. Jika berjalan sukses, Wajar 13 Tahun akan menjadi bagian dari usaha mewujudkan generasi emas 2045.●

37

Catur Pusat Pendidikan ala Mendikdasmen*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

KESUKSESAN anak dalam menempuh pendidikan bukan murni tanggung jawab sekolah. Hal itu berarti orang tua tidak boleh memasrahkan begitu saja pendidikan dan pengasuhan buah hatinya ke sekolah. Sinergi semua pihak untuk menyukkseskan pendidikan dan pengasuhan anak mutlak diperlukan. Tegasnya, dalam mendidik anak-anak agar menjadi generasi emas yang berkarakter, pasti diperlukan keterlibatan banyak pihak.

Pada konteks itulah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memopulerkan istilah catur pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan merupakan pengembangan

*Artikel telah dipublikasikan di Harian *DISWAY*, 25 Maret 2025.

dari konsep tripusat atau trisentra pendidikan. Konsep trisentra pendidikan merujuk pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

Bapak Pendidikan Nasional itu mengemukakan, “Di dalam hidupnya anak-anak memiliki tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda.”

Dari pemikiran Ki Hajar itulah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenalkan istilah Tripusat Pendidikan yang meliputi: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat.

Keberadaan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Tiga entitas tersebut turut melahirkan sistem pendidikan dalam berbagai bentuk, yakni formal, nonformal, dan informal.

Dengan mempertimbangkan perkembangan era digital saat ini, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menambahkan satu lagi pusat pendidikan, yaitu media. Menurutnya, posisi media sangat penting menjadi bagian dari pilar pendidikan dan pengasuhan anak. Apalagi, faktanya, anak-anak kini telah menjadi bagian dari masyarakat virtual (*virtual community*). Anak-anak juga lebih banyak berkomunikasi melalui dunia maya dengan teman sebayanya.

Menurut hasil riset Medcom.id, pada kurun 2019–2020, lebih dari 98 persen kelompok milenial dan generasi Z mengakses internet. Hanya 4–8 persen generasi milenial yang masih membaca media cetak. Lebih dari 79 persen generasi milenial menonton televisi melalui *live streaming*. Data itu menunjukkan bahwa kebergantungan anak-anak terhadap media sosial (medsos) sungguh luar biasa. Bahkan, sebagian dari mereka berprinsip: *no gadget no life*.

Catur Pusat Pendidikan

Catur pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga. Penting disadari bahwa institusi yang pertama dan terutama dalam

pendidikan anak sejatinya adalah keluarga. Di dalam institusi keluarga itu, yang menjadi pendidik dan pengasuh terbaik tentu saja adalah orang tua. Kedua orang tua idealnya menjadi role model keteladanan bagi buah hatinya. Begitu pentingnya posisi orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak, rumah atau keluarga dikatakan sebagai madrasah yang terutama.

Hal itu sejalan dengan pernyataan hikmah: *al-bait madrasatul ula* (keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama). Lebih spesifik lagi dikatakan: *al-umm madrasatul ula* (ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya). Dengan potensi yang dianugerahkan Allah Swt., seorang ibu seharusnya menjadi pendidik dan pengasuh yang terutama. Pernyataan lain mengatakan: *Al-umm madrasatul ula wal abu mudiruha* (ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ayah merupakan kepala sekolahnya).

Tatkala anak berada di lingkungan keluarga, orang tua seharusnya tampil sebagai pendidik dan pengasuh bagi buah hatinya. Penting ditegaskan bahwa peran orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak tidak akan pernah tergantikan. persoalannya, bagaimana dengan anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang memadai dari orang tua biologisnya?

Dalam kondisi itu, peran keluarga besar (*extended family*) menjadi sangat penting. Keluarga besar penting hadir untuk mendampingi pendidikan anak-anak agar tidak salah asuh dan tersesat jalan.

Catur pusat pendidikan yang kedua adalah sekolah. Bagi sebagian besar orang tua, sekolah benar-benar menjadi tumpuan pendidikan anak. Harapan itu terutama dirasakan keluarga yang belum berpendidikan baik (*well educated*).

Ada juga keluarga yang merasa belum mampu mendidik dan mengasuh anak dengan baik karena sibuk bekerja, termasuk anak-anak yang lahir dari keluarga bermasalah (*broken home*). Dalam kondisi itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang ramah bagi anak-anak. Keinginan tersebut sejalan dengan *tagline* "Senang Belajar di Rumah Kedua". Dengan begitu, sekolah harus menjadi

tempat yang ramah, nyaman, dan menyenangkan untuk menyemai nilai-nilai karakter anak.

Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, penting diimplementasikan konsep pendidikan ramah anak (*child friendly education*). Akan tetapi, harus disadari, implementasi konsep pendidikan ramah anak membutuhkan komitmen guru. Guru harus tampil sebagai pendidik yang mendampingi anak-anak dengan sepenuh hati. Bahkan, guru juga dituntut untuk berperan sebagai orang tua sekaligus sahabat bagi anak-anak. Bukan sekadar mengajar berbagai ilmu pengetahuan, guru dan ekosistem pendidikan juga penting menjadi teladan kehidupan (*living example*) bagi anak-anak.

Catur pusat pendidikan yang ketiga adalah masyarakat. Pengertian masyarakat dapat dipahami berbagai kelompok (*stakeholders*) yang peduli dengan pengembangan pendidikan.

Mereka berasal dari pegiat pendidikan, komite sekolah, ikatan wali murid, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), komunitas seni dan budaya, organisasi profesi pendidikan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan tokoh-tokoh informal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berbagai komunitas itu penting untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan.

Catur pusat yang keempat adalah media. Perkembangan berbagai jenis media dengan semua dampak positif dan negatifnya tidak mungkin lagi dihindari. Anak-anak juga tidak mungkin diminta untuk kembali menjalani kehidupan seperti era tradisional. Lalu, mereka diminta untuk tidak menggunakan medsos sama sekali. Apa yang dapat dilakukan adalah mendampingi anak-anak dalam menggunakan medsos. Penting ditanamkan kesadaran pada anak-anak untuk menggunakan medsos secara positif, kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Catur Pusat

Anak-anak juga perlu diberi pengetahuan tentang era *post truth*. Era *post truth* merujuk pada kondisi yang banyak diwarnai peredaran berita-berita bohong (hoaks). Bahkan, menurut Haryatmoko

(2021), berita-berita bohong itu layaknya anak kandung era *post truth*.

“Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua, penting diimplementasikan konsep pendidikan ramah anak (child friendly education). Akan tetapi, harus disadari, implementasi konsep pendidikan ramah anak membutuhkan komitmen guru. Guru harus tampil sebagai pendidik yang mendampingi anak-anak dengan sepenuh hati.”

Pada era *post truth*, ukuran kebenaran tidak didasarkan pada data atau fakta. Ukuran kebenaran lebih banyak bersandar pada opini. Hukum yang tak terelakkan pada era *post truth* itu mengatakan bahwa kebohongan yang diberitakan secara terus-menerus akan dipersepsi sebagai sebuah kebenaran. Dalam kondisi tersebut, yang dipentingkan adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana berita yang bohong dan mana berita yang benar.

Jika keterampilan itu dimiliki, medsos justru dapat dijadikan media mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi generasi emas yang berkarakter. Dengan mempertimbangkan begitu pentingnya posisi media, pemikiran mendikdasmen terasa sangat relevan. Karena itulah, sinergi catur pusat pendidikan menjadi sebuah keniscayaan.

Melalui sinergi catur pusat pendidikan, proses tumbuh kembang anak akan terkawal dengan baik (*child wellbeing*). Program apa pun akan sukses jika pimpinan sekolah mampu mengolaborasikan empat pilar penting dalam catur pusat pendidikan. Sekolah tidak boleh bekerja sendirian dalam mendidik dan mengasuh anak. Justru yang harus dilakukan adalah melibatkan keluarga atau orang tua, berbagai kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan media. •

38

Reformasi Kepemimpinan Sekolah*

Arif Jamali Muis

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY

AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air. Di bawah kepemimpinan Abdul Mu'ti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi pendidikan yang lebih kukuh. Upaya perbaikan tidak hanya menysasar kurikulum, pembangunan infrastruktur, dan digitalisasi pembelajaran, tetapi juga menyentuh aspek mendasar lainnya, yakni reformasi kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 13 Agustus 2025.

dipandang sebagai garda terdepan dalam menjalankan visi-misi pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Peneliti pendidikan, Leithwood (2020), menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas proses pembelajaran di kelas. Dalam temuan risetnya, kepemimpinan yang efektif terbukti mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif, mendukung profesionalisme guru, serta mendorong inovasi pembelajaran. Dampak lanjutannya terlihat pada peningkatan hasil belajar murid secara menyeluruh. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan di tingkat sekolah sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan. Oleh karena itu, investasi pada penguatan peran kepala sekolah menjadi agenda penting dalam reformasi pendidikan.

Di tengah kesadaran akan pentingnya peran kepala sekolah itu, dunia pendidikan saat ini masih berhadapan dengan tantangan serius terkait dengan kebutuhan akan ketersediaan kepala sekolah. Data Kemendikdasmen pada 2025 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap 50.971 kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut mencakup pengisian posisi kepala sekolah di sekolah-sekolah yang masih kosong dan penggantian bagi 10.899 kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Angka itu mencerminkan betapa strategisnya posisi kepala sekolah dalam menopang keberlanjutan manajemen pendidikan di tingkat akar rumput. Tanpa kehadiran pemimpin sekolah yang kompeten, sulit membayangkan program-program pembaruan dapat berjalan efektif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen merumuskan regulasi baru dan mengembangkan program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan generasi baru pemimpin pendidikan. Program itu menggantikan program yang lama, yaitu guru penggerak sebagai syarat menjadi kepala sekolah dan lebih memfokuskan diri pada pembentukan dan penguatan kapasitas kepala sekolah. Pelatihan yang diberikan tidak hanya menekankan aspek teknis manajerial, tetapi juga

mencakup pengembangan karakter, kepemimpinan etis, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari ikhtiar sistemis untuk memperkuat kualitas tata kelola pendidikan nasional. Kepemimpinan sekolah yang tangguh dan progresif diyakini akan menjadi katalisator bagi terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Dengan demikian, transformasi pendidikan bukan sekadar jargon, tetapi menjadi gerakan nyata yang dimulai dari sosok pemimpin di lingkungan sekolah.

“Di tengah kesadaran akan pentingnya peran kepala sekolah itu, dunia pendidikan saat ini masih berhadapan dengan tantangan serius terkait dengan kebutuhan akan ketersediaan kepala sekolah. Data Kemendikdasmen pada 2025 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap 50.971 kepala sekolah di seluruh Indonesia.”

Paradigma Baru

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menandai lahirnya paradigma baru dalam kepemimpinan sekolah. Regulasi itu tidak lagi menempatkan kepala sekolah semata sebagai pejabat administratif, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran yang berperan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Mekanisme penugasan kepala sekolah pun diarahkan lebih transformatif, menekankan kompetensi kepemimpinan, integritas, dan komitmen pada perbaikan ekosistem belajar.

Dalam regulasi terbaru itu, guru yang berminat menjadi kepala sekolah harus melalui dua tahapan seleksi, yakni seleksi administratif dan seleksi substantif. Setelah lolos seleksi, calon kepala sekolah akan mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Terdapat tiga jalur yang

dapat ditempuh untuk mengikuti proses seleksi itu. Pertama, melalui undangan dari dinas pendidikan setempat. Kedua, melalui usulan dari kepala sekolah atau sekolah tempat guru tersebut mengajar. Ketiga, dengan mengajukan diri secara mandiri.

Penataan ulang proses seleksi kepala sekolah melalui tahapan seleksi administratif dan substantif menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjamin kualitas serta kesiapan calon pemimpin sekolah. Seleksi tidak lagi semata-mata menyoal kelengkapan berkas, tapi mengedepankan kompetensi kepemimpinan yang matang dan terukur.

Lebih jauh, pembukaan tiga jalur seleksi—melalui undangan dinas pendidikan, rekomendasi sekolah, dan pengajuan mandiri—mencerminkan semangat reformasi yang inklusif dan berkeadilan. Setiap guru kini memiliki peluang yang sama untuk mengakses jenjang kepemimpinan tanpa dibatasi oleh struktur birokrasi semata.

Regulasi tersebut sekaligus mendorong penguatan peran otonomi daerah. Dinas pendidikan diharapkan mampu mengidentifikasi dan membina potensi kepemimpinan dari tingkat paling dasar, membangun mekanisme rekrutmen kepala sekolah yang bersifat bottom-up dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Reformasi Kepemimpinan Sekolah

Sebagai langkah strategis dalam reformasi pendidikan, Kemendikdasmen resmi meluncurkan program kepemimpinan sekolah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025. Program itu menjadi salah satu pilar peningkatan mutu pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa program baru itu difokuskan untuk menyiapkan calon kepala sekolah sekaligus memperkuat kompetensi kepemimpinan bagi mereka yang telah menduduki posisi tersebut. Perlengkapan sekolah

Transformasi itu tidak sekadar soal pergantian nama, tetapi juga mencerminkan penajaman orientasi dan sasaran program.

Fokus utamanya ialah membentuk pemimpin satuan pendidikan yang memiliki visi strategis, kemampuan manajerial, serta keteguhan etika dalam memimpin sekolah di tengah kompleksitas zaman. Kepemimpinan pendidikan kini tidak bisa lagi bersifat administratif semata, tetapi harus mampu menggerakkan perubahan, membangun budaya kolaboratif, dan menjawab kebutuhan peserta didik secara lebih dinamis.

Program kepemimpinan sekolah akan membekali para peserta dengan serangkaian pelatihan yang dirancang komprehensif. Mulai penguatan wawasan kebijakan pendidikan, pembentukan nilai dan etos kerja hingga penguasaan keterampilan teknis seperti perencanaan strategis, pengelolaan SDM, dan evaluasi mutu pembelajaran. Dengan desain pelatihan yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, program itu diharapkan mampu mencetak pemimpin pendidikan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter kuat.

Dengan peluncuran program tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem pendidikan dari hulu. Kepala sekolah ialah aktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, inspiratif, dan inklusif. Maka dari itu, investasi terhadap kapasitas mereka merupakan langkah penting dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional. Program kepemimpinan sekolah diharapkan menjadi batu loncatan menuju tata kelola pendidikan yang lebih profesional dan berorientasi masa depan.

Transformasi Kepala Sekolah

Kebijakan dan program peningkatan kualitas kepala sekolah yang saat ini digagas oleh Kemendikdasmen bukan semata langkah administratif, melainkan bagian dari agenda besar untuk mentransformasi wajah pendidikan nasional. Program itu berjalan seiring dengan kesadaran bahwa tantangan pendidikan ke depan tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan konvensional. Dalam dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian, peran

kepala sekolah harus ikut berkembang menjadi lebih visioner dan transformatif.

Selama ini, peran kepala sekolah kerap dipahami terbatas pada fungsi administratif—mengatur jadwal pelajaran, mengelola guru, dan memastikan kelancaran operasional sekolah. Namun, dalam konteks perubahan global dan Revolusi Industri 4.0 yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, peran seperti itu tidak lagi memadai. Kepala sekolah kini dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak hanya piawai mengelola, tetapi juga mampu menginspirasi, memimpin inovasi, dan menjembatani aspirasi seluruh warga sekolah.

Transformasi peran kepala sekolah itu mengarah pada pembentukan figur pemimpin pendidikan yang mampu memadukan etos intelektual, spiritualitas, integritas moral, dan kepekaan sosial. Kepala sekolah tidak hanya menggerakkan roda organisasi, tetapi juga membawa misi perubahan yang berakar pada nilai-nilai keadaban dan kemajuan. Dalam bahasa lain, kepala sekolah kini harus tampil sebagai sosok negarawan dalam lingkup pendidikan.

Peran transformatif pertama yang patut dijalankan oleh kepala sekolah ialah sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam tata kelola pendidikan. Kepala sekolah diharapkan menjadi katalisator yang mampu memimpin perubahan di lingkungan sekolahnya, baik dalam hal budaya organisasi, pendekatan pembelajaran, maupun tata kelola sumber daya. Dalam konteks otonomi pendidikan yang semakin menguat, mereka dituntut memiliki visi strategis yang relevan dengan tantangan zaman serta kemampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi nyata di lingkungan satuan pendidikan.

Kepala sekolah juga diharapkan mampu menjadi inovator yang menggali dan mengoptimalkan potensi internal sekolah. Mereka perlu memiliki keberanian untuk mencoba pendekatan baru, menerapkan teknologi secara efektif, dan mengembangkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemampuan membaca konteks dan

melakukan adaptasi menjadi kunci dalam memimpin perubahan yang berkelanjutan.

Peran kedua yang penting dijalankan oleh kepala sekolah ialah sebagai pemrakarsa terciptanya ekosistem pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif. Dalam peran itu, kepala sekolah tidak lagi diposisikan sebagai pengatur jadwal atau pengawas guru, tetapi sebagai fasilitator yang membangun hubungan dialogis antara guru, siswa, dan orangtua. Sekolah yang sehat ialah sekolah yang terbuka terhadap suara dan aspirasi semua pihak. Di sinilah peran kepala sekolah menjadi sangat penting sebagai penjaga harmoni dalam komunitas pendidikan.

Ruang partisipasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orangtua merupakan fondasi untuk membangun rasa memiliki terhadap sekolah. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan atau perubahan didasarkan pada masukan kolektif dan disosialisasikan secara transparan. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap sekolah akan tumbuh dan semangat kolaborasi menjadi budaya yang hidup dalam keseharian.

Peran ketiga yang tidak kalah penting ialah menjadi penjaga integritas dan etika publik. Kepala sekolah harus menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai moral di lingkungan pendidikan. Merujuk pada konsep Thomas Lickona (1992), kepala sekolah idealnya memiliki tiga unsur utama: *moral knowing*, yakni pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran; *moral feeling*, yaitu kepekaan terhadap nilai-nilai tersebut; dan *moral action*, yakni keberanian untuk bertindak sesuai prinsip moral yang diyakini. Ketiganya menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem sekolah yang bermartabat.

Integritas dan etika publik bukan hanya soal menghindari penyimpangan, melainkan juga membangun budaya organisasi yang jujur, adil, dan transparan. Kepala sekolah yang mampu menjalankan peran itu akan menjadi figur sentral dalam pembentukan karakter peserta didik serta menjadi panutan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di tengah derasnya arus pragmatisme dan tekanan dunia luar, keberadaan kepala sekolah

yang berpegang pada nilai-nilai luhur menjadi penentu arah moral institusi pendidikan.

Dengan demikian, transformasi peran kepala sekolah bukan sekadar kebutuhan, melainkan keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman. Dunia pendidikan Indonesia membutuhkan lebih banyak kepala sekolah yang tidak hanya mampu mengelola, tetapi juga memimpin, menginspirasi, dan menggerakkan perubahan. Upaya Kemendikdasmen dalam merancang program penguatan kepemimpinan sekolah merupakan langkah penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Masa depan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kualitas pemimpin-pemimpin pendidikan di tingkat akar rumput. •

39

MPLS Ramah dan Nirkekerasan*

Biyanto

Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

TAHAPAN sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk sekolah negeri dan swasta hampir tuntas. Sekolah negeri dan swasta dengan kategori unggulan pasti dapat melalui SPMB dengan percaya diri. Hal itu karena calon murid baru yang mendaftar ke sekolah berkategori unggulan umumnya berjubel. Bahkan, untuk sekolah swasta berkategori besar dan mapan ada yang menerapkan SPMB sepanjang tahun dengan sistem inden.

Sementara itu, untuk sekolah negeri dan swasta berkategori non-unggulan, tahapan SMPB serasa uji nyali. Pimpinan sekolah kategori itu pasti dihantui kekhawatiran tidak memperoleh murid

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Jawa Pos*, 10 Juli 2025

baru seperti yang diharapkan. Jika kondisi ini benar-benar terjadi, keberlanjutan sekolah akan dipertaruhkan. Guru-guru tersertifikasi juga terancam tidak dapat memenuhi jam mengajar. Dampaknya, mereka akan kehilangan tunjangan sertifikasi.

Setelah SPMB tuntas, tahapan selanjutnya adalah penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) untuk murid baru. Pelaksanaan MPLS di setiap jenjang pendidikan dimulai pada Senin-Jumat (14–18 Juli 2025). Pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenalkan kebijakan dengan tagline: MPLS Ramah.

Ketentuan MPLS Ramah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2025. SE Mendikdasmen berlaku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. MPLS Ramah merupakan kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan satuan pendidikan. Kegiatan itu penting untuk mengenalkan profil lulusan, kurikulum, warga belajar, dan lingkungan sekolah.

MPLS Ramah dirancang dengan spirit memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran (*mindful learning*), bermakna (*meaningful learning*), dan menggembirakan (*joyful learning*). Tiga prinsip pengalaman belajar itu dikenal dengan pembelajaran mendalam (*deep learning*). Dalam banyak kesempatan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru.

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran mendalam penting untuk menyempurnakan implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dua kurikulum ini tetap digunakan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Melalui pembelajaran mendalam, kegiatan MPLS Ramah benar-benar menekankan pada nilai keramahtamahan sehingga murid baru akan belajar dengan aman dan nyaman serasa berada di rumah sendiri.

Ramah dan Nirkekerasan

Kata “ramah” yang disematkan dalam MPLS model baru ini tentu bertujuan mulia. Dengan menekankan kata “ramah” berarti pelaksanaan MPLS harus terbebas dari kekerasan alias nirkekerasan. Selama lima hari mengikuti MPLS Ramah di masing-masing satuan pendidikan, murid baru dapat menikmati semua kegiatan dengan ceria, bergembira, dan berbahagia.

MPLS Ramah juga menekankan pentingnya memuliakan setiap murid baru. Prinsip “memuliakan” jelas sejalan dengan konsep pendidikan holistik (*holistic education*). Salah satu prinsip pendidikan holistik menegaskan: “*honoring students as individuals: individual uniqueness.*” Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap murid merupakan pribadi yang unik. Hal itu berarti setiap murid dengan minat dan bakat yang berbeda-beda penting dihargai dan difasilitasi.

*“MPLS Ramah dirancang dengan spirit memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran (*mindful learning*), bermakna (*meaningful learning*), dan menggembirakan (*joyful learning*). Tiga prinsip pengalaman belajar itu dikenal dengan pembelajaran mendalam (*deep learning*).”*

Dalam konsep pendidikan holistik, pendidik bahkan dilarang untuk memberikan label bernada negatif pada anak. Label anak bodoh, anak nakal, dan ungkapan yang semakna dengan itu akan menjadikan anak-anak terstigma tidak baik. Pada akhirnya, anak-anak menjadi kurang percaya diri. Padahal, semua anak pasti bertalenta hebat sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan bakat dan minat masing-masing.

Untuk itulah salah satu materi penting dalam MPLS Ramah adalah menemukan bakat dan minat murid. Prinsip memuliakan anak-anak dalam MPLS Ramah harus tercermin melalui seluruh

kegiatan. Prinsip pembelajaran yang memuliakan meniscayakan semua ekosistem sekolah saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan menekankan pentingnya pembelajaran yang memuliakan maka seluruh kegiatan MPLS dipastikan ramah dengan anak dan nirkekerasan. Pembelajaran yang memuliakan murid ini penting dilakukan para pendidik melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu.

Materi MPLS Ramah

MPLS Ramah penting menjadi bagian dari kegiatan internalisasi nilai-nilai karakter. Untuk itu, selama lima hari kegiatan MPLS Ramah, murid baru akan menerima beberapa materi utama, seperti: tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, delapan dimensi profil lulusan, pencegahan judi *online*, bahaya narkoba, keadaban digital, serta budaya hidup bersih dan sehat.

Tidak semua materi disampaikan di setiap jenjang pendidikan. Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan usia anak. Hal yang penting, materi tersebut tidak berhenti pada pengetahuan semata. Setiap pendidik di satuan pendidikan harus memberikan keteladanan agar materi yang diberikan dalam MPLS Ramah menjadi kebiasaan dalam keseharian anak-anak. Jika budaya berperilaku baik terwujud sejak dini, maka pada saatnya kita akan menyaksikan anak-anak menjadi bagian generasi emas bangsa yang berkarakter.●

40

Mengawal Program Revitalisasi Sekolah*

Imron Rosyadi

Peneliti Pada Pusat Studi Halal (PSH) Universitas Muhammadiyah Surakarta

PROGRAM revitalisasi sekolah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2025, tentang “percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran”.

Inpres tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kemendikdasmen, tetapi juga diinstruksikan kepada 12 kementerian terkait, kepala staf kepresidenan, kepala komunikasi kepresidenan, kepala badan siber dan sandi negara, kepala badan informasi geospasial,

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Republika*, 18 September 2025.

kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta para gubernur dan bupati/wali kota.

Hal itu mengindikasikan bahwa program revitalisasi sekolah dijalankan secara serius (dan prioritas), terintegrasi dan kolaboratif antar-sektoral, sistem pengawasan ketat dan pencapaian program sesuai target yang dicanangkan. Adapun revitalisasi sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan SMA di seluruh wilayah Indonesia.

Program Prioritas

Sebagai salah satu program prioritas Kemendikdasmen, revitalisasi sekolah dikhidmatkan pada revitalisasi ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, ruang perpustakaan, toilet, laboratorium dan ruang unit kesehatan sekolah (UKS). Jadi perlu ditegaskan, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai program revitalisasi sekolah tersebut.

Pertama, meningkatkan mutu dan, pemerataan layanan pendidikan dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi semua siswa. Kedua, membangun sarana dan prasarana seperti, rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, atau fasilitas pendukung lainnya.

Ketiga, menerapkan skema swakelola dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan fasilitas di sekolah, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Hal itu mengingat, banyak laporan dan/atau keluhan masyarakat perihal bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, dan tidak layak guna. Bahkan, membahayakan keselamatan jiwa guru dan peserta didik. Oleh karena itu, program itu bersifat strategis, dan sangat diperlukan untuk menjamin kesinambungan pendidikan nasional, serta mendukung capaian Indonesia emas 2045.

Alhasil, program fiskal yang sedemikian krusial, dan dalam cakupan kerja nasional ini membutuhkan anggaran pendanaan yang relatif besar. Menurut catatan Kemendikdasmen (2025) besarnya anggaran dana yang dialokasikan pada revitalisasi sekolah diperkirakan mencapai Rp17,1 triliun.

“Sebagai salah satu program prioritas Kemendikdasmen, revitalisasi sekolah dihidmatkan pada revitalisasi ruang kelas, ruang guru, ruang administrasi, ruang perpustakaan, toilet, laboratorium dan ruang unit kesehatan sekolah (UKS). Jadi perlu ditegaskan, terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai program revitalisasi sekolah tersebut.”

Dampak Ekonomi

Sementara itu, dari total sasaran 13.834 unit sekolah yang direvitalisasi, hingga awal September 2025 terdapat 11.179 satuan pendidikan yang sudah melengkapi administrasi, dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kemendikdasmen.

Adapun perinciannya 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Proporsinya sekolah negeri 75,8 persen, dan sekolah swasta 24,2 persen. Dengan demikian, berdasarkan data yang dihimpun Kemendikdasmen (2025) diperkirakan pada akhir September 2025, ada 12 sekolah yang rampung mengikuti program revitalisasi itu.

Kemudian, pada Oktober 2025, bakal ada 800-an lebih unit sekolah yang menyelesaikan bangunan fisik dan pada akhir tahun 2025, Kemendikdasmen optimistis semua target sasaran revitalisasi dapat dituntaskan. Sementara itu, mekanisme pencairan dana dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen.

Sebagaimana dilaporkan, untuk mengakselerasi revitalisasi sekolah tersebut, per 8 September 2025, Kemendikdasmen telah

menyalurkan dana revitalisasi sekolah tahap pertama sebesar 70 persen dari total jumlah pagu bantuan ke 9.595 sekolah.

Dengan perincian 1.071 PAUD, 3.832 SD, 2.650 SMP, dan 2.042 SMA. Adapun realisasi tahap kedua sebesar 30 persen dari total jumlah pagu bantuan akan dicairkan setelah kemajuan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah telah mencapai 70 persen.

Catatan progresif program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC) yang dilaksanakan melalui skema swakelola. Setidaknya terdapat tiga pembaruan urgen seiring bergulirnya program revitalisasi sekolah.

Pertama, dana revitalisasi tidak lagi dikelola melalui KemenPU, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Kedua, dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat.

Ketiga, pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas. P2SP merupakan tim yang dibentuk di setiap sekolah penerima program revitalisasi. Tim itu bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan teknis pembangunan di sekolah.

Terdapat sejumlah peran P2SP. Pertama, merancang, membelanjakan, dan membangun fasilitas sesuai petunjuk teknis dan kebutuhan sekolah. Kedua, mengelola dana yang disalurkan langsung ke rekening sekolah secara transparan dan akuntabel. Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat dan tim teknis profesional dalam proses pembangunan. Keempat, menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima.

Sejatinya mekanisme swakelola bukan hal baru, pendekatan ini telah diterapkan lebih dari 20 tahun dalam kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah diberi kewenangan penuh untuk merancang, membelanjakan, membangun dan wajib mempertanggungjawabkan anggaran secara transparan dan akuntabel, dengan dukungan langsung dari masyarakat dan tenaga profesional.

Dengan beralihnya pengelolaan dana revitalisasi dari KemenPU ke Kemendikdasmen, dan mekanisme swakelola maka memungkinkan dana revitalisasi dapat diserap secara langsung oleh sekolah. Pihak sekolah dan P2SP juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam proyek pembangunan sekolah. Dengan demikian, diharapkan mekanisme itu berdampak pada ekonomi setempat (lokal).

Sebab, dalam proyek revitalisasi tersebut terjadi penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini P2SP dan sekolah sebagai pihak yang memberi pekerjaan (tukang batu, laden, tukang kayu) pada penduduk setempat.

Selain itu P2SP juga dapat mengajak toko besi dan bangunan sebagai rekanan sehingga toko bangunan setempat mengalami peningkatan penjualan dan laba, serta imbasnya lancar memberi upah karyawannya. Usaha lain yang berkaitan dengan kelancaran proyek, seperti usaha bata tanah liat, usaha genteng, warung makan, toko kelontong turut terdampak kalaupun omzet penjualannya.

Kendati demikian yang terpenting, masyarakat juga turut mengawal anggaran revitalisasi yang mencapai belasan triliunan tersebut harus tepat sasaran, tepat guna dan tepat target. Dengan demikian, diharapkan menjadi proyek percontohan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga!•

41

Ramadan dan Pedagogi Waktu*

Irsyad Zamjani

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikdasmen.

Pendidikan adalah sarana membentuk manusia multidimensi melalui proses yang memberdayakan individu, memperkuat kearifan budaya, dan merayakan spiritualitas.

PADA Ramadan 2025 ini, pemerintah menerapkan penyesuaian waktu pembelajaran di sekolah secara nasional. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, murid sekolah diberikan waktu belajar secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, atau masyarakat menjelang hingga awal Ramadan.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompas*, 20 Maret 2025.

Pembelajaran tatap muka di sekolah dilakukan pada sisa hari di bulan Ramadan hingga menjelang masa libur Lebaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan serupa dengan berbagai variasinya. Penyesuaian pembelajaran selama bulan puasa ini merupakan langkah penting dan dapat menjadi bahan refleksi untuk memikirkan kembali konsep waktu dalam pendidikan modern.

Waktu Korporat

Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan modern sangat terobsesi dengan waktu. Anak-anak kita bersekolah mengikuti jadwal yang ketat, berpindah dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya.

Terkadang, perkembangan intelektual mereka lebih banyak didikte oleh lonceng sekolah daripada keingintahuan. Belajar kerap diperlakukan sebagai proses mekanis yang dikendalikan oleh kalender akademik, bukan perjalanan personal yang organik dan mendalam.

Ahli psikologi pendidikan Amerika Serikat, Clifford Mayes (2005), menyatakan, pendidikan modern dibentuk oleh apa yang disebutnya sebagai waktu korporat (*corporate time*). Ini adalah waktu yang linear, impersonal, dan dapat dikelola secara matematis sehingga menjadi sarana ideal mengelola akumulasi keuntungan.

Munculnya kapitalisme pada awal abad ke-14 bukan hanya mengubah ekonomi, melainkan juga meredefinisi konsep waktu. Didukung oleh pesatnya produksi teknologi jam mekanis mulai abad ke-14 hingga abad ke-17, waktu menjadi komoditas yang bisa diukur, dibentuk, dan dioptimalkan untuk produktivitas.

Munculnya kapitalisme pada awal abad ke-14 bukan hanya mengubah ekonomi, melainkan juga meredefinisi konsep waktu. Didukung oleh pesatnya produksi teknologi jam mekanis mulai abad ke-14 hingga abad ke-17, waktu menjadi komoditas yang dapat diukur, dibentuk, dan dioptimalkan untuk produktivitas.

Seperti ditulis Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and*

the Contradictions of Economic Life (1976), sejak revolusi industri pada abad ke-18, organisasi dan jadwal sekolah modern disusun menyerupai struktur dan jam kerja perusahaan.

Mengikuti citra ini, dalam belajar, produktivitas disamakan dengan kecepatan. Murid yang mampu menangkap suatu konsep lebih cepat dianggap lebih pintar dibandingkan dengan mereka yang memproses lebih lambat. Padahal, belajar tak jarang perlu proses repetitif dan kontemplatif dengan kecepatan yang beragam antarindividu.

“Ahli psikologi pendidikan Amerika Serikat, Clifford Mayes (2005), menyatakan, pendidikan modern dibentuk oleh apa yang disebutnya sebagai waktu korporat (corporate time). Ini adalah waktu yang linear, impersonal, dan dapat dikelola secara matematis sehingga menjadi sarana ideal mengelola akumulasi keuntungan.”

Struktur waktu yang kaku dari sistem persekolahan modern berpotensi mengabaikan kenyataan bahwa pertumbuhan intelektual tidak selalu berjalan linear.

Sering kali belajar adalah proses yang melibatkan emosi dan bersifat sangat individual. Seorang murid yang kesulitan dengan matematika boleh jadi karena cara belajarnya tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan dalam kurikulum. Ia mungkin perlu momen refleksi, aplikasi nyata, atau cara penyampaian materi yang berbeda.

Harus diakui, waktu korporat berperan besar dalam mengorganisasi sistem sekolah secara lebih efektif dan terstandar, seiring pesatnya partisipasi pendidikan di banyak negara (Ramirez & Boli, 1987). Akan tetapi, kita perlu mereimajinasi pendidikan yang mempertimbangkan pengalaman murid dengan waktu secara lebih mendalam.

Dalam karya berjudul *Education and Time: Foundations of a Temporal Pedagogy* (2005), Mayes menawarkan tiga konsep waktu

alternatif yang bisa dipertimbangkan agar proses pembelajaran tak selalu didikte oleh waktu korporat.

Pertama, waktu otobiografis (*autobiographical time*). Itu adalah waktu personal yang sarat pengalaman reflektif. Guru perlu memberi muridnya kesempatan untuk mengonstruksi makna belajar serta mengeksplorasi potensi dan kebutuhan belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bercerita, refleksi, atau motivasi pengembangan diri.

Sekolah juga dapat mengatur jadwal belajar yang lebih fleksibel, blok waktu lebih panjang untuk pembelajaran lebih mendalam, dan kesempatan bagi murid mengatur ritme belajarnya sendiri. Dengan cara ini, belajar menjadi pengalaman yang lebih personal dan berkesan.

Kedua, waktu kultural historis (*culturo-historical time*). Itu adalah pemahaman kolektif tentang waktu yang dibentuk oleh budaya dan kesadaran sejarah tertentu. Budaya yang berbeda memiliki pengalaman waktu yang berbeda pula. Budaya Barat modern menganggap waktu berjalan linear dan progresif. Hal itu menjadikan kemajuan dan inovasi sebagai doktrin utama sehingga persaingan individu sangat ditekankan.

Di sisi lain, pada banyak masyarakat dunia Timur, waktu dipahami sebagai siklus: dari kelahiran, kematian, hingga kelahiran kembali. Implikasinya, penghargaan pada keberlangsungan komunitas dan alam lebih penting dibandingkan dengan capaian individu.

Pendidikan semestinya dapat menghormati perbedaan ini dengan memasukkan struktur pembelajaran yang responsif budaya. Penyesuaian kalender akademik dengan jadwal upacara adat atau waktu ibadah puasa seperti Ramadan saat ini, misalnya, merupakan bagian dari peran pendidikan memperkuat ikatan murid dengan masyarakat, budaya, dan nilai-nilainya.

Aktivitas murid mengisi waktu-waktu budaya tersebut dapat dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran di sekolah. Dengan cara ini, sekolah bukan sekadar tempat

bersaing mengumpulkan prestasi individu, melainkan juga tempat mengasah kearifan, kebersamaan, dan keberlanjutan ekosistem.

Ketiga, waktu spiritual (*spiritual time*), yaitu waktu yang mengandung aspek transenden dan terkait dengan keyakinan, etika, dan kontemplasi. Spiritualitas memberi makna lebih dalam pada belajar, yang lebih dari sekadar menyiapkan calon-calon pekerja industri. Dalam tradisi Islam, belajar bukan hanya proses memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan juga proses pencarian spiritual.

Mengutip teolog Muslim, Abu Hamid al-Ghazali, menuntut ilmu harus melewati proses pendisiplinan diri (*tahdzib al-nafs*) dan penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*) agar dapat mendekat pada kebenaran dan kesejatan Tuhan.

Karena itu, berbeda dari ideologi pendidikan modern yang berorientasi pada hasil belajar yang terukur, para sarjana Muslim klasik menaruh perhatian lebih besar pada etika dalam proses belajar.

Kitab pedagogi klasik karangan Burhanuddin al-Zarnuji yang jadi bacaan wajib di banyak pesantren di Indonesia, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum* (Mengajarkan Murid Metode Belajar), misalnya, mengulas berbagai prinsip etik seperti motivasi (*niyyah*), sikap kepada guru (adab), disiplin dan kesungguhan (*ijtihad*), kesabaran (*shabr*), serta menjaga perilaku dan pola konsumsi (*wara'*).

Selain itu, belajar juga dikatakan memerlukan waktu yang panjang (*thul zaman*). Kualitas hasil belajar tidak diukur dari kepintaran seseorang, tetapi dari manfaat dan berkahnya ilmu. Setinggi apa pun ilmu, jika diperoleh tanpa nilai dan etika, akan hilang keberkahannya.

Dalam berbagai tradisi keagamaan, waktu disusun berdasarkan aktivitas ritual. Sekolah bisa mengintegrasikan waktu-waktu ini untuk memberi momen kontemplasi ke seluruh warga sekolah.

Misalnya, sekolah dapat menyesuaikan jam pelajaran dengan waktu-waktu keagamaan, seperti waktu salat untuk murid Muslim, jam kanonis atau ibadah harian untuk murid Kristiani, atau meditasi untuk murid beragama Hindu dan Buddha. Menghidupkan suasana spiritual di sekolah melalui internalisasi praktik dan ajaran keagamaan akan menautkan pendidikan dengan tujuan transenden dan kemanusiaannya.

Momen Simbolik

Penyesuaian pembelajaran selama Ramadan pada dasarnya bukan hanya representasi dari penerapan waktu spiritual, melainkan juga autobiografis dan budaya sekaligus. Ini dapat memberi kesempatan murid mengambil jeda dari waktu mekanis untuk menemukan motivasi dan mengeksplorasi pengalaman belajar baru yang lebih personal.

Selain itu, dengan melibatkan diri dalam berbagai aktivitas Ramadan dalam keluarga dan masyarakat, para murid juga turut andil dalam memastikan praktik serta nilai-nilai budaya dan religi di masyarakat tetap berkelanjutan.

Esensi Ramadan sendiri sebagai bulan penyucian diri dan pembentukan karakter manusia unggul (*muttaqin*) dapat menjadi momen simbolik untuk mengingatkan sistem pendidikan kita.

Pendidikan tak boleh terlalu terpaku pada dogma modernitas yang melihat pelajar sebagai aset dan mesin pembangunan ekonomi semata. Pendidikan adalah sarana membentuk manusia multidimensi melalui proses yang memberdayakan individu, memperkuat kearifan budaya, dan merayakan spiritualitas. •

Bagian V

Literasi dan Numerasi untuk Pendidikan Bermutu

Kemendikdasmen, 2025



42

Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia*

Hafidz Muksin

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen

PERINGATAN Kemerdekaan Ke-80 RI mengambil tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut sejalan dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam pidato Upacara Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan, “Hari ini, 80 tahun yang lalu, Bung

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 19 Agustus 2025.

Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah tonggak sangat penting dan pintu gerbang menuju kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Proklamasi bukanlah sekadar pernyataan kedaulatan politik bebas dari penjajahan, melainkan juga penegasan atas kedaulatan budaya, dan pintu gerbang kemenangan menuju kejayaan bangsa dan negara” (17-8-2025).

Penegasan atas kedaulatan budaya tidak terlepas dari kedaulatan bahasa Indonesia yang telah terbukti nyata menjadi tonggak kedaulatan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya.

“Manusia yang merdeka adalah mereka yang memiliki asa, cita-cita, dan kegigihan untuk meningkatkan kualitas diri dengan semangat belajar sepanjang hayat, teguh pendirian, menjaga identitas budaya, cinta alam, dan kasih sayang kepada umat manusia,” tegas Abdul Mu’ti di depan peserta upacara.

Kemendikdasmen dengan visi pendidikan bermutu untuk semua, berusaha mendidik generasi bangsa yang berjiwa merdeka, semangat juang, patriotisme, dan tanggung jawab yang tinggi untuk memajukan bangsa dan negara, mencintai tanah air, menjaga muruah, meninggikan harkat dan martabat, serta memuliakan manusia dan kemanusiaan menuju kebudayaan dan peradaban yang utama.

Kini, 80 tahun setelah merdeka, komitmen generasi muda serta masyarakat Indonesia dalam menjaga indentitas budaya dan kedaulatan bangsa melalui bahasa Indonesia apakah sudah terwujud? Peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan bangsa seharusnya menjadi obor semangat perjuangan para generasi muda agar terus mengalir mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bahasa Indonesia Pemersatu Bangsa

Sejarah perjuangan bangsa telah membuktikan perjuangan generasi muda yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan

bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan bangsa yang berbunyi,

“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Kesadaran akan keberagaman dan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan berbagai bahasa daerah yang ada, menjadikan bahasa Indonesia alat komunikasi yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Perjalanan perjuangan bangsa menuju kemerdekaan melalui kekuatan diplomasi bahasa telah menjadi bukti nyata betapa penting peran bahasa dalam perjuangan bangsa Indonesia.

“Kini, 80 tahun setelah merdeka, komitmen generasi muda serta masyarakat Indonesia dalam menjaga identitas budaya dan kedaulatan bangsa melalui bahasa Indonesia apakah sudah terwujud? Peran bahasa Indonesia dalam mempersatukan bangsa seharusnya menjadi obor semangat perjuangan para generasi muda agar terus mengalir mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Pengayaan terhadap kosakata bahasa Indonesia dilakukan dengan penyediaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang terus ditingkatkan jumlahnya. Sejak tahun 1988 terdapat sebanyak 62.000 entri dalam KBBI I, 72.000 entri dalam KBBI II, 78.000 entri dalam KBBI III, 90.049 entri dalam KBBI IV, 126.635 entri dalam KBBI V, dan 208.283 entri pada KBBI VI.

Sebagai penerus perjuangan bangsa kita patut bangga karena bahasa Indonesia didukung oleh 718 bahasa daerah yang memiliki nilai-nilai luhur, pengetahuan, dan budaya yang dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Untuk itu, kita harus terus menjaga kekayaan bahasa daerah agar tidak punah. Semangat menjunjung bahasa Indonesia yang menjadi tonggak kedaulatan bahasa Indonesia harus terus kita jaga dan bela bersama.

Kedudukan Bahasa Indonesia Dijamin Negara

Pentingnya bahasa bagi bangsa dan negara Indonesia telah dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol negara tersebut sebagai jati diri dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat sehingga wajib digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengakuan konstitusional ini diperkuat kembali melalui regulasi khusus yang menyetarakan bahasa dengan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan di dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulis. Hal itu makin memperjelas peran penting bahasa dalam ketatanegaraan dan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini sikap positif generasi muda dan masyarakat Indonesia harus terus ditumbuhkan dan ditingkatkan dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut merupakan wujud kepatuhan terhadap aturan hukum negara sekaligus upaya menjaga kedaulatan bahasa Indonesia.

Kedudukan Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah ditetapkan sebagai regulasi yang menyetarakan bendera, bahasa, dan lambang negara

dalam satu kesatuan kebanggaan bangsa Indonesia. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Peran bahasa juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Hal itu mencerminkan penegasan kembali agar setiap acara resmi harus menggunakan bahasa Indonesia.

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, serta alat perhubungan antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi alat untuk mempersatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial-budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia.

Seluruh pejabat negara, tokoh masyarakat, pendidik, serta generasi muda dituntut harus terus menciptakan ketertiban dalam berbahasa Indonesia sehingga setara dengan penggunaan bendera dan lambang negara serta lagu kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengutamakan Penggunaan Bahasa Indonesia

Peran penting bahasa Indonesia perlu diperkuat dalam ketentuan penggunaan yang baik dan benar sesuai dengan norma dan kaidah. Untuk itu, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia ditetapkan. Kemudian, upaya meneguhkan kembali kedaulatan bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi itu menjadi dasar penting konsolidasi bahasa Indonesia di internal bangsa untuk meningkatkan fungsi bahasa negara menjadi bahasa yang berdaulat di negerinya sendiri. Permendikdasmen tersebut menjadi upaya penguat agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta mematuhi penggunaan bahasa Indonesia, baik di ruang publik/lanskap maupun dalam tata naskah dinas.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Badan Bahasa, Kemendikdasmen) menjadi satu-satunya lembaga negara yang mendapatkan amanat secara konstitusional untuk melaksanakan pembangunan dalam bidang kebahasaan. Badan Bahasa memiliki tugas utama dalam tiga hal, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Upaya pemertabatan bahasa Indonesia dilakukan oleh Badan Bahasa untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui program pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Prioritas utamanya adalah kedaulatan bahasa Indonesia, peningkatan literasi, perlindungan bahasa dan sastra daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia. Pembinaan dan pendampingan penggunaan bahasa Indonesia terus dilakukan terhadap 50 lembaga di setiap provinsi, baik lembaga pemerintah, pendidikan, maupun swasta secara sistematis dan berkelanjutan agar penggunaan bahasa yang baik di ruang publik/lanskap dan dokumen resmi dapat diwujudkan.

Penggunaan dan Pelestarian Bahasa Daerah

Data Badan Bahasa (2019) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), sekitar 73 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah di rumah dan sekitar 60 persen menggunakannya dalam pergaulan. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa banyak anak memulai pendidikan dasar sebelum fasih berbahasa

Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran, khususnya bagi siswa di daerah 3T yang mengalami kesulitan belajar di kelas awal akibat rendahnya kemampuan bahasa Indonesia (INOVASI). Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah menggunakan bahasa daerah atau bahasa dominan mereka (Malone, 2018). Bagi kebanyakan siswa, bahasa dominan siswa adalah bahasa ibu, yakni bahasa yang paling mereka kenali dan kuasai. Kajian yang dilakukan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan INOVASI menyatakan bahwa penggunaan bahasa pengantar dengan bahasa ibu di kelas awal dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran.

Penggunaan bahasa daerah di satuan pendidikan tingkat dasar juga mulai digalakkan melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah yang dimulai sejak tahun 2021 dan kini telah dilaksanakan di 38 provinsi dengan sasaran 120 bahasa daerah. Dengan adanya program tersebut, bahasa daerah digunakan pada satuan pendidikan dasar SD dan SMP melalui pembelajaran pada muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan pilihan dan minat siswa. Program tersebut telah meningkatkan kecintaan dan kemampuan anak dalam penggunaan bahasa daerah yang pada gilirannya memiliki peran penting dalam pelestarian bahasa daerah agar tidak mengalami kepunahan. Para penutur muda inilah yang nantinya akan menjadi generasi emas yang akan selalu mencintai dan bangga pada bahasa daerahnya.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 juga mengamanatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berbagai upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional telah dilakukan oleh Badan Bahasa. Sampai dengan saat ini sudah terdapat 57 negara terfasilitasi program BIPA, 772 lembaga penyelenggara program BIPA, 200.956 orang

pemelajar BIPA, serta 2.313 penugasan pengajar BIPA. Fasilitasi program pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, terutama perwakilan RI, perguruan tinggi, dan penyelenggara program BIPA mandiri juga terus dilakukan.

Penyediaan buku cerita anak yang bermutu dan menarik juga dilakukan oleh Badan Bahasa melalui penerjemahan dari berbagai bahasa sumber, baik dalam maupun luar negeri. Setidaknya sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 terdapat sebanyak 5.121 buku terjemahan cerita anak dari bahasa asing dan 3.566 dari bahasa daerah yang berbasis *science, technology, engineering, arts, dan mathematics* (STEAM). Tentu penyediaan buku-buku terjemahan tersebut dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan upaya penting untuk meningkatkan literasi siswa menuju generasi emas.

Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum (General Conference) UNESCO pada 20 November 2023 merupakan wujud capaian perjuangan yang dirintis oleh Badan Bahasa dengan dukungan berbagai pihak. Peran bahasa Indonesia yang sejak tahun 1928 diikrarkan sebagai bahasa persatuan, lalu pada tahun 1945 ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pada tahun 2023 ditetapkan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO menjadi tonggak penting kedaulatan bangsa melalui bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi wujud nyata peran bahasa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menuju generasi emas pada tahun 2045.

Dengan fondasi yang kuat di tingkat nasional dan pengakuan di tingkat internasional, bahasa Indonesia bukan hanya menjadi warisan, melainkan juga modal strategis bangsa untuk memasuki abad baru kejayaan Indonesia. Pada usia ke-80 tahun Indonesia, mari, kita jaga bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan selayaknya kita menghormati bendera dan lambang negara. Dengan bahasa, kita menjaga jati diri bangsa; dengan bahasa, kita meraih kejayaan peradaban. Bahasa Indonesia adalah jiwa persatuan, peneguh kedaulatan, dan obor menuju Indonesia Emas 2045. •

43

Menakar Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia*

Muhammad Muis

Bahasawan; Kepala Balai Bahasa Provinsi Jambi

SETAKAT ini, sikap masyarakat penutur terhadap bahasa Indonesia tetap menjadi topik yang relevan diperbincangkan. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi pentingnya isu ini. Bagaimana sebenarnya sikap kita terhadap bahasa nasional? Sejauh mana kecintaan itu tumbuh dan terwujud dalam keseharian?

Realitas Kebahasaan

Realitas penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih sangat membutuhkan perhatian bersama. Ruang publik—yakni

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 20 Juli 2025.

tempat yang mudah diakses dan kerap dikunjungi, seperti mal, pasar, kawasan pertokoan dan bisnis, tempat bermain, taman hiburan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan sekolah—pada hakikatnya merupakan ruang luas untuk bertemu, bersosialisasi, berinteraksi, bersantai, bahkan menambah pengetahuan dan menjadi tempat belajar.

Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya bahasa yang digunakan di ruang-ruang tersebut ialah bahasa yang baik, bernas, elok, dan mendidik—bahkan yang mampu membangkitkan kecintaan pada bahasa, budaya, dan bangsa. Kesan yang diperoleh di tempat-tempat itu cepat membekas di benak pengunjung, termasuk kesan terhadap penggunaan bahasanya.

Di ruang publik, hingga kini masih banyak ditemukan penggunaan kosakata, frasa, bahkan kalimat dalam bahasa asing—terutama bahasa Inggris. Kenyataan itu terlihat jelas, antara lain, pada penamaan berbagai papan nama perusahaan, kompleks perumahan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara, melainkan juga meluas ke berbagai kota lain di luar Jakarta. Di Jakarta sendiri, jumlahnya tidak terhitung: Senayan City, Thamrin City, Central Park, Pacific Place, Mall of Indonesia (MoI), Lippo Mall Kemang, hingga Jakarta Garden City.

Di sejumlah kota lain, situasinya tidak jauh berbeda. Di Bandarlampung, misalnya, terdapat pusat pertokoan bernama Simpur Centre dan Central Plaza, atau tulisan besar “Bandarlampung City” yang terpampang mencolok di gerbang masuk kota dari arah Bandara Radin Inten II. Di Jambi pun tampak besar tulisan “Jambi Business Centre” di salah satu kawasan bisnis kota itu.

Akan jauh lebih elok dan mencerminkan semangat keindonesiaan apabila semua penamaan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk dalam bahasa Indonesia pun tetap dapat disertai padanan dalam bahasa daerah, dan jika dibutuhkan, dilengkapi pula dengan terjemahan dalam bahasa asing.

Jika seorang warga asing, katakanlah dari Prancis, berkunjung ke sejumlah kota di Indonesia, bukan mustahil ia akan mengira bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai bahasa Inggris. Ia barangkali bertanya-tanya, apakah benar bahasa Inggris menjadi bahasa sehari-hari di republik ini? Dugaan semacam itu bukan tidak mungkin muncul dalam benaknya.

Bangsa Prancis dikenal sangat mencintai bahasa nasional mereka, yakni bahasa Prancis. Selain Prancis, empat bangsa lain—Italia, Jerman, Tiongkok, dan Jepang—juga memiliki reputasi kuat sebagai bangsa yang rakyatnya sangat menghargai dan mencintai bahasa negara mereka. Kelima bangsa itu bukan penutur bahasa Inggris. Namun, mereka tidak mengalami arus penginggrisan yang mengkhawatirkan sebagaimana terjadi di Indonesia.

Harus diakui, tidak sedikit di antara saudara sebangsa yang kurang, atau bahkan tidak, menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia—bahasa yang telah mempersatukan bangsa ini sejak dicituskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bagi sebagian dari mereka, dari segi gengsi, bahasa Indonesia justru dianggap sebagai pilihan kedua, sedangkan posisi pertama ditempati oleh bahasa Inggris.

Mereka barangkali lupa, atau belum mengetahui, bahwa di ranah internasional bahasa Indonesia telah mendapatkan pengakuan penting: ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO, melalui pengesahan Resolusi 42 C/28 dalam Sidang Umum ke-42 UNESCO pada Senin, 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO, Paris. Dalam sidang tersebut, bahasa Indonesia menjadi bagian dari sepuluh bahasa dunia yang digunakan, bersama enam bahasa resmi PBB—Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia—serta Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia.

Apakah gejala itu berkaitan dengan menurunnya kecintaan sebagian pengguna terhadap bahasa Indonesia? Kecintaan yang berlebihan terhadap bahasa Inggris kerap diasumsikan dapat menggeser, bahkan mengikis, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Dalam konteks itulah, kita perlu menakar—setidaknya secara pribadi—sejauh mana bahasa Indonesia bermakna dan

berperan dalam kehidupan kita. Seberapa dalam kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara?

Bertolak dari uraian tersebut, langkah Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dapat dikatakan tidak berlebihan. Peraturan itu bertujuan menjaga kedaulatan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI melalui serangkaian upaya pengawasan dan penguatan pemakaiannya. Pengawasan itu dilakukan melalui empat tahap utama: sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi.

Jauh sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan—yang antara lain mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita menjaga kedaulatan bahasa Indonesia; merasa bangga, mahir, dan ingin maju bersama bahasa Indonesia, bukan?

Epilog

Perlu terus ditumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah milik bangsa, harta bersama yang paling berharga, karena bahasa ini telah terbukti menjadi alat perekat yang tidak menimbulkan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Bahasa persatuan ini sejatinya merupakan karunia dan berkah dari Tuhan bagi bangsa Indonesia, anugerah yang mampu menyatukan kita sebagai saudara dan sebagai bangsa dalam satu semangat kebangsaan.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus senantiasa didorong untuk semakin maju bersama bahasa Indonesia: menjadi pengguna yang mahir, pemilik yang bangga, dan pewaris yang mencintai bahasa bangsanya dengan sepenuh hati. •

44

Menyemai Asa Bahasa Ibu*

Asrif

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara

GEDUNG Merah Putih di Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia (PPSDM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Sawangan, Depok, pada Senin pagi, 26 Mei 2025, dipadati oleh ratusan remaja berbusana etnik. Dari busana yang dikenakan, para remaja itu dapat dikenali berasal dari etnik Papua, Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Batak, Poso, Dayak, Kaili, Maluku, Halmahera, Sula, Flores, Bima, Bali, Lampung, dan etnik lainnya. Selain ratusan remaja, sejumlah orang tua, guru, dan pejabat dari berbagai daerah di Indonesia memadati teras dan halaman gedung Merah Putih PPSDM.

Teras dan gedung tersebut menjadi semakin sesak oleh manusia tatkala Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul

*Artikel telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 30 Mei 2025

Mu'ti), Ketua Komisi X, Wakil Ketua DPD, para Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), dan unsur pimpinan Kemendikdasmen lainnya memasuki Gedung Merah Putih. Para pejabat itu juga hadir dengan mengenakan pakaian yang bercorak etnik.

Ada Apa?

Senin itu, ratusan anak dari berbagai provinsi di Indonesia bersama Mendikdasmen, Ketua Komisi X, Wakil Ketua DPD RI, Kepala Badan Bahasa, gubernur, bupati, dan walikota bertemu untuk merayakan puncak perayaan revitalisasi bahasa daerah di republik ini.

Ratusan anak yang berbusana etnik itu merupakan tunas bahasa ibu yang dengan penuh semangat berusaha melestarikan bahasa ibu. Mereka memiliki cinta dan bangga memiliki bahasa daerah. Putra-putri bangsa itu aktif menggerakkan remaja di sekitarnya untuk tetap melestarikan bahasa ibu mereka masing-masing.

Remaja-remaja usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama itu merupakan bibit yang telah disemai oleh Badan Bahasa untuk melanjutkan estapet penutur bahasa daerah pada masa sekarang dan masa akan datang. Wajah-wajah remaja dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatra itu merupakan penjaga bahasa daerah kita. Mereka akan menjadi pelanjut masa depan kekayaan budaya bangsa bernama bahasa ibu, bahasa daerah kita.

Kehadiran ratusan anak Indonesia di Gedung Merah Putih itu, selain merayakan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa, adalah untuk memberi kabar kepada kita semua bahwa bangsa ini memiliki hampir seribu bahasa daerah yang perlu mendapat perhatian serius.

Di gedung yang menggunakan nama Merah-Putih, remaja dari berbagai suku itu menegaskan komitmen untuk menjaga dan

melestarikan bahasa daerah. Bahasa ibu wajib lestari tidak hanya sebagai kekayaan bangsa, tetapi lebih dari itu bahasa ibu sebagai identitas, perekat, komunikasi etnik, dan lumbung kekayaan pengetahuan dan budaya etnik. Lisan para remaja saat FTBIN di Gedung Merah Putih memberi pesan kepada kita untuk tidak abai menjaga bahasa daerah. Komitmen para tunas bahasa ibu itu sejalan dengan harapan Abdul Mu'ti untuk tetap melestarikan bahasa daerah, termasuk melalui lembaga pendidikan.

FTBIN merupakan selebrasi berbahasa daerah oleh para pelajar yang telah mengikuti program revitalisasi bahasa daerah sejak tahun 2021. Pada tahun pertama, Badan Bahasa merevitalisasi 3 bahasa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Badan Bahasa merevitalisasi 39 bahasa daerah dan dialek pada tahun 2022 yang tersebar di provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Pada tahun 2023, Badan Bahasa merevitalisasi 72 bahasa daerah dan dialek di 26 provinsi. Selanjutnya pada tahun 2024, Badan Bahasa melaksanakan revitalisasi di semua provinsi dengan menyertakan 93 bahasa dan dialek. Pada tahun 2025 ini, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyatakan bahwa Badan Bahasa akan merevitalisasi 120 bahasa daerah dan dialek.

Semarak revitalisasi bahasa daerah yang memasuki tahun kelima dilaksanakan dengan prinsip kerja fokus, kolaborasi, dan berkelanjutan. Badan Bahasa menempatkan revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu program strategis. Sebagai program strategis, bahasa-bahasa daerah di Indonesia diupayakan untuk tetap lestari sebagai lumbung sumber budaya, kearifan, pengetahuan, tradisional.

Program strategis itu diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku terkait. Gubernur, bupati, walikota, DPRD, perguruan tinggi, periset, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat adat untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan menyukseskan revitalisasi bahasa daerah.

Dukungan anggaran dan kebijakan dari Komisi X DPR RI dan DPD RI menjadi bagian kolaborasi yang menjadikan revitalisasi bahasa daerah berjalan dengan baik. Program revitalisasi yang dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan itu menunjukkan kinerja yang terukur.

Rabu kemarin, 28 Mei 2025, para tunas bahasa ibu telah kembali ke daerah mereka masing-masing. Mereka telah kembali setelah beberapa hari berada di jantung republik untuk mengabarkan dan mengobarkan komitmen untuk melestarikan bahasa daerah. Di daerah, mereka mengemban tugas sebagai duta bahasa daerah. Mereka telah tergerak sebagai duta bahasa yang akan bergerak dan menggerakkan orang di sekitarnya untuk melestarikan bahasa daerah.

Jika duta bahasa daerah itu bergerak dan menggerakkan orang lain dengan baik, dengan dukungan maksimal pemerintah daerah, maka bahasa daerah kita akan tetap menjadi kekayaan budaya Indonesia yang penuh warna. Tidak banyak negara di dunia yang memiliki keragaman dan kekhasan bahasa daerah sekaya Indonesia.

Bahasa daerah di Indonesia bahkan jauh lebih bervariasi dibandingkan bahasa daerah di Papua Nugini. Bahasa daerah di Indonesia tersuguhkan dengan sangat variatif yang terlihat dari Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bahasa daerah itu digunakan oleh masyarakat yang nomaden di pegunungan juga masyarakat yang nomaden di lautan, perkotaan, dan perdesaan.

Saya kembali teringat pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat membuka Kongres Bahasa Indonesia VIII tahun 2003. SBY (saat itu menjabat Menkopolkam) menyatakan bawah salah satu keindahan Indonesia ialah karena Indonesia memiliki keragaman bahasa ibu. SBY menceritakan bahwa permadani yang berwarna putih itu memang indah, tetapi permadani yang memiliki banyak warnalah yang jauh lebih indah. Itulah Indonesia dengan segala keragaman bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayahnya. •

45

Meramu Buku Teks dengan Formula Rasa ‘Deep Learning’*

Bambang Trim

Direktur LSP Penulis dan Editor Profesional;
Anggota Komite Penilaian Buku Teks, Pusat Perbukuan (2022–2024)

Semua guru itu sama, sampai salah seorangnya menulis buku teks bermutu. Ia membuat murid yang tadinya tidak tahu menjadi tahu; yang tahu menjadi paham; yang paham menjadi melakukan; yang melakukan menjadi menganalisis; yang menganalisis menjadi mengevaluasi; dan yang mengevaluasi menjadi mampu menciptakan sesuatu.

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Kompasiana*, 17 September 2025.

AKHIR September 2025, saya dijadwalkan memberi pelatihan penulisan dan penyuntingan buku teks (pendamping) dan sertifikasi profesi (penulis dan editor) untuk sekira 87 orang guru-guru dan kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Azhar. Lembaga pendidikan itu merupakan salah satu sekolah swasta yang merintis pengembangan buku teks secara mandiri dengan melibatkan guru-guru penulis. Model itu merupakan praktik baik dalam pembelajaran yang lebih kontekstual dengan kebutuhan lembaga pendidikan, khususnya peserta didik.

Penerbitan buku teks pendamping untuk internal YPI Al Azhar dilaksanakan oleh PT Tanmiah Al Azhar sebagai penerbit. Misi menyiapkan bahan ajar yang bermutu dengan pendekatan profesional telah mendorong PT Tanmiah Al Azhar mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas guru sebagai penulis buku. Betul bahwa pendidikan dan pengajaran mutlak dikuasai oleh para guru, tetapi penulisan buku teks adalah soal lain. Jadi, benarlah bahwa semua guru itu adalah sama, sampai salah seorangnya menulis buku.

Sekarang hal itu bertambah lagi jika posisi guru menjadi istimewa ketika ia mampu menulis buku dengan formula pembelajaran mendalam (*deep learning*). Isu baru dunia pendidikan itu telah dibawa oleh “imam” pendidikan dasar dan menengah saat ini, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti. Konsep pembelajaran mendalam disambut antusias oleh kalangan pendidik, sekaligus memunculkan pertanyaan: Bagaimana pendekatan itu dapat diwujudkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari?

Salah satu instrumen paling penting atau bahan ajar primer dalam pembelajaran adalah buku teks. Berdasarkan UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan, buku teks terbagi atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Sebagaimana beberapa kali ditekankan Mendikdasmen Abdul Mu’ti bahwa *deep learning* adalah pendekatan pembelajaran, bukan sebagai kurikulum baru maka di dalam penulisan dan penyusunan buku teks, ia dapat diterapkan sebagai formula rasa atau bahkan jiwa buku itu sendiri.

Guru Penulis Sebagai “Koki” Buku Teks

Seorang guru yang sekaligus berperan menjadi penulis buku teks sudah ada sejak dahulu karena guru termasuk yang paling memahami bagaimana suatu pelajaran diajarkan kepada para murid berdasarkan landasan pedagogik. Guru dari generasi ke generasi beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, seperti kurikulum dan model pembelajaran.

Jika kurikulum adalah bahan-bahan untuk “memasak” sebuah mata pelajaran, ‘pembelajaran mendalam’ adalah sebuah resep untuk meramunya. Namun, sebaik apa pun sebuah resep, di tangan seorang koki yang tidak menguasai “jiwa” memasak dan seni memasak, makanan akan tetap hambar dan tidak enak. Ibarat Anda mampir ke sebuah resto yang memamerkan salah satu menu masakan rawon, tetapi begitu dipesan dan disantap, seperti bukan rawon atau rawon versi salah buat.

Jadi, pembelajaran mendalam atau deep learning jangan lagi ditempatkan sebagai label, jenama, atau jargon seperti halnya terjadi pada masa-masa lalu. Sering kali label, jenama, dan jargon itu tidak sesuai dengan isinya. Saya menengarai dalam waktu dekat akan muncul buku-buku teks pendamping (buku yang dibuat masyarakat swasta) mencantumkan label deep learning, padahal isi dan penyajian buku sama sekali atau minim menampilkan sajian buku berformula rasa deep learning yang menyadarkan, mencerdaskan, dan menyenangkan.

Lalu, bagaimana model sederhana membenamkan (*embended*) pembelajaran mendalam pada materi esensial, materi pengayaan, dan asesmen di dalam buku?

Landasan Pembelajaran Mendalam pada Buku Teks

Ada tiga pilar yang menjiwai pembelajaran mendalam, *mindful* (berkesadaran), *meaningful* (bermakna), dan *joyful* (berkesenangan). Dalam kerangka itu, pembelajaran bukan sekadar

transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi proses membentuk pribadi yang reflektif, kritis, kreatif, dan berdaya.

Implikasinya bagi buku teks sangat jelas. Buku bukan lagi sekadar wadah hafalan konsep, melainkan medium untuk membangkitkan kesadaran, memberi makna pada pengalaman belajar, dan menumbuhkan kegembiraan. Dengan kata lain, buku teks harus “hidup”, kontekstual, dan inspiratif.

Sebagai guru penulis buku teks atau ahli yang menulis buku teks, Anda harus memahami langkah memahami landasan berikut ini untuk meramu buku teks dengan formula rasa pembelajaran mendalam.

Kontekstualisasi materi: Buku teks harus menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Misalnya, konsep matematika tentang persentase dapat dikaitkan dengan pemberian rabat di toko atau perhitungan harga dan keuntungan.

Pertanyaan kritis dan reflektif: Alih-alih soal hafalan, buku teks dapat menyajikan pertanyaan terbuka, seperti “Apa dampak media sosial terhadap cara kita berinteraksi?” atau “Bagaimana energi terbarukan depan mengubah masa depan kota kita?” Pertanyaan semacam itu mendorong berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Narasi interaktif: Buku teks dapat menghadirkan cerita, studi kasus, atau dilema etis. Misalnya, dalam pelajaran biologi, bab tentang lingkungan hidup dapat disertai cerita tentang konflik pembangunan dan kelestarian hutan. Narasi interaktif membuat siswa terlibat emosional dan intelektual.

Kolaborasi lintas disiplin: Materi dalam buku teks dapat menghubungkan ilmu yang berbeda. Bab sejarah tentang Revolusi Industri dapat dihubungkan dengan pelajaran fisika tentang mesin uap dan pelajaran ekonomi tentang kapitalisme.

Inklusivitas dan keberagaman: Buku teks yang mindful perlu memuat perspektif lokal dan global. Kisah-kisah dari berbagai daerah di Indonesia dapat berdampingan dengan pengalaman dunia internasional. Hal itu memperkaya pemahaman siswa sekaligus menanamkan penghargaan terhadap keragaman.

Desain visual dan digital: Generasi sekarang tumbuh pada era digital sehingga turut mengubah cara mereka belajar atau mengakses informasi. Buku teks cetak tetap penting, tetapi versi digital interaktif dapat memperkaya pengalaman belajar. Misalnya, digitasi berupa tautan kode QR yang mengarah ke video eksperimen atau simulasi yang terdapat di dalam buku.

Tantangan Kreativitas, Inovasi, dan Editorial

Tentulah menulis buku teks dengan formula rasa pembelajaran mendalam turut membentangkan tantangan kreativitas dan editorial. Tantangan kreativitas dan inovasi khususnya bagi penulis dan tantangan editorial khususnya bagi penerbit.

Guru penulis perlu langsung beradaptasi dengan konsep pembelajaran mendalam, terutama mengimplementasikannya ke dalam buku teks. Muatan buku teks yang baku, yaitu bab buku sesuai dengan alur tujuan pembelajaran, materi esensial, materi pengayaan, asesmen formatif dan sumatif, serta rangkuman atau refleksi—untuk pembelajaran mendalam lebih disarankan—disajikan secara tidak kaku atau jangan menjadi epigon buku-buku teks kebanyakan.

Guru sebagai penulis buku bukan hanya mengantarkan materi sebagaimana buku-buku teks pada umumnya, melainkan ia harus memfasilitasi proses belajar “ful-ful”: proses belajar yang *mindful*, *meaningful*, dan *joyful*. Untuk itu, ada tiga capaian pembelajaran yang perlu dimasukkan ke dalam buku teks, yaitu berpikir kritis, reflektif, dan kolaboratif untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Materi esensial perlu dikemas dalam bentuk narasi kontekstual, studi kasus nyata, atau masalah autentik yang dekat dengan kehidupan siswa. Materi pengayaan memberi ruang eksplorasi, misalnya proyek, diskusi lintas bidang atau tugas berbasis riset kecil/sederhana. Asesmen formatif dan sumatif tidak hanya tes tertulis, tetapi juga portofolio, jurnal refleksi, dan produk kreatif.

Refleksi menjadi bagian akhir yang penting: siswa diajak menuliskan pemahaman, perasaan, dan kaitan dengan pengalaman pribadi.

Khusus untuk penerbit, tantangan editorial adalah dengan melibatkan editor-editor kreatif yang bukan hanya spesialis, melainkan juga generalis sehingga mereka dapat memberikan saran kepada penulis dalam banyak hal, seperti penambahan dan pengurangan materi (yang tidak diperlukan), pengayaan materi, variasi asesmen formatif dan sumatif, serta penyajian buku dengan pendekatan menunjukkan (*to show*) dan mengisahkan (*story telling*), bukan sekadar memberi tahu (*to tell*). Editor juga dapat menyarankan penggunaan visualisasi sehingga materi buku lebih mudah dipahami.

Saran saya, para editor perlu menjadikan buku-buku dari negara yang telah maju pendidikannya sebagai bench mark lalu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Jadi, bukan sekadar diembel-embeli telah sesuai dengan kurikulum, melainkan juga memang benar-benar memberi pengalaman belajar yang reflektif, kolaboratif, dan rekreatif bagi murid.

Penerbit dalam hal ini dapat melakukan praktik uji coba penggunaan buku langsung kepada guru dan murid. Umpan balik dari para guru dan murid akan sangat berguna dalam penyempurnaan buku sebagai bahan ajar primer yang mengandung jiwa pembelajaran mendalam. Namun, sejatinya buku teks perlu bersifat adaptif sehingga dapat diperbarui secara berkala.

Buku Teks dengan Formula Rasa Pembelajaran Mendalam

Tantangan penyusunan buku teks dengan formula “rasa” pembelajaran mendalam yang kaya justru terdapat pada internal Kemendikdasmen sendiri, yaitu Pusat Perbukuan. Lembaga itu merupakan lembaga resmi di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) yang memang berwenang dalam urusan perbukuan, khususnya buku pendidikan.

Pertanyaannya: Apakah Pusat Perbukuan sudah menyiapkan formula untuk buku teks dengan “rasa” pembelajaran mendalam? Jika sedang dirancang sebuah formula oleh Komite Penilaian Buku Teks dan editor Pusat Perbukuan, penerbitan dari masyarakat (swasta) dapat menjadikannya rujukan meskipun penerbit swasta juga dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi sendiri sebagai pembeda dengan buku teks lainnya.

Saya sendiri pernah terlibat sebagai penulis buku teks utama pada awal pemberlakuan Kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan. Tentu saja saya perlu langsung beradaptasi dalam penulisan dengan cara mempelajari konten dan konteks kurikulum, menyusun alur tujuan pembelajaran, menyusun kerangka buku teks dalam format bab, dan menulis materi tiap bab sebagai *drafting*.

Hal itu sungguh melelahkan dan merepotkan karena lebih dari satu dekade saya tidak pernah lagi menulis buku teks. Menulis buku teks berbasis Kurikulum Merdeka praktis menjadi pengalaman baru menggunakan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Dalam konteks itu, saya menyusun formula buku teks secara mandiri. Boleh jadi formula itu tepat dan boleh jadi masih memerlukan kembali penyusunan ulang yang lebih kontekstual.

Sejatinya menulis buku itu sendiri merupakan praktik langsung dari *deep learning* karena penulis berproses bukan menulis buku secara instan. Sebagaimana ucapan Donald M. Murray, tokoh pendidikan dan seorang penulis: “Menulis itu berproses, bahkan proses yang tidak pernah selesai”•

46

Literasi yang Terluka pada Era Digital*

Hafidz Muksin

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen

APA arti anggaran pendidikan triliunan rupiah jika masih ada ribuan anak yang tidak mampu mengeja namanya sendiri? Pertanyaan ini mencuat saat publik dikejutkan oleh kabar bahwa ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali, belum mampu membaca (CNN Indonesia, 15/4/2025). Di tengah era digital dan ledakan informasi, ironi itu menggambarkan jurang yang menganga dalam dunia pendidikan kita.

Sayangnya, itu bukan kasus tunggal. Skor literasi membaca Indonesia dalam survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 hanya mencapai 359—angka terendah sepanjang sejarah partisipasi kita, dan jauh tertinggal dari

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 18 Mei 2025.

negara tetangga. Data Asesmen Nasional (AN) pun tidak lebih menggembirakan: hanya setengah dari peserta didik yang memenuhi standar kompetensi literasi minimum.

Rendahnya kemampuan literasi ini tidak dapat disikapi dengan penyesalan dan saling menyalahkan. Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bergerak—dengan hati, dengan data, dan strategi berkelanjutan. Literasi bukan sekadar kemampuan teknis membaca, melainkan fondasi berpikir dan dasar bagi semua proses belajar—dari memahami pelajaran matematika hingga menjelajahi dunia melalui sains dan sosial.

Oleh karena itu, gerakan literasi harus hadir di ruang kelas dan ruang keluarga. Gerakan ini harus hidup dalam buku cerita yang disukai anak dan sesuai dengan jenjangnya, guru yang terlatih, serta orang tua yang ikut mendampingi. Kita membutuhkan ekosistem yang menyuburkan kegemaran membaca sejak usia dini.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bergerak aktif menyemai literasi dari hulu ke hilir. Melalui Program Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, sebanyak 716 judul buku cerita anak telah diproduksi dan dipilih secara ketat.

Buku-buku itu mencakup cerita rakyat, fabel, dan kisah petualangan yang merangsang imajinasi, hasil karya penulis dan ilustrator lokal, serta terjemahan dari bahasa daerah dan asing. Tujuannya: memberi akses bacaan yang layak dan relevan bagi anak-anak di seluruh penjuru negeri.

Distribusi buku pun dilakukan secara masif. Pada 2022, lebih dari 15 juta eksemplar buku dikirim ke sekolah dasar, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Angka itu terus meningkat—hingga 2024, jumlah buku yang disalurkan mencapai lebih dari 21 juta eksemplar. Kini, setidaknya 20.558 sekolah telah menerima kiriman buku. Sekolah-sekolah yang dulu kekurangan bahan bacaan kini mulai memiliki perpustakaan yang hidup kembali, dan sudut baca yang ramai oleh anak-anak.

Namun, buku tidak dapat bekerja sendiri. Literasi tidak tumbuh dari halaman yang diam, melainkan dari interaksi yang hangat. Oleh karena itu pula, Badan Bahasa menyediakan modul pemanfaatan buku yang digunakan untuk pelatihan literasi bagi guru, pustakawan, dan komunitas. Pelatihan ini mencakup metode kreatif, seperti membaca nyaring (*read aloud*), pengelolaan pojok baca, dan lomba mendongeng.

Rendahnya kemampuan literasi ini tidak dapat disikapi dengan penyesalan dan saling menyalahkan. Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bergerak—dengan hati, dengan data, dan strategi berkelanjutan. Literasi bukan sekadar kemampuan teknis membaca, melainkan fondasi berpikir dan dasar bagi semua proses belajar—dari memahami pelajaran matematika hingga menjelajahi dunia melalui sains dan sosial.

Melalui kolaborasi Balai Bahasa di daerah dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) di seluruh Indonesia, pelatihan dilakukan di berbagai wilayah. Guru-guru didampingi agar mampu mengintegrasikan kegiatan membaca ke dalam pembelajaran. Tujuannya bukan hanya agar siswa membaca lebih banyak, melainkan juga agar mereka mencintai kegiatan membaca itu sendiri.

Gerakan literasi juga menyentuh rumah dan komunitas. Program penyuluhan literasi keluarga digulirkan agar orang tua memahami pentingnya membacakan buku cerita di rumah. Di desa-desa, taman bacaan masyarakat (TBM) menjadi ruang inspirasi baru. Terlebih hadirnya program bantuan pemerintah bagi pegiat literasi di seluruh pelosok negeri, telah menguatkan peran TBM dalam menumbuhkan budaya literasi di masyarakat.

Dampak dari kerja kolektif ini mulai terlihat. Di berbagai sekolah, terutama di daerah yang sebelumnya nyaris tidak tersentuh bahan bacaan, perpustakaan yang dulu sepi kini hidup

kembali. Di sekolah yang menerima 1.600 buku bacaan bermutu tersebut, terlihat para siswa memujanya dengan antusias. Jam istirahat tidak lagi dihabiskan dengan gawai, tetapi diisi dengan kegiatan membaca mandiri.

Survei Kemendikdasmen pada siswa kelas 1 sampai 3 di sekolah penerima buku menunjukkan peningkatan kemampuan membaca hingga 8 persen dalam beberapa bulan. Indikator formal, seperti AN, juga mencatat kemajuan. SD Negeri 003 Batu Aji di Kepulauan Riau, misalnya, berhasil meraih skor literasi 96,67 dalam AN 2023 dan menerima penghargaan BOS Kinerja. Para guru mengakui, kehadiran buku-buku bermutu telah memperkaya kosakata, meningkatkan rasa percaya diri siswa, memperkuat pemahaman bacaan mereka, dan mulai berpikir kritis.

Memang, semua itu hanya mungkin terjadi karena adanya partisipasi semesta. Pemerintah pusat menyediakan buku dan pelatihan, sementara pemerintah daerah ikut mendistribusikan dan mendukung sarana literasi. Kepala sekolah dan guru menjadi penggerak utama di lapangan. Komunitas literasi, perpustakaan desa, dan TBM menjangkau anak-anak di luar sekolah. Di rumah, orang tua menciptakan kebiasaan membaca yang sederhana, tetapi berdampak besar: membacakan cerita sebelum tidur, menyediakan rak buku kecil, atau menemani anak membaca rutin setiap hari.

Media massa juga berperan penting. Melalui resensi buku, ruang cerita pendek, dan konten literasi digital, dapat menjadi saluran penyebaran budaya membaca yang efektif. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk memopulerkan literasi sebagai gaya hidup.

Budaya literasi tidak tumbuh dari seminar mewah atau sekolah elit, tetapi dari ruang sederhana—tempat anak melihat buku kali pertama, mendengar cerita yang menginspirasi, dan merasakan bahwa membaca itu menyenangkan. Ketika semua elemen bergerak bersama, literasi tidak lagi menjadi sekadar program, melainkan menjadi bagian dari denyut kehidupan. Mari kita mulai dari halaman pertama—dan jangan pernah berhenti membaca. •

47

Matematika (Seharusnya) Gembira dan Menggembirakan*

Moh. Abduh

Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Bidang Teknologi Pendidikan

NUMERASI, secara sederhana ditafsirkan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari- adalah keterampilan dasar yang sangat penting pada era modern. Sayangnya, saat ini Indonesia menghadapi kondisi yang boleh disebut sebagai darurat numerasi. Ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan aksi kolektif. Itu bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah, melainkan tanggung

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Media Indonesia*, 28 Juli 2025

jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan.

Numerasi merupakan jembatan antara konsep matematika dan kehidupan nyata. Karena itu, pembelajaran matematika seharusnya tidak hanya berfokus pada penguasaan dan menghafalan rumus, tetapi juga bagaimana siswa dapat memahami, menggunakan, dan menalar angka dalam konteks yang bermakna dan menyenangkan.

Banyak siswa juga orang dewasa sering kali memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit, membingungkan, bahkan menakutkan. Seharusnya tidak demikian. Matematika sejatinya adalah dunia penuh logika, kreativitas, dan keindahan pola yang dapat membangkitkan rasa penasaran serta kegembiraan. Matematika seharusnya gembira dan menggembirakan, bukan menakutkan dan mematikan rasa ingin tahu.

Banyak faktor yang membuat matematika terasa “menakutkan”. Cara pembelajaran yang terlalu kaku, berorientasi pada jawaban benar-salah, minimnya koneksi dengan kehidupan sehari-hari, serta tekanan ujian yang berlebihan membuat siswa lebih “takut salah” daripada “ingin tahu”. Mereka berupaya “menghindari” daripada “menyelesaikan”. Padahal, kesalahan dalam belajar adalah hal wajar—dan dari situasi itulah sebenarnya pembelajaran menggembirakan dimulai.

Guru dan orang tua berperan penting dalam menumbuhkan kegembiraan belajar matematika. Mereka bisa menciptakan suasana belajar yang aman, suportif, dan penuh dorongan positif. Guru yang mengajar dengan antusias dan kreatif dapat mengubah paradigma siswa dari “takut matematika” menjadi “suka matematika”

Sudah saatnya pembelajaran di sekolah membongkar stigma bahwa matematika itu sulit dan menakutkan. Matematika adalah bahasa universal yang penuh pesona dan daya tarik. Jika disampaikan dengan cara yang menggembirakan, matematika dapat menjadi sumber kebahagiaan, logika yang mencerdaskan, dan alat untuk memahami dunia dengan lebih baik. Hal ini karena

sejatinya, matematika bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang kegembiraan berpikir.

Jo Boaler (2016) dalam bukunya *Mathematical Mindsets*, menegaskan bahwa kemampuan matematika bukanlah sesuatu yang “dibawa sejak lahir”, melainkan dapat dikembangkan oleh siapa saja melalui latihan, strategi yang tepat, dan lingkungan belajar yang mendukung. Karena itu, matematika harus diajarkan dengan cara yang fleksibel dan visual. Melalui pendekatan berbasis representasi visual dan diskusi terbuka, siswa akan memahami konsep secara mendalam, bukan sekadar menghafal prosedur atau rumus.

“Banyak siswa juga orang dewasa sering kali memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit, membingungkan, bahkan menakutkan. Seharusnya tidak demikian. Matematika sejatinya adalah dunia penuh logika, kreativitas, dan keindahan pola yang dapat membangkitkan rasa penasaran serta kegembiraan.”

Pola pikir siswa juga punya peran yang demikian penting. Siswa dengan *growth mindset* (pola pikir berkembang) cenderung memiliki prestasi matematika lebih baik dan lebih tahan terhadap kegagalan, dibanding dengan siswa dengan *fixed mindset*. Hal itu karena siswa dengan *growth mindset* yakin betul bahwa kecerdasan yang mereka miliki dapat dikembangkan lebih baik.

Tidak kalah penting adalah upaya membangun kesadaran siswa bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan adalah momen penting untuk pertumbuhan otak. Ketika siswa membuat kesalahan dan berusaha memahaminya, otak mereka aktif dan berkembang untuk memperbaiki sekaligus menghindari terjadinya kesalahan serupa.

Terkait ini, budaya pembelajaran di kelas harus bebas dari rasa takut salah. Pembelajaran matematika yang sehat adalah ekosistem dimana siswa merasa aman untuk mencoba, bertanya, gagal, dan

mencoba lagi. “*Every time a student makes a mistake in math, they are growing a synapse*”, kata Boaler.

Sementara dalam buku *Strategi Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan*, Suharta (2016) menekankan bahwa pembelajaran matematika tidak boleh kaku, formal, atau menegangkan. Pembelajaran matematika menyenangkan akan membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan memahami konsep secara bermakna. Penggunaan berbagai strategi kreatif—permainan edukatif, metode kontekstual, alat peraga, diskusi kelompok, dan pendekatan visual—dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa secara signifikan.

Sebagaimana aspek *meaningful* dalam pendekatan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*), keterkaitan pembelajaran matematika dengan kehidupan nyata juga harus menjadi hal yang prioritas. Matematika menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pembelajaran geometri dikaitkan dengan desain bangunan, atau pengukuran dikaitkan dengan anatomi tubuh manusia.

Pembelajaran matematika menggembirakan pun harus melibatkan emosi positif. Suasana belajar yang menyenangkan, bebas dari tekanan berlebihan, dan memfasilitasi interaksi sosial siswa akan mendorong mereka merasa gembira, senang dan nyaman saat belajar matematika. Ketika pembelajaran matematika menggembirakan terjadi di kelas maka akan meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan berpikir logis, mengurangi rasa takut salah dan tekanan dalam pembelajaran, dan mengasah kreativitas dalam menyelesaikan soal dan tantangan.

Karena itu, peran guru akan sangat menentukan. Guru harus mampu merancang pengalaman belajar yang variatif, interaktif, dan bermakna, agar matematika tidak terasa membosankan atau menakutkan. Guru harus memberikan pembelajaran matematika yang bermakna, bukan sekadar soal hafalan. Guru perlu mulai mengajak siswa untuk menjelaskan proses berpikir, bukan hanya menyelesaikan jawaban. Karena menghargai proses berpikir siswa,

guru seharusnya tidak hanya mengejar hasil akhir berupa jawaban benar.

Guru pun perlu memperkaya pengajarannya dengan berbagai representasi visual dan manipulatif. Gunakan strategi variatif dan inovatif dalam pembelajaran, antara lain matematika berbasis gim, gamifikasi, teka-teki logika, *project-based learning*, dan media konkret (manipulatif), termasuk menghubungkan materi matematika dengan konteks kehidupan nyata siswa. Juga menghargai kesalahan siswa sebagai bagian penting dari tumbuh kembang pembelajaran mereka termasuk menghindari melabeli siswa dengan predikat “pintar” atau “tidak pintar”.

Pembelajaran matematika menggembirakan akan menciptakan suasana positif dan membuat siswa tidak takut terhadap matematika. Ketika siswa merasa aman dan senang, mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dan bertanya. Dalam suasana yang menyenangkan dan bebas tekanan, siswa lebih berani mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Kondisi itu akan membuka ruang untuk berpikir kritis, analisis masalah, dan refleksi diri, yang semuanya merupakan bentuk pembelajaran berkesadaran (*mindful*).

Aktivitas matematika menyenangkan sering kali mendorong siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu. Kolaborasi itu akan memperkaya perspektif, memperkuat pemahaman konsep, dan memicu terjadinya pemaknaan yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran. Pembelajaran menyenangkan lazimnya berfokus pada minat dan kebutuhan siswa, bukan sekadar menyelesaikan kurikulum. Itu selaras dengan prinsip pembelajaran bermakna (*meaningful*), yang menekankan bahwa siswa perlu merasa terlibat secara pribadi dan kognitif agar benar-benar memahami.

Pembelajaran matematika menggembirakan merupakan salah satu bentuk nyata pembelajaran mendalam. Ketika siswa belajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi, senang, dan tertantang, mereka akan lebih siap untuk menyelami konsep, menerapkan pengetahuan, dan mengembangkan cara berpikir matematis yang lebih bermakna dan menggembirakan (*joyful*).•

48

Revolusi Pembelajaran Matematika: Dari Momok Menakutkan ke Pendekatan Humanis pada Era Digital*

R. Poppy Yaniawati

Dosen FKIP, Universitas Pasundan

HARI Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei bukan hanya sekadar mengenang semangat persatuan bangsa melalui Budi Utomo, melainkan lebih dari itu. Itu adalah momentum refleksi: sudah sejauh mana kita sebagai bangsa membangun kebangkitan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai pelajaran yang sulit, kaku, bahkan menegangkan?

*Artikel ini telah dipublikasikan di *Pikiran Rakyat*, 29 Mei 2025.

Matematika sering dianggap sebagai pelajaran paling menakutkan di sekolah. Tidak sedikit siswa yang mengaitkannya dengan tekanan, kegagalan, bahkan trauma belajar. Di ruang-ruang kelas, matematika lebih sering dipersepsikan sebagai kumpulan angka dan rumus yang harus dihafal dan dikerjakan dengan cepat, bukan sebagai alat untuk berpikir atau memahami dunia. Maka dari itu, saat kita berbicara tentang kebangkitan pendidikan pada era digital ini, sudah saatnya kita menggugat cara pandang lama dan mengusung pendekatan baru, yakni matematika humanis. Di tengah gelombang digitalisasi, tantangan pendidikan matematika bukan hanya pada penguasaan konsep, melainkan bagaimana membuat pembelajaran itu menyenangkan (*joyful*), penuh kesadaran (*mindful*), dan bermakna (*meaningful*).

Humanis

Citra matematika sebagai pelajaran “kering” dan tidak manusiawi telah melekat begitu lama. Banyak siswa merasa tertekan, bahkan cemas, ketika berhadapan dengan soal-soal matematika. Padahal, sejatinya matematika adalah bahasa universal untuk memahami kehidupan—dari pola daun hingga sistem ekonomi, dari pergerakan planet hingga algoritma media sosial.

Sayangnya, cara mengajarkan matematika yang dominan selama ini terlalu menekankan pada hafalan rumus dan prosedur mekanistik. Siswa dipaksa mengerjakan soal tanpa paham mengapa dan untuk apa. Di sinilah pentingnya revolusi pendekatan—bahwa matematika seharusnya menyentuh hati, mengaktifkan pikiran, dan mengaitkan pengalaman hidup siswa.

Pendekatan matematika humanis mendorong guru untuk memanusiakan proses belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun relasi yang empatik, mengenali latar belakang dan gaya belajar siswa, serta mengaitkan konsep-konsep matematika dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar.

Sebagai contoh, saat mempelajari statistika, siswa tidak hanya mengolah data, tetapi juga diajak mengkaji isu-isu seperti kemiskinan, gizi buruk, atau pemanasan global. Dalam geometri, siswa dapat merefleksikan keindahan simetri dalam batik atau arsitektur lokal. Dengan begitu, matematika menjadi bermakna dan dekat realitas.

Transformasi digital memberikan peluang besar untuk memperbarui cara kita mengajarkan matematika. Salah satu inovasi penting adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, termasuk *deep learning* yaitu cabang dari *machine learning* yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola, belajar dari data, dan membuat keputusan.

Dalam dunia pendidikan, *deep learning* bukan hanya soal algoritma komputer, melainkan juga mengacu pada pendekatan pedagogi yang mendalam yang dalam hal ini siswa tidak sekadar menghafal, tetapi memahami secara konseptual, mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman, dan dapat menggunakannya untuk berpikir kritis serta menyelesaikan masalah nyata.

Deep learning dalam pendidikan inilah yang memperkuat terwujudnya *joyful learning*, *mindful learning*, dan *meaningful learning*. *Joyful learning*: Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya, dengan media interaktif, gim edukatif, atau *augmented reality*, siswa dapat belajar sambil bermain dan bereksplorasi.

Mindful learning: Pembelajaran matematika diarahkan agar siswa hadir secara utuh, penuh perhatian, tidak tergesa-gesa, dan bebas dari tekanan. *Deep learning* berbasis teknologi dapat memberikan umpan balik yang personal sehingga siswa tidak merasa tertinggal atau dibandingkan.

Meaningful learning: Pembelajaran yang bermakna terjadi saat siswa memahami relevansi dari apa yang dipelajari. Melalui data nyata, simulasi interaktif, dan tugas berbasis proyek, siswa dapat melihat bagaimana matematika berperan dalam kehidupan. Dengan menggabungkan pendekatan humanis dan teknologi

berbasis *deep learning*, pembelajaran matematika dapat menjadi pengalaman yang mendalam dan transformatif.

“Transformasi digital memberikan peluang besar untuk memperbarui cara kita mengajarkan matematika. Salah satu inovasi penting adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, termasuk deep learning yaitu cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola, belajar dari data, dan membuat keputusan.”

Kebangkitan

Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum kebangkitan cara berpikir dalam pendidikan. Kita tidak dapat lagi mengukur keberhasilan pendidikan dari nilai ujian semata. Kita perlu menilai bagaimana pendidikan membentuk manusia yang utuh, mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Guru matematika memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka perlu difasilitasi untuk terus belajar, khususnya dalam penguasaan pedagogi baru, teknologi pembelajaran, dan pendekatan humanis. Kurikulum juga harus membuka ruang bagi integrasi antara literasi numerasi, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong inovasi. Riset-riset pendidikan berbasis AI dan *deep learning* perlu didukung, selama tetap berpijak pada prinsip inklusivitas, etika, dan keadilan.

Matematika bukan hanya tentang rumus dan angka. Ia adalah cermin dari cara kita memahami dunia dan membentuk masa depan. Dalam era digital ini, mari kita wujudkan pendidikan matematika yang menyenangkan, penuh makna, dan memanusiakan. •

Epilog

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Alhamdulillah, bunga rampai ini akhirnya hadir sebagai mosaik pemikiran, refleksi, dan aspirasi publik tentang arah pendidikan Indonesia. Tulisan-tulisan di dalamnya bukan sekadar kumpulan gagasan, melainkan juga cermin dari denyut harapan masyarakat, sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah jalan panjang yang harus kita tempuh bersama.

Buku ini menghadirkan lima tema penting: pembelajaran mendalam, tes kemampuan akademik, koding dan kecerdasan artifisial, guru, serta literasi dan numerasi. Kelima tema tersebut adalah simpul strategis yang sedang dan akan terus menjadi pijakan transformasi pendidikan nasional. Dari ruang kelas yang berada di desa terpencil hingga sekolah unggulan yang ada di perkotaan, tantangan kita sama: bagaimana memastikan setiap anak Indonesia sesuai dengan konstitusi mendapatkan hak atas pendidikan yang bermutu.

Sebagai Kepala BSKAP, saya melihat bunga rampai ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kebijakan dan opini publik, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama. Hal itu menegaskan kembali pentingnya partisipasi semesta yakni pemerintah, pendidik, orang tua, akademisi, dunia usaha, media, serta seluruh

elemen masyarakat. Pendidikan tidak dapat hanya dijalankan oleh satu institusi, tetapi merupakan ikhtiar kolektif bangsa.

Kita menyadari bahwa jalan menuju pendidikan bermutu penuh tantangan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai tulisan di buku ini, ada pula energi perubahan yang luar biasa, guru yang berdaya, siswa yang bersemangat, dan komunitas yang peduli. Dari sanalah optimisme itu tumbuh.

Akhir kata, saya berharap bunga rampai ini menjadi suluh yang menerangi perjalanan kita. Semoga dapat menginspirasi para pembaca untuk terus berkontribusi dalam membangun pendidikan Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jalan memuliakan kehidupan, mengangkat martabat bangsa, dan menyiapkan generasi emas 2045. •

Indeks



A

Ahmad Tholabi Kharlie 107
Ananda 126
Arif Jamali Muis 49, 190
Asrif 226

B

Bambang Trim 230
Biyanto 21, 80, 181, 185, 198

D

Dinia Husni Rahiem 27

E

Endang Suprapti 99

F

Fahrudin Eko Hardiyanto 90

H

Hafidz Muksin 214, 228, 237
Haryatmoko 7, 189
Hendarman 55, 103
Heribertus Jani 44

I

Idris Apandi 64
Ifah Hanifah Misbach 132
Imron Rosyadi 202
Irsyad Zamjani 160, 207

L

Lanny Ilyas Wijayanti 176

M

Moh. Abduh 150, 241
Mohammad Nur Riantor Al Arif
94
Muhammad Isa Anshori 143
Muhammad Muchlas Rowi 138
Muhammad Muis xxii, 222
Muhammad Syawal Djamil 70

N

Nunuk Suryani 166, 171

R

R. Poppy Yaniawati 246

S

Siti Murtiningsih 118
Supriyatno 154
Suyanto 37
Syamsir Alam 59
Syamsul Kurniawan 14

T

Toni Toharudin 2, 33, 75, 253
Triyanto 171

W

Wiguna Yuniarsihi 112

Y

Yudhi Kurnia 147